

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Aloon-aloon Utara, Nomor: 09, Ponorogo, Jawa Timur 63413, Telepon 0352-481003, Faksimile 0352-481484, Laman setda ponorogo.go.id, Pos-el setda@ponorogo.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.2.2/KH/3085/405.25/2024

TENTANG PENYAMPAIAN MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) SELEKSI PENGADAAN CPNS T.A. 2024

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 4 November 2024 Nomor: B/5457/M.SM.01.00/2024 Perihal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami lampirkan Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang.

Penyampaian ini adalah dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tahap seleksi pengadaan PNS setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal SKB agar para peserta seleksi CPNS TA. 2024 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

KAB

TARIAT OF

TAH

Dikeluarkan di

: Ponorogo

Pada tanggal

: 18 November 2024

Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

No RAgus Pramono



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/5457/M.SM.01.00/2024

04 November 2024

Sertifikasi

Elektronik

Sifat : Segera

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan

CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran

2024

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah di

Tempat

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tahap seleksi pengadaan PNS setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal SKB agar para peserta seleksi CPNS TA. 2024 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan Materi Pokok Soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Untuk selanjutnya, Materi Pokok Soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN

Erwan Agus Purwanto

Tembusan

- 1. Menteri PANRB;
- 2. Kepala BKN.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS 2024

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
1	Administrator Database		Pengetahuan Umum:
	Kependudukan Ahli Pertama	1	Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
		2	Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
		3	Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
		-	Pengetahuan Khusus:
		1	Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
			Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
			Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator
		3	Database
2	Administrator Kesehatan Ahli		Kemampuan Umum:
	Pertama	1	Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional
		2	Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan
		3	Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan
			Tata Kelola Bidang Kesehatan
		_	Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
		6	Jabatan Fungsional Adminkes
			Kemampuan Khusus:
			Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan
			Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan
			Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan
			Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan
3	Adyatama Kepariwisataan dan	Э	Seriilikasi tenaga kesenatan dan produk-produk yang terkait bidang kesenatan Kemampuan Umum:
3	Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	1	Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Enonomi rirodai 7 illi i ortama	_	Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
			Kemampuan Khusus:
		1	Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
		2	
		3	Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif
		4	Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif
		5	Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
		-	Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengambangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan
		6	ekonomi kreatif
4	Analis Akuakultur Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Pedoman tentang pembudidayaan ikan
			Kemampuan Khusus:
			Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
			Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut
		4	Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan
		5	Perlindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan
		6	Pengelolaan Usaha Perikanan budidaya
5	Analis Anggaran Ahli Pertama	<u> </u>	Kemampuan Umum:
	3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -		UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
			Kemampuan Khusus:
		1	Nota Keuangan R-APBN TA 2024
			UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024
			UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
		4	UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
		5	PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
6	Analis Data Ilmiah Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Pengenalan ilmu data dalam Analis Data Ilmiah
		_	Penelusuran dan pengelolaan data dan informasi ilmiah
		3	Rancangan kerja Analisis Data Ilmiah
		4	Kompetensi Khusus:
		_	Pengumpulan dan persiapan data Manajemen data
			Manajemen data Basis data
			Data mining
			Analisis dan interpretasi data
7	Analis Hukum Ahli Pertama	-	Kemampuan Umum:
'		1	Hukum Pidana
			Hukum Perdata
			Hukum Acara
•	•	-	

Halaman 1 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Hukum Tata Negara Hukum Internasional
			Hukum Administrasi Negara
			Hukum Umum
			Kemampuan Khusus:
		1	Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-
			undangan
		2	Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
		3	Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
		5	Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
		5	Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji
		6	materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
8	Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama	1	Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan
		2	Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumpling/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan
		3	Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional
		4	Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang
		5	Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional
	Analia Kababa ALER	6	Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi
9	Analis Kebakaran Ahli Pertama		Kompetensi Umum: Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan
		1	Permendagri No 16 Tahun 2020, PP No 16 Tahun 2021, dan Permen PU No 25 Tahun 2008, dan Permen PU No 26 Tahun 2008
		2	Teori Segitiga Api
		3	Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung dan Kebutuhan Perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan
		1	Kompetensi Khusus: Sistem Pipa Tegak
			Sistem Sprinkler Otomatis
		3	Pompa Pemadam Kebakaran
		5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran
		6	Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap
		7	Pasangan Konstruksi Tahan Api
		9	Partisi Penghalang Asap Bahan Pelapis Interior
			Sarana Jalan Keluar
		11	Pencahayaan Darurat
10	Analis Kebencanaan Ahli Pertama	12	Teknik Dasar Penyuluhan Kemampuan Umum:
10	лнана перенсанаан AHII Рецаніа		Kemampuan Umum: Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
			Kemampuan Khusus:
			Kesiapsiagaan Bencana
			Mitigasi Bencana Peringatan Dini Bencana
			Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya
		5	Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat
			Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat Metode dan pengolahan data kaji cepat
			Penentuan status keadaan darurat bencana
		9	Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana
			Analisis penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat Analisis kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
			Rencana operasi penanganan darurat
		13	Pengendalian operasi/komando penanganan
			Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana Pemenuhan kebutuhan dasar
			Perlindungan terhadap kelompok rentan
		17	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
			Fasilitasi penanganan korban dan pengungsi bencana
			Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
			Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana
•	•		

Halaman 2 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan
			Optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan
11	Analia Kahiiakan Ahli Dartama	24	Pengurangan risiko bencana
11	Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	Kemampuan Analisis: Konsep dan Studi Kebijakan Publik
		2	Manajemen Kebijakan Publik
			Metodologi Riset Kebijakan
			Analisis Kebijakan Publik
		5	Dokumentasi Saran Kebijakan
			Kemampuan Politis:
		1	Publikasi Saran Kebijakan
			Komunikasi dan Konsultasi Kebijakan Pemetaan Stakeholder dan Advokasi Kebijakan Publik
12	Analis Kekayaan Intelektual Ahli	3	Kemampuan Umum:
	Pertama		Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
			Kemampuan Khusus:
			Prosedur permohonan kekayaan intelektual
		2	Penegakan hukum kekayaan intelektual
13	Analis Kerja Sama Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023 tentang JF Analis Kerja Sama Kemampuan Khusus:
			Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48
		1	Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
		2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
		4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
			dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
		5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
14	Analis Ketahanan Pangan Ahli	1	Ketersediaan pangan
	Pertama		Stabilisasi pasokan dan harga pangan
			Distribusi dan cadangan pangan
		_	Pengendalian kerawanan pangan
			Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)
			Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi
			Penganekaragaman konsumsi pangan
			Perumusan standar keamanan dan mutu pangan Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
15	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Ť	Kemampuan Umum:
	Ahli Pertama	1	Pengantar Akuntansi Pemerintah
		_	Pengantar Statistik
		3	Pengantar Ilmu Ekonomi
		<u> </u>	Kemampuan Khusus:
			Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
		_	Hukum Administrasi Keuangan Negara
16	Analis Legislatif Ahli Pertama	_	Kompetensi Umum:
	· ·	1	Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
			Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan
			Kompetensi Khusus:
			UU MD3
			Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
			Konsep dasar, teknik dan metode analisis
			Konsep analisis deskriptif
			Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung
		6	pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
L		7	Konsep dan teknik pemaparan hasil analisis
17	Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli	<u> </u>	Kemampuan Umum:
	Pertama		Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan Kemampuan Khucus:
		1	Kemampuan Khusus: Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
			Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
			Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
		4	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
		_	Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
40	A ! B . H !! B !!	6	Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
18	Analis Pasar Hasil Perikanan	<u> </u>	Kemampuan Umum:
	Terampil	-	Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus:
		1	Kemampuan Khusus: Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
			Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
			Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
		_	Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
		5	Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

Halaman 3 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
- 10		6	Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
19	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	_	Kompetensi Umum:
	renama	2	Kebijakan terkait Analis Pasar Hasil Pertanian Pengetahuan umum tentang pertanian dan ekonomi pertanian
			Akses informasi dan teknologi, akses kelembagaan keuangan, alat mesin pertanian, sarana produksi
			Pengetahuan tentang organisasi, kerjasama dan perdagangan Internasional
			Kompetensi Khusus:
			Ekonomi pertanian aspek produksi atau usahatani
	-		Ekonomi pertanian aspek pasar dan pemasaran Penyebarluasan informasi pasar
20	Analis Pasar Hasil Pertanian	3	Kompetensi Umum:
	Terampil	1	Kebijakan terkait Analis Pasar Hasil Pertanian
		2	Pengetahuan umum tentang pertanian dan ekonomi pertanian
			Kompetensi Khusus:
	-		Ekonomi pertanian aspek produksi atau usahatani
			Ekonomi pertanian aspek pasar dan pemasaran Metodologi analis pasar hasil pertanian
21	Analis Pemanfaatan Ilmu		Kompetensi Umum:
	Pengetahuan dan Teknologi Ahli	1	Perencanaan Iptek
	Pertama		Pemanfaatan Iptek
			Manajemen Kekayaan Intelektual
	 	4	Alih Teknologi Kompetensi Khusus:
		1	Intermediasi Iptek
	 	2	Difusi Iptek
		3	Komersialisasi Teknologi
22	Analis Pemantauan Peraturan		Kemampuan Umum:
	Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama	1	Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 (Lembaga Tinggi Negara), UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Umum, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan UU Mahkamah Konstitusi
		2	Kelembagaan DPR dan DPD
			UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang
		3	Manajemen PNS sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nom 17 Tahun 2020
			Kemampuan Khusus:
			UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU
		1	Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI,
			dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI
			Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan
		2	Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB
	•		Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
			UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
		3	sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020
			tentang Pembentukan Undang-Undang
23	Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
	Korupsi Ariii Fertama	2	Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
			Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	 		Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
			Kompetensi Khusus:
			Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		2	Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan
		3	Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatinan, Sertilikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
L		4	Fasilitasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
24	Analis Pembiayaan Infrastruktur		Kompetensi Umum:
	Pekerjaan Umum dan Perumahan	1	Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Penyelenggaraan KPBU
	Ahli Pertama	2	Kebijakan/Peraturan Perundangundangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan
			Kompetensi Khusus:
			Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
			Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
	 		Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		4	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
25	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	-	Kemampuan Umum:
	Allii i Gilailia		Keuangan Negara Perbendaharaan Negara
			Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
			Kemampuan Khusus:
			Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
			Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran
	 		Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
			Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
	·		, 00

Halaman 4 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		6	Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26	Analis Pengembangan Kompetensi	1	Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN
	ASN Ahli Pertama		Manajemen ASN
	•		Manajemen Kinerja Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
			Standar Kompetensi Jabatan ASN
			Pengembangan Kompetensi Non Klasikal
			ASN Corporate University (Corpu)
		8	Manajemen Talenta
			Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
		10	Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN
	Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
	Апіі Репата		Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan terkait UU dan PP
		1	Kompetensi Teknis: Wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia jasa ekosistem
		2	Wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia jasa bahan bioaktif dari biota perairan untuk pengembangan
			biofarmokologi
			Jenis air laut, faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi dan manfaat nya Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil
			Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
			Bangunan dan instalasi laut
		7	Pemahaman pariwisata secara umum
		8	Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan wisata bahari
28	Analis Perdagangan Ahli Pertama	1	Penyajian data dan informasi perdagangan serta penjelasan terkait data dan informasi perdagangan yang
		•	menjadi kewenangannya
		2	Analisis data dan informasi yang digunakan untuk pengelolaan ekspor dan impor meliputi perhitungan
		2	alokasi ekspo/impor, permasalahan teknis serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oengelolaan ekpor impor dan fasilitasi sarana perdagangan
		_	Analisis kelayakan terhadap usulan penerbitan dokumen perizinan/non perizinan bidang perdagangan
		3	sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis
			Pemantauan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan harga dan pasokan/stok barang
		4	kebutuhan pokok dan barang penting, dan analisis terkait jaringan distribusi, sarana perdagangan dan
			logistik serta verifikasi data harga dan stok/pasokan barang tertentu pokok dan barang penting
		5	Analisis bahan rencana pelaksanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen dan pembinaan pelaku usaha
			Analisis bahan terkait penyelenggaraan promosi perdagangan dan menyiapkan penyelenggaraan promosi
		6	perdagangan
29	Analis Perkara Peradilan	-	Kemampuan Umum:
		1	Pasal 24 UUD 1945, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
	 		UU 14/1985 tentang MA jo UU 3/2009 UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum), UU 7/1989 jo. 3/2006 (Peradilan Agama), UU 5/1986 jo. 9/2004
		3	jo. 51/2009, UU 30/2014 (Peradilan TUN), UU 31/1997 (Peradilan Militer)
	 		UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor), UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial), UU 31/2004 jo. UU
		4	45/2009 (Pengadilan Perikanan), UU 37/2004 (Pengadilan Niaga), UU 26/2000 (Pengadilan HAM), UU
			11/2012 (Pengadilan Anak), Pengadilan Pajak (UU 14/2002), Mahkamah Syar'iyah (UU 3/2006)
		5	Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
			Kemampuan Khusus: Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), Sistem Peradilan Pidana Anak
		1	(SPPA/UU 11/2012), Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
		2	Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
			KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata
			(khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU
		3	Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU
		J	KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak
			Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
			Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum
		4	acara pidana dan perdata
			Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
			Sistem pembuktian dalam perkara pidana
			Sistem pembuktian dalam perkara perdata
	 		Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa) Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
			Bantuan hukum (Posbakum)
			Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
			Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)
	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli		Kompetensi Umum:
	Pertama		Dasar-dasar perlindungan tanaman
		2	Pengantar Ilmu Pertanian Kemampuan Khusus:
		1	Ilmu Hama Tumbuhan
			Ilmu Penyakit Tumbuhan
			Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati
			Pengendalian Hama Terpadu

Halaman 5 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
31	Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Konsep kebun raya dan konservasi
			Pengembangan koleksi tumbuhan Pengembangan kawasan kebun raya
		4	Identifikasi tumbuhan
		•	Kompetensi Khusus:
		1	Lanskap kebun
		2	Penulisan ilmiah
			Database koleksi
			Pengolahan data
			Penyiapan sarana prasarana Perawatan koleksi
32	Analis Prasarana dan Sarana	0	Kemampuan Umum:
	Pertanian Ahli Pertama	1	Regulasi Bidang Irigasi Pertanian
		2	Regulasi terkait pendaftaran di bidang pestisida, pendaftaran pupuk, pengawasan pupuk dan pupuk
			bersubsidi
		3	Regulasi dan pengetahuan umum bidang asuransi pertanian dan penyaluran tanggung jawab sosial lingkungan
		4	Pengantar ilmu usahatani dan agribisnis
		5	Pengantar bisnis perbankan (konsep bisnis meliputi pengertian, aspek manajemen, fungsi dan lingkungan
		6	yang mempengaruhi iklim bisnis perbankan di Indonesia Pengantar ilmu tanah
			Makroekonomi
			Regulasi bidang koperasi, lembaga keuangan mikro, UMKM
		9	Pengetahuan tentang koperasi, lembaga keuangan mikro, otoritas jasa keuangan, UMKM, ekonomi mikro
		ਰ	dan pertanian
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengetahuan iklim (cuaca, fenomena, anomali, regulasi, perhitungan)
		2	Pengetahuan irigasi pertanian (P3A, jaringan irigasi, saluran, bendung/dam parit/embung, air tanah/permukaan)
		3	Perhitungan irigasi pertanian (volume, debit, luas layanan)
		4	Pengetahuan tentang organisme pengganggu tanaman, pengetahuan umum tentang pupuk dan pestisida, manfaat pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah bagi tanaman dan pupuk bersubsidi
			Perhitungan dan mekanisme klaim asuransi pertanian
			Dasar agronomi
			Regulasi bidang koperasi dan lembaga keuangan mikro Pengetahuan tentang lembaga keuangan mikro, PUAP, LKM-A dan UMKM
			Pengetahuan budidaya pertanian
			Pengetahuan dasar-dasar ilmu tanah
			Pengetahuan dasar-dasar pemetaan dan penginderaan jauh
		12	Pengetahuan sistem informasi geografis
33	Analis Standardisasi Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Pembinaan penerapan kebijakan standarisasi dan penilaian kesesuaian Pemantauan dan evaluasi bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan substansi teknis
		2	pada instansi/unit penempatan
			Kemampuan Khusus:
			Pengembangan standar Penerapan standar dan penilaian kesesuaian
			Penerapan standar dan penilaian kesesuaian Pengelolaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
34	Analis Sumber Daya Manusia	J	Kemampuan Umum:
1 -	Aparatur Ahli Pertama	1	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
			PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
			PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5	Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Kemampuan Khusus:
		1	Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur
			Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
		3	Pengadaan ASN
			Pangkat dan Jabatan ASN
			Pengembangan Karier ASN
			Pola Karier ASN Promosi ASN
			Promosi ASN Mutasi ASN
			Penugasan ASN
			Pengembangan Kompetensi ASN
		11	Penilaian Kinerja ASN
			Disiplin ASN
			Penghargaan ASN
			Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN Pemberhentian ASN
			Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
			Perlindungan ASN
			Cuti ASN
•			

Halaman 6 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Sistem Informasi ASN Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas
			Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi
			Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan
		22	efektivitas organisasi
35	Anatakar Ahli Bartama	23	Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
33	Apoteker Ahli Pertama	1	Kemampuan Umum: UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
			Kepmenkes No 13 tahun 2023 tentang Standar Profesi Apoteker
			Permenkes No 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
			Permenkes No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
		5	Kode Etik Apoteker Kemampuan Khusus:
		1	Penyusunan Rencana Praktik Kefarmasian
			Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP
			Pelayanan Farmasi Klinik Pelayanan Farmasi Khusus
			Penerapan Farmakoekonomi
36	Arsiparis Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan
			Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan
			Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
			Kemampuan Khusus:
			Konsep dan teori tentang arsip dinamis
			Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Konsep dasar penyusutan arsip
			Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan
			Konsep dan teori tentang arsip statis
			Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis
			Preservasi arsip statis
			Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis Standar Operasional Prosedur Kearsipan
		10	Penilaian kinerja Arsiparis
		11	Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
37	Arsiparis Terampil	1	Kemampuan Umum: Konsep dan teori tentang kearsipan
			Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan
			Kemampuan Khusus:
			Teori dasar pengelolaan arsip dinamis
	-		Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis Penciptaan arsip
		_	Pemberkasan arsip aktif
		5	Penataan arsip inaktif
			Teori dasar pengelolaan arsip statis
	<u> </u>		Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis Restorasi arsip
			Pameran arsip
		10	Teori dasar pembinaan kearsipan
			Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan
38	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli	12	Bimbingan teknis kearsipan Kemampuan Umum:
	Pertama	1	Tugas Pokok Jabfung AMMI
		2	Jenjang Jabfung AMMI
			Lembaga Infrastruktur Mutu
			Konsep Organisasi Pengetahuan tentang Standar
			Konsep dasar Sistem Manajemen
			Pengetahuan tentang Regulasi
			Wawasan Industri
			Pengetahuan tentang ISO Pengetahuan umum tentang konsep sistem industri manufaktur
		. 0	Kemampuan Khusus:
			Pengetahuan tentang Jabatan Fungsional AMMI
			Pengetahuan Produk dan Pengujian Pengetahuan Sertifikasi Produk
			Sistem Manjemen Mutu
		5	Pengetahuan tentang SNI
			Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Industri
			Pengetahuan Asesmen Sistem Manajemen Mutu Analisis Studi Kasus Sistem Manajemen Mutu
			·
			Pemahaman aspek-aspek yang mendukung kompetensi atribut dan personil Lembaga Sertifikasi produk
		10	Pengetahuan Dasar Proses Sertifikasi Produk, persyaratan dan skema lembaga sertifikasi produk
39	Asesor Sumber Daya Manusia		Kemampuan Umum:

Halaman 7 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
	Aparatur Ahli Pertama	1	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
			PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
			PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
			PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5	Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
	•	-	Kemampuan Khusus:
			Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Kompetensi
			Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Kompetensi Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Talenta
			Proses dan Pengelolaan Asesmen Kompettensi/Potensi ASN
			Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen
			Kerangka Kerja Pengembangan Strategik Asesmen
40	Asisten Apoteker Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Kekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mengemas, dan menyimpan dengan mengacu pada Cara Pembuatan Obat yang Baik, dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
		2	Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyusunan rencana praktik kefarmasian
		3	Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelayanan farmasi klinik Kemampuan Khusus:
		1	Kegiatan pelayanan farmasi klinik
			Penyampaian informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tepat, akurat, terkini dan relevan
		2	dengan kebutuhan penerima informasi dan mampu berkomunikasi secara efektif
			Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelayanan farmasi klinik
		4	Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai pedoman
		5	Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP
	Asisten Inspektur Mutu Hasil		Kemampuan Umum:
	Perikanan Terampil		Sistem manajemen keamanan pangan
			Sistem manajemen mutu pengujian
	•		Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
			Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
			Pengenalan bahan baku hasil perikanan
		Ū	Kemampuan Khusus:
		1	Sistem manajemen keamanan pangan
		2	Sistem manajemen mutu pengujian
			Penanganan kasus mutu hasil perikanan
			Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya
	·		Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap Pengoperasian alat industri pangan
			Ketertelusuran dan penarikan produk pangan
42	Asisten Konselor Adiksi Terampil		Kompetensi Umum:
		1	Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN
			Pengetahuan adiksi narkoba
		3	Pengetahuan komunikasi efektif
		_	Kompetensi Khusus:
		1	Penyiapan skrining Asistopai erioptosi lavanan rehabilitasi
	}		Asistensi orientasi layanan rehabilitasi Penyiapan asesmen
	1		Penyiapan asesmen Penyiapan rencana rawatan
			Asistensi konseling
	İ		Asistensi pendampingan
		7	Asistensi manajemen kasus
			Asistensi penanganan krisis
			Asistensi edukasi
	ŀ		Penyiapan rujukan Penyiapan konsultasi
43	Asisten Pelatih Olahraga Pemula	11	Kompetensi Umum:
			Pengetahuan tentang olahraga
	İ		Kompetensi Khusus:
			Faal dan fisiologi tubuh
			Identifikasi psikologis atlet
11	Asiston Polatib Olahraga Taramail	3	Ilmu kepelatihan olahraga
44	Asisten Pelatih Olahraga Terampil		Kompetensi Umum: Pengetahuan tentang olahraga
			Kompetensi Khusus:
		1	Faal dan fisiologi tubuh
	İ		Identifikasi psikologis atlet
			llmu kepelatihan olahraga
	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan		Kemampuan Umum:
	dan Perikanan Terampil		Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus:
	1	1	Remampuan Knusus: Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan
			Pengembangan usana dan diversilikasi usana kelautan dan perikanan Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
	<u>I</u>	-	, and the same of

Halaman 8 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		3	Memahami konsep dasar, teknik, metode, tatacara prosedur penerapan standar mutu dan keasaman hasil kelautan dan perikanan
			Memahami konsep dasar uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
46	Asisten Penata Anestesi Terampil	5	Memahami konsep dasar, pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan Kemampuan Umum:
"			Peraturan tentang etik legal dan keselamatan pasien
		2	Peraturan terkait pengembangan diri dan profesionalisme
			Peraturan terkait komunikasi efektif
		4	Peraturan terkait dengan Landasan ilmu biomedik, anestesiologi dan instrumentasi Kompetensi Khusus:
		1	Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi
		2	Peraturan terkait dengan Tatalaksanan Obat, Gas, Mesin dan Peralatan anestesi dalam asuhan
			kepenataan Pra, Intra, Pasca anestesi Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan anestesi pada Kegawatdaruratan dan bencana
47	Asisten Pengawas Perikanan Pemula	3	Kemampuan Umum:
"	J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J		Peraturan Kelautan dan Perikanan
			Kemampuan Khusus:
	,		Perencanaan Pengawasan Perikanan
	1		Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan
48	Asisten Pengawas Perikanan	U	Kemampuan Umum:
	Terampil		Peraturan Kelautan dan Perikanan
			Kemampuan Khusus:
	ł		Perencanaan Pengawasan Perikanan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
	ľ		Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan
	Asisten Pengelola Produksi	_	Kemampuan Umum:
	Perikanan Tangkap Pemula		Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
	}	1	Kemampuan Khusus: Pengenalan Jenis Ikan
			Pengenalah Jenis ikan Identifikasi jenis - jenis kapal penangkapan ikan
			Identifikasi awak kapal perikanan
		4	ldentifikasi jenis mesin dan alat penangkapan ikan
EO	Asisten Pengelola Produksi	5	Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil		Kemampuan Umum: Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
			Kemampuan Khusus:
			Kelompok Sumberdaya Ikan
			Identifikasi komponen kapal perikanan
	}		Identifikasi Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Identifikasi komponen mesin dan alat penangkapan ikan
	ľ		Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
	Asisten Penguji Perangkat	1	Dasar-dasar kelistrikan
	Telekomunikasi Terampil		Dasar-dasar elektronika
	ł	3	Dasar telekomunikasi Telekomunikasi seluler
	ľ	5	Optik
		6	Satelit
			Radar
	}		Antenna Rangkaian Digital
	ľ		Dasar-dasar komputer
	t		Jaringan komputer
			Perangkat lunak
	}		Medan elektromagnetik Gelombang radio
			Pengoperasian komputer
	İ		Literasi digital
		17	Statistika
			Optik Alet pengeleb perkenteren
52	Asisten Penguji Prasarana		Alat pengolah perkantoran Kemampuan Umum:
	Perkeretaapian Terampil		UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
			Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang
			Penyelenggaraan Perkeretaapian
	1		Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian Permenhub No 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga
			Penguji Sarana Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus:
			PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api
	}		PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun PM 44 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
			PM 45 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Persinyaian Perkeretaapian PM 45 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
			PM 50 Tahun 2018 tentang Standar Teknis I eratatan Ferkerapian
			Proses entri data

Halaman 9 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Pengecekan data persiapan alat uji
			Prosedur dan tata cara pengujian jalur dan bangunan perkeretaapian Prosedur dan tata cara pengujian fasilitas pengoperasian kereta api
53	Asisten Penguji Sarana	3	Kemampuan Umum:
	Perkeretaapian Terampil	1	Pengetahuan umum tentang Kebijakan tentang Perkeretaapian
		2	Pengetahuan umum terkait Dasar Perkeretaapian
		-	Kemampuan Khusus:
		2	Pengetahuan tentang Kereta Pengetahuan tentang Lokomotif
			Pengetahuan tentang Gerbong
		4	Pengetahuan tentang Peralatan Khusus
	A · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	Pengetahuan tentang Sarana Perkeretaapian
54	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	1	Kompetensi Umum: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
			Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
			Kompetensi Khusus:
			Kelembagaan DPR
			Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
55	Asisten Perpustakaan Terampil	3	Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif Kompetensi Umum:
33	7. Sisteri i Cipustandari i Ciampii	1	Pembudayaan kegemaran membaca
			Sejarah dunia kepustakawanan
			Kemampuan Khusus:
			Pengelolaan teknis bahan perpustakaan
56	Asisten Pranata Siaran Terampil	2	Pelayanan dasar perpustakaan Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
			Publik
		3	P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)
		4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		5	Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008
		6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan
			Informatika
		7	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Kemampuan Khusus:
		1	Definisi dan Konteks Komunikasi
			Prinsip Komunikasi
			Komunikasi Massa
			Fungsi Komunikasi Definisi, Produk, dan Prinsip Jurnalistik
		6	Digital
			Media Sosial
		8	Terestrial
		9	Profesi, Produksi, dan Program Siaran
			Penulisaan Naskah Siaran Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan
			Videografi, Fotografi, dan Animasi
			Tata Cara Pembuatan Berita
			Naskah
			Dasar-dasar Komunikasi
		_	Desain Grafis Konten
			Multimedia
			Pengetahuan Umum, UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik
			Pra Produksi dan Pasca Produksi
			Wawancara
57	Asisten Statistisi Terampil	22	P3SPS Kemampuan Umum:
3,	, total orangii		Statistik Dasar
			Kemampuan Khusus:
			Persiapan Kegiatan Statistik
			Pengumpulan Data
			Pengolahan Data Diseminasi Hasil Kegiatan Statistik
58	Asisten Teknisi Siaran Pemula	т	Kemampuan Umum:
			Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
			Kemampuan Khusus:
			Broadcasting Sistem Komputer
			Sistem Komputer Jaringan Dasar Komputer
			Multimedia
			Fisika Dasar

Halaman 10 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Dasar-Dasar Listrik
			Pertelevisian Transmisi
59	Asisten Teknisi Siaran Terampil	0	Kemampuan Umum:
	releten relation elacation relations.	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		4	Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika
			Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2 GHz
			Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz
		7	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
			Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Peranakat Telekomunikasi Video Conference
		a	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
			Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008
			Kemampuan Khusus:
			Perkembangan Media Massa
			Media Sosial Teknik Dasar Komputer
			Teknik Dasar Jaringan
			Sistem Komputer
		6	Multimedia
			Teori Dasar Pemancar
			Teknik Audio Studio
			Teknik Audio Siaran Luar Teknik Penyuntingan Audio
			Teknik Dasar-Dasar Kamera
			Teknik Videografi
			Desain Grafis
			Teknik Pencahayaan
			Produksi Siaran Tata Artistik
			Dasar-Dasar Fotografi
			Teknik Elektronika
			Teknik Listrik
		20	Frekuensi
60	Auditor Ahli Pertama	_	Kemampuan Umum:
			Standar Audit Kode Etik dan Pedoman Perilaku
			Kemampuan Khusus:
			Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting
			Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program
			Governance, Risk, and Control
			Risiko Fraud Proses Bisnis dan Risiko
			Penerapan Metodologi Pengawasan
			Buku Audit dan KKA
		8	Perubahan metodologi pengawasan audit intern
61	Auditor Manajemen Aparatur Sipil	_	Kemampuan Umum:
	Negara Ahli Pertama		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
		4	Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
			Kerja Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
			Kemampuan Khusus:
			Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN Paranganan Panganyanan dan Pangandalian NSRK Manajeman ASN
			Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
			Laporan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
		5	Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
62	Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama		Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN Kemampuan Umum:
		4	Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan prasarana di
		1	bidang perkeretaapian

Halaman 11 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NAMA JABATAN	aan lalu lintas dan aan SDM di bidang di bidang eretaapian serta eretaapian serta eretaapian serta Potensi pian)
Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Auditor Terampil Bidan Ahli Pertaua	aan SDM di bidang di bidang eretaapian serta eretaapian serta eretaapian serta eretaapian serta eretaapian serta eretaapian serta
Sepikara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan deperkeretaapian	di bidang eretaapian serta eretaapian serta eretaapian serta eretaapian serta Potensi pian)
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perker dasar-dasar audit Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perker dasar-dasar audit Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perker dasar-dasar audit Remampuan Khusus: Perencanaan Audit (Bahan perencanaan audit, Rencana kerja audit, Potensi bahaya, permasalahan, Program audit) Perencanaan Audit (Cembar kerja audit, Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaan Pelaporan Audit (Penilaian hasil audit) Dasar-Dasar Audit (Penilaian hasil audit) Dasar-Dasar Audit (Penilaian hasil audit) Pemantauan dan tindak lanjut laporan audit) Remampuan Umum: Standar Audit Peran lumm: Standar Audit Peran lumm: Standar Audit Peran lumm: Standar Audit Peran lumm: Peran lumman Rhusus: Pelaporan Resentatan pasien Peran Resentan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana Rhusus: Pelaporan Resentatan Pasien Peran Resentan Reproduksi Perempuan Dalam Pelapa Resentanan Rasentanan	retaapian serta retaapian serta retaapian serta Potensi pian)
dasar-dasar audit	retaapian serta retaapian serta Potensi pian)
dasar-dasar audit Renardasar audit Renardasar audit Renampuan Khusus: Peranta nerundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perket dasar-dasar audit Kemampuan Khusus: Perencanaan Audit (Bahan perencanaan audit, Rencana kerja audit, Potensi bahaya, permasalahan, Program audit) 2 Pelaksanaan Audit (Lembar kerja audit, Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaar 3 Pelaporan Audit (Penilaian hasil audit) 4 Dasar-Dasar Audit (Penilaian hasil audit) 4 Dasar-Dasar Audit (Penilaian hasil audit) 4 Laporan audit) 4 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 5 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 5 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 6 Laporan audit) 6 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 6 Laporan audit) 7 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 7 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 8 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 8 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 8 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 8 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 8 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 8 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 8 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasil audit) 9 Laporan Audit (Penilaian hasi	retaapian serta Potensi pian)
Auditor Terampil German Fernand Fernan	Potensi pian)
Perencanaan Audit (Bahan perencanaan audit, Rencana kerja audit, Potensi bahaya, permasalahan, Program audit)	pian)
2 Pelaksanaan Audit (Lembar kerja audit, Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaar 3 Pelaporan Audit (Penilaian hasil audit) 4 Dasar-Dasar Audit (Penyiapan bahan pelaporan audit, Pemantauan dan tindak lanjut laporan audit) 4 Emampuan Umum: 1 Standar Audit 2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku 6 Kemampuan Khusus: 1 Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting 2 Risk Based - Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program 3 Governance, Risk, and Control 4 Risiko Fraud 5 Identifikasi proses bisnis dan risikonya 6 Implementasi proses bisnis dan risikonya 7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA 6 Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan 6 Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Keberampian Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Reterampilan Umum: 2 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya 6 Keterampian Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan 6 Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan 1 Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan 1 Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	,
4 Dasar-Dasar Audit (Penyiapan bahan pelaporan audit, Pemantauan dan tindak lanjut laporan audit) Kemampuan Umum: 1 Standar Audit 2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Kemampuan Khusus: 1 Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting 2 Risk Based - Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program 3 Governance, Risk, and Control 4 Risiko Fraud 5 Identifikasi proses bisnis dan risikonya 6 Implementasi proses bisnis dan risikonya 7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commu 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar Praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Bopi	audit, Diseminasi
Kemampuan Umum: 1	
2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Kemampuan Khusus: 1 Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting 2 Risk Based - Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program 3 Governance, Risk, and Control 4 Risiko Fraud 5 Identifikasi proses bisnis dan risikonya 6 Implementasi proses bisnis dan risikonya 7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Bu 2 Pelayanan Kesehatan Pasien 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Keterampilan Umum: 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Bosien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Pelayanan Kesehatan Disu	
Kemampuan Khusus: 1 Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting 2 Risk Based - Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program 3 Governance, Risk, and Control 4 Risiko Fraud 5 Identifikasi proses bisnis dan risikonya 6 Implementasi proses bisnis dan risikonya 7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commu 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commu 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
2 Risk Based - Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program 3 Governance, Risk, and Control 4 Risiko Fraud 5 Identifikasi proses bisnis dan risikonya 6 Implementasi proses bisnis dan risikonya 7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commu 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
3 Governance, Risk, and Control 4 Risiko Fraud 5 Identifikasi proses bisnis dan risikonya 6 Implementasi proses bisnis dan risikonya 7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA 64 Bidan Ahli Pertama 6 Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan 6 Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communication of the Communication o	
4 Risiko Fraud 5 Identifikasi proses bisnis dan risikonya 6 Implementasi proses bisnis dan risikonya 7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commulson Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
6 Implementasi proses bisnis dan risikonya 7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commu 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communisterampilan Umum: 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
8 Metodologi pengawasan 9 Bukti audit dan KKA Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Anak 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communisterampunistera	
9 Bukti audit dan KKA 64 Bidan Ahli Pertama Etik legal dan keselamatan pasien	
1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communis Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelayanan Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commui 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu 2 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commui 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
2 Pelayanan Kesehatan Anak 3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commui 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commui 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commui 5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya 65 Bidan Terampil Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaya 65 Bidan Terampil Keterampilan Umum: 1 Etik legal dan keselamatan pasien 2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	ınicator)
Etik legal dan keselamatan pasien Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: Pelayanan Kesehatan Ibu	
Asuhan dasar praktik klinik kebidanan Kemampuan Khusus: Pelayanan Kesehatan Ibu	
Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
1 Pelayanan Kesehatan Ibu	
L 2 IRolayanan Kocobatan Anak	
3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana 4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Commu	inicator)
5 Pengelolaan Pelayanan Kebidanan	
66 Co-Pilot Kemampuan Umum:	
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Peraturan pemerintah No. 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang penerbang	gan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang 3 Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakar	CASR Part 139)
4 ICAO Annexes	
5 Keudaraan	
Kemampuan Khusus: PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (C	Civil Aviation Safety
Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan	
Bandar Udara Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 Tenta	
3 Kebandarudaraan di Bandar Udara	ang Pelayanan Jasa
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Kesela 4 Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telek Penerbangan	
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Stat 5 Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Stand Volume I Bandar Udara (Aerodrome)	amatan Penerbangan komunikasi

Halaman 12 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara
		7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional
		9	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan
		10	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional
		11	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
		12	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
		13	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara
		14	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 038 Tahun 2017 Tentang Apron Management Service
		15	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 145 Amandemen tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara
		16	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)
		17	Advisory Circular 171 – 05 Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan
			Civil Aviation Safety Regulation Part 61 Licensing of Pilots and Flight Instructors Civil Aviation Safety Regulation Part 91 General Operating and Flight Rules
		20	Civil Aviation Safety Regulation Part 135 Certification and Operating Requirement: For Commuter and Charter Certificate Holders
		21	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
67	Desainer Buku	-	Kompetensi Umum:
			Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan Penerapan proses pemerolehan naskah buku
			Bentuk, jenis, dan isi buku Aspek legalitas dan etika penerbita buku
		5	Penerapan standar mutu buku
	-	6 7	Ekosisten dan pelaku perbukuan Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
			Bagian-bagian buku
	-	9	Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku Kompetensi Khusus:
		1	Prinsip dalam mendesain buku
	-		Objektif dalam mendesain
			Penggunaan Perangkat Lunak Desain Penggunaan tiprografi
			Penggunaan warna
			Proses Produksi Regulasi perbukuan
		8	Aset Audio visual
68	Diplomat Ahli Pertama	9	Buku elektronik Kemampuan Umum:
00	Diplomat Anni i Gitama	1	Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
	-	2	Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri Negosiasi
		1	Kemampuan Khusus:
			Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia Penanganan dan Kerja Sama Multilateral
		3	Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN
			Diseminasi Informasi Kebijakan Politik Luar Negeri Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri
		6	Pelayanan Kekonsuleran
			Pelayanan Keprotokolan
			Penanganan dan Pengelolaan Media Penguasaan Substansi dan Kawasan/Negara
		10	Pelayanan Fasilitas Diplomatik
			Pembuatan Perjanjian Internasional Diplomasi Publik
			Diplomasi Publik Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri
			Layanan Keamanan Diplomatik

Halaman 13 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		15	Manajemen Kelembagaan Diplomasi
69	Dokter Ahli Muda	1	Kompetensi Umum: Penjabaran Pancasila
			Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
			UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan OBL
			Permenkes Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
			Kompetensi Khusus:
			Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003
		2	Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan
		3	Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di
			Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
			UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
	-		Permenkes Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Permenkes Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis,
		6	dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak
		7	Permenkes Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC
			Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
70	Dokter Ahli Pertama	9	Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAHASIA KEDOKTERAN
70	Dokter Anii Pertama		Kompetensi Umum: Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
			Kompetensi Khusus:
		1	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M.PAN/11/2003
		2	Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
71	Dokter Gigi Ahli Pertama	_	Kemampuan Umum:
			Undang- Undang Kesehatan, dan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Kesehatan Nasional Subtainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan
			Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012
			Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023. Hukum dan Etika Profesi
			Permenkes Nomor 43 tahun 2019
			Standar profesi kedokteran gigi sesuai peraturan pemerintah no 2 tahun 2018
	-	7 8	GERMAS Peraturan perundangan tentang pencegahan narkoba
			Sistem kesehatan nasional dan 7 sub sistem kesehatan nasional
			Kemampuan Khusus:
			Penyembuhan Penyakit Gigi dan Mulut
			Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut
			Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023
			Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat
72	Dokter Hewan Karantina Ahli		Kompetensi Umum:
	Pertama		Advokasi Kebijakan Bidang Karantima Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
	 	1	Kemampuan Khusus: Analisis Risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani
			Identifikasi HPHK dan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
			Pengawasan Keamanan Hayati Hewani
			Pengembangan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewani
70	Doktor Bondidik Klinia Abli Muda	5	Tindakan karantina hewan
73	Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda		Kompetensi Umum: Pelaksanaan pelayanan spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran
		1	spesialistik untuk kepentingan hukum
			Penyelenggaraan, pembimbingan, penyusunan peta jalan, atau pelaksanaan pelayanan subspesialistik
		2	yang holistik dan komprehensif dalam pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan
		3	komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum Evaluasi metode, bahan ajar Pendidikan kedokteran
			Evaluasi metode, banan ajar Pendidikan kedokteran Perencanaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		5	Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		6	Pelayanan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		7	Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam lingkup institusional/nasional/internasional
		8	Penyusunan dan evaluasi kebijakan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam lingkup institusional/nasional/internasional
		9	Pengembangan konsep, teori terkait pemecahan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam lingkup
			institusional/nasional/internasional Kompetensi Khusus:
		1	Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum
	[2	Pelaksanaan pelayanan spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran
		-	spesialistik untuk kepentingan hukum

Halaman 14 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		3	Penyelenggaraan, pembimbingan, penyusunan peta jalan, atau pelaksanaan pelayanan subspesialistik yang holistik dan komprehensif dalam pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum
		4	Evaluasi dan penyusunan perangkat norma standar prosedur instrument penatalaksanaan klinis holistik dan komprehensif dalam pelayanan spesialistik/sub spesialistik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialistik untuk kepentingan hukum
		5	Perencanaan terkait pendidikan kedokteran
			Pelaksanaan pendidikan kedokteran
			Analisis kelayakan pelaksanaan pendidikan kedokteran Evaluasi metode, bahan ajar Pendidikan kedokteran
			Pengembangan metode, bahan ajar terkait pendidikan kedokteran
		10	Konsep, teknik, metode dan etika dalam penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/internasional
			Perencanaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional Pengelolaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
			Evaluasi hasil penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
74	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	1	Kemampuan Umum: Tata cara pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama
			Tata cara dan prosedur tindakan resusitasi
		3	Macam-macam pemeriksaan penunjang
		5	Tata cara pemberian informasi kepada publik terkait kasus kedokteran Tata kelola dan penanganan wabah/KLB
		6	Tata cara pemberian KIE
		7	Kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan
		8	Pemberian informed consent ke pasien Kemampuan Khusus:
		1	Tata kelola pelayanan medis spesialistik dengan pembimbingan dokter peserta pendidikan
			Satuan unit kerja pelayanan kesehatan
			Langkah dan tata cara tindakan medis spesialistik dengan pembimbingan peserta pendidikan
			Pemeriksaan luar dengan pembimbingan peserta pendidikan Pemeriksaan dalam dengan pembimbingan peserta pendidikan
			Penanggulangan bencana dengan pembimbingan peserta pendidikan
		7	Diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor
			Diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor Tata cara penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dengan pembimbingan
		9	peserta pendidikan dokter Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing
		11	Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping
			Tata cara sebagai penguji pada ujian akhir sebagai anggota Program kuliah dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota
			Tugas jaga melalui panggilan dan di tempat
75	Dokumentalis Hukum	15	Tata cara saksi ahli pada kasus kedokteran
75	Dokumentans mukum	1	Kemampuan Umum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
			Pengetahuan umum teknologi dan informasi
			Kemampuan Khusus:
			Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
		3	Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Konsep dasar, teknik, metode, pedoman dan prosedur dalam pengelolaan informasi hukum
			Penyiapan data dan bahan yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
	D 4 1 4 41 11	5	Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum
76	Dosen Asisten Ahli		Kompetensi Khusus: Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Etika, Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)
			Kompetensi Umum:
		1	Penalaran dan Pemecahan Masalah (Analytical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking, dan Strategic Thinking)
		2	Dimensi Psikologi (Integritas Akademik, Keterampilan Interpersonal, Motivasi Berprestasi, Belajar Berkelanjutan, Kemampuan Sosial, dan Perilaku Kolaboratif)
77	Decem Lalitar	3	Bahasa Inggris meliputi teks artikel ilmiah, teks argumentatif, teks pengumuman, dan teks berita
77	Dosen Lektor		Kompetensi Khusus: Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Etika, Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)
			Kompetensi Umum:
		1	Penalaran dan Pemecahan Masalah (Analytical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking, dan Strategic Thinking)
		2	Dimensi Psikologi (Integritas Akademik, Keterampilan Interpersonal, Motivasi Berprestasi, Belajar Berkelanjutan, Kemampuan Sosial, dan Perilaku Kolaboratif)
		3	Bahasa Inggris meliputi teks artikel ilmiah, teks argumentatif, teks pengumuman, dan teks berita

Halaman 15 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
78	Editor Buku	4	Kompetensi Umum:
			Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan Penerapan proses pemerolehan naskah buku
			Bentuk, jenis, dan isi buku
			Aspek legalitas dan etika penerbita buku
			Penerapan standar mutu buku
		6 7	Ekosisten dan pelaku perbukuan Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
			Bagian-bagian buku
			Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
			Kompetensi Khusus:
			Prinsip-prinsip penyuntingan
			Kode etik penyunting Kriteria kelayakan naskah
			Tahapan penyuntingan dengan benar
			Aspek penyuntingan mekanis
			Aspek penyuntingan substantif Pengutipan atau perizinan dengan benar
			Penyuntingan visual
79	Edukator		Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksangan Undang Undang Namor 5
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		7	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
80	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	_	Kemampuan Umum:
		2	UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN Permenkes No.2 Tahun 2023 Pelaksanaan (Bab VI)
			Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
			Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah
			Kemampuan Khusus:
			Surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit Investigasi vektor dan binatang pembawa penyakit
			Intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit
		4	Uji Resistensi/Efikasi vektor dan/atau bindatang pembawa penyakit
0.1		5	Perumusan kebijakan di bidang vektor dan binatang pembawa penyakit
81	Entomolog Kesehatan Terampil	1	Kemampuan Umum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
			Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
		3	Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
		Ü	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
		1	Kemampuan Khusus: Surveilans vektor dan/atau BPP
		2	Investigasi vektor dan/atau BPP
			Intervensi vektor
82	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	_	Kemampuan Umum:
			Komunikasi Efektif Komunikasi Interpersonal
			Advokasi
			Pengorganisasian kegiatan epidemiologi
		_	Kemampuan Khusus:
			Manajerial Epidemiologi Surveilans Epidemiologi
			Manajemen Data Epidemiologi
		4	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB/wabah
		5	Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan
			Kajian Epidemiologi Kewaspadaan Dini KLB
83	Epidemiolog Kesehatan Terampil	•	Kemampuan Umum:
	•		Komunikasi Efektif
			Team Work
			Organisasi Etika kerja
			Perundang-undangan
			Kemampuan Khusus:
			Surveilans Epidemiologi
			Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
			Manajemen Data

Halaman 16 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

84 Fasilitator Bahasa Isyarat 85 Fasilitator Bela Negara	1 2	MATERI POKOK Kompetensi Umum: Kebijakan dan advokasi layanan kesejahteraan sosial Implementasi kebijakan dan advokasi layanan kesejahteraan sosial Kompetensi Khusus:
85 Fasilitator Bela Negara	1 2	Implementasi kebijakan dan advokasi layanan kesejahteraan sosial Kompetensi Khusus:
85 Fasilitator Bela Negara	1 2	Kompetensi Khusus:
85 Fasilitator Bela Negara	2	
85 Fasilitator Bela Negara	2	
85 Fasilitator Bela Negara		Penyusunan dan perencanaan kerja layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
85 Fasilitator Bela Negara	3	Analisis kelayakan program layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
85 Fasilitator Bela Negara		Pendampingan penerima layanan/kelompok sasaran layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
85 Fasilitator Bela Negara		Penyusunan laporan hasil kerja pelaksanaan layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
		Pengetahuan Dasar Bela Negara
		Kesadaran Bela Negara Bela Negara dalam Pembangunan Nasional
		Konsepsi Bela Negara
86 Fasilitator Pemerintahan		Kemampuan Umum:
oo i demater i omermanari	1	Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
		Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
		Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
		Kemampuan Khusus:
	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
		Pemerintahan Daerah
		Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
87 Fasilitator Penerapan Standar		Kemampuan Umum:
Penilaian Kesesuaian		Penyusunan kebijakan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
	2	Pembinaan penerapan kebijakan standarisasi dan penilaian kesesuaian
	<u> </u>	Kemampuan Khusus:
		Pemberdayaan stakeholder penerapan standar dan penilaian kesesuaian
88 Fasilitator Rehabilitasi	2	Pendampingan (coaching) penerapan SNI Kemampuan Umum:
00 Fasilitator Heriabilitasi	1	Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN
		Naskah kebijakan
		Perencanaan
		Komunikasi Efektif
		Advokasi
		Pengetahuan dasar adiksi
		Kemampuan Khusus:
	1	Persiapan peningkatan kemampuan penyelenggara rehabilitasi
	2	Pelaksanaan peningkatan kemampuan penyelenggara rehabilitasi
		Evaluasi peningkatan kemampuan penyelenggara rehabilitasi
		Rehabilitasi berkelanjutan
		Skrining
		Asesmen
		Rencana terapi
		Intervensi psikososial Konseling
		Rujukan
		Rehabilitasi
		Instrumen identifikasi
		Pengumpulan data
		Monitoring
		Evaluasi
89 Fisikawan Medis Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
	1	Manajemen Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
		Jaminan Kualitas Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
		Proteksi dan Keselamatan Radiasi
	4	Pelayanan Dosimetri
		Kemampuan Khusus:
		Jaminan Kualitas Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
		Proteksi dan Keselamatan Radiasi
		Pelayanan Dosimetri
		Audit Dosis Radiasi Manajaman Paralatan Sumbar Radiasi dan Alat Ukur
90 Fisioterapis Ahli Pertama	5	Manajemen Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur Kemampuan Umum:
Journal of the second of the s	1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapis Indonesia Nomor : 0314/KEP/PP-IFI/I/2023
		PMK NOMOR 80 TAHUN 2013 Tentag Penyenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
		PMK NOMOR 65 TAHUN 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
		Kemampuan Khusus:
	1	Standar kompetensi Fisioterapi Indonesia
		Identifikasi problematika Fisioterapi
	3	Tindakan Fisioterapi
		Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
		Penyusunan laporan kemajuan intervensi
		Penyusunan laporan penghentian/kelanjutan terapi
	7	Penyusunan laporan dan dokumentasi diagnosis Fisioterapi berdasarkan ICF

Halaman 17 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
91	Fisioterapis Terampil	1	Kemampuan Umum:
			Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
			Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapis Indonesia Nomor : 0314/KEP/PP-IFI/I/2023
			PMK NOMOR 80 TAHUN 2013 Tentang Penyenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
		5	PMK NOMOR 65 TAHUN 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
	}	1	Kemampuan Khusus: Standar kompetensi Fisioterapi Indonesia
			Identifikasi problematika Fisioterapi
			Tindakan Fisioterapi
			Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
			Penyusunan laporan kemajuan intervensi
			Penyusunan laporan penghentian/kelanjutan terapi
92	Guru Ahli Pertama		Penyusunan laporan dan dokumentasi diagnosis Fisioterapi berdasarkan ICF Konsep suatu disiplin ilmu yang relevan
02	Gara 7 mm i Grama		Materi suatu disiplin ilmu yang relevan
			Hirarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu
			Prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan
			Keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain
	}		Konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin Teori belajar Ausubel
	l i		Teori belajar Gagne
			Teori belajar Piaget
			Karakteristik murid berkebutuhan khusus
			Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap
			Teori belajar Gagne: Taksonomi Bloom dan perkembangannya
			Profil Pelajar Indonesia Teori Belajar Gagne
			Learning Objective
			Individualized Education Program (IEP) dan Prinsip-prinsip differentiated learning
			Teori dasar komunikasi
			Active listening
			Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar Konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan
			Mengembangkan motivasi siswa
			Behavior modification & habit formation
			Prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku
			Desain pembelajaran
	}		Facilitating learning Berfikir kritis
			Berbagai teknik asesmen di tingkat kelas (classroom-based assessment) sesuai dengan tujuan
		27	pembelajaran
			Konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning
			Pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran (feedback) Program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen
			Refleksi
			Procedural & declarative knowledge
		33	Working memory & long-term memory
			Kode etik guru
			Interaksi guru-murid School safety
			Diversity
			Pengertian dan pengembangan potensi
			Perencanaan karir dan pengembangan potensi diri
93	Ilustrator Buku	_	Kompetensi Umum:
			Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan Penerapan proses pemerolehan naskah buku
			Bentuk, jenis, dan isi buku
			Aspek legalitas dan etika penerbita buku
			Penerapan standar mutu buku
			Ekosisten dan pelaku perbukuan
			Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku Bagian-bagian buku
			Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
			Kompetensi Khusus:
			Brief proyek ilustrasi
			Riset dalam penciptaan ilustrasi
			Dasar penciptaan ilustrasi Evaluasi fungsi ilustrasi
			Media ilustrasi manual dan digital
			Proses pengerjaan ilustrasi
		7	Teori perspektif
			Prinsip penciptaan karakter
			Cara merancang latar setting Etika dalam penciptaan ilustrasi
		ıU	Luna varam pendiplaan nustrasi

Halaman 18 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
94	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli		Kompetensi Umum:
	Pertama		Pengetahuan terkait regulasi ketenagalistrikan
			Pengetahuan terkait keselamatan ketenagalistrikan
			Pengetahuan terkait tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan
		4	Pengetahuan terkait isu terkini ketenagalistrikan
		_	Kompetensi Khusus:
			Inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik
			Inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik Inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik
			Inspeksi instalasi distribusi terlaga listrik Inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik
			Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha penyediaan tenaga listrik
		6	Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
95	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli		Kompetensi Umum:
	Pertama		Regulasi terkait kegiatan usaha minyak dan gas
		2	PermenpanRB nomor 21 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di bidang energi dan sumber daya
			mineral
			Isu strategis terkait industri migas
			Kompetensi Khusus:
			Teknik Eksplorasi/pengeboran Teknik Produksi
		_	Pengetahuan geologi dan geofisika
			Teknologi Informasi
			Tekning minimasi Teknik Fasilitas Produksi Permukaan
			Pemantauan dan evaluasi
			Keamanan dan keselamatan kerja dan lingkungan
			Inventarisasi dampak lingkungan
			Pemantauan lingkungan
		10	Manajemen risiko
		11	Manajemen proyek
96	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli		Kemampuan Umum:
	Pertama		Sistem manajemen keamanan pangan
			Sistem manajemen mutu pengujian
			Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
			Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya
			Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		6	Kimia Pangan
		1	Kemampuan Khusus: Sistem manajemen keamanan pangan
			Sistem manajemen mutu pengujian
			Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
			Penanganan kasus mutu hasil perikanan
		_	Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya
			Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		7	Bioteknologi hasil perikanan
97	Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
			Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		2	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
		_	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
		3	Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
		-	Kehutanan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nemer 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetanan
		4	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
		-	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas
		5	Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
		_	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan
		6	Survei Pendahuluan Dan Penugasan Survei Pendahuluan Dan Eksplorasi Panas Bumi
			D + M + 'F ' O D M'
		7	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah
			Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi
			Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang
		8	Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis
		<u> </u>	Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
		_	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 /PMK.08/2022 Tentang Dukungan
		9	Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
		-	Kompetensi Khusus:
		1	Prinsip Dasar Geologi dalam Eksplorasi Panas Bumi
			Struktur Geologi yang Berperan dan Teknologi Inderaja serta Sistem Informasi Geografis
			Aplikasi berbagai metode geofisika untuk eksplorasi panas bumi, distribusi dan sebaran sistem panas
		3	bumi, karakteristik geofisika sistem panas bumi
		<u> </u>	Prinsip-prinsip dasar geokimia dalam eksplorasi panas bumi, cara estimasi temperatur, karakter reservoir,
		4	jenis manifestasi dan fluida panas bumi
		5	Teknologi rekayasa eksploitasi panas bumi

Halaman 19 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		6	Konsep sistem panas bumi
		7	Teknologi pemanfaatan panas bumi secara langsung maupun tidak langsung, sistem pembangkit listrik panas bumi, optimalisasi produksi panas bumi, dan infrastruktur pendukung panas bumi
98	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	1	Kemampuan Umum: UU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
	7 till i Citama		Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang
		2	Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Permenpan RB No 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian
	-	1	Kemampuan Khusus: PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api
			PM 29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api
		3	PM 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan
			Bangunan Lain
			PM Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian PM Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
		_	PM Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
		7	Perencanaan pengawasan, rencana kerja, lembar kerja dan identifikasi potensi bahaya pengawasan prasarana
		8	Penyusunan studi kelayakan, basic engineering design, detail engineering design, Factory acceptence test, Site Installation Test dan Commisioning test
		9	Rencana operasi, perawatan prasarana perkeretaapian dan rencana pengusahaan prasarana perkeretaapian
99	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli		Kemampuan Umum:
	Pertama		Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007
			Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
	-		Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2011 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 94 Tahun 2010
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 153 Tahun 2016
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 175 Tahun 2015
	-		Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41, 43, 44 Tahun 2010 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 54 Tahun 2016
			Tupoksi Petugas Inspektur Sarana Perkeretaapian
			Kemampuan Khusus:
			Persiapan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		2	Pengawasan pengadaan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
			Pengawasan pengoperasian kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
			Pengawasan perawatan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian Pengawasan pemeriksaan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
			Pengusahaan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		7	Pengembangan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
100	Inspektur Tambang Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
	•		UU Nomor 3 Tahun 2020 & UU Nomor 4 Tahun 2009 PP Nomor 96 Tahun 2021
			PP Nomor 25 Tahun 2023
			Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
			Kepmen ESDM No. 77.K-MB.01-MEM.B-2022
		Ö	Kepmen ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
		7	REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017
			Kompetensi Khusus:
			Prinsip Dasar Geologi Mineralegi dan Patrologi
			Mineralogi dan Petrologi Teknik Eksplorasi Geologi
			Potensi Sumberdaya Geologi Indonesia
		5	Estimasi Sumber Daya dan Cadangan
			Pengeboran
			Pengeboran kering (tanpa fluida) dan dengan fluida Alat Gali, Muat dan Angkut
			Pengolahan Bahan Galian
			Mesin diesel dan Otto
			Kelistrikan
			Generator Motor listrik
			Metode dan sistem tambang terbuka
			Metode dan sistem tambang bawah tanah
			Geoteknik Tambang Terbuka
			Geoteknik Tambang Bawah Tanah Hidrologi
			Hidrogeologi
	1		Survei
	ļ		Perencanaan tambang

Halaman 20 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Produksi tambang
			Teknologi proses metalurgi Analisis proses metalurgi
			Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Th 2009 dan PP No. 22 Tahun
		25	2021
		26	Pengelolaan dan pemantauan kualitas air dan air limbah berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001
		27	Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 kegiatan pertambangan berdasarkan PP No 101 Tahun 2014 dan PP No. 74 Tahun 2001
		28	Audit Lingkungan Hidup berdasarkan PermenLH No. 3 tahun 2013
		29	Pemantauan kualitas udara kegiatan pertambangan berdasarkan PermenLH No. 4 Tahun 2014 dan PP
		23	No 41 Tahun 1999
			Pengelolaan sampah dan limbah padat kegiatan pertambangan berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan
			Izin Lingkungan berdasarkan PermenLHK No 4 Tahun 2021
			Permen ESDM No 1827 Tentang Pertambangan yang baik Job Safty Analysis (JSA)
			Sistem manajemen Keselamatan Pertambanggan (SMKP)
101	Instruktur Ahli Pertama		Kemampuan Khusus:
			Identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas
			Rencana Pelaksanaan Pelatihan E-learning
			Media Pembelajaran
		5	Perangkat Penilaian
			Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan
			Pelatihan Tatap Muka Pemeliharaan Peralatan Pelatihan
			Bimbingan Konsultansi
		10	Pendampingan Pelatihan Kerja
			Perangkat Evaluasi Hasil Pembelajaran
			Evaluasi Hasil Pembelajaran Identifikasi Pengetahuan K3 Umum
			Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
			Kemampuan Umum:
			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
			Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
102	Investigator Keselamatan Pelayaran		Kemampuan Umum:
			Matematika terapan
			Fisika terapan Informasi dan Teknologi
			Kesehatan dan keselamatan Kerja
		5	Bahasa inggris maritim & SMCP
		6	Kepemimpinan
		1	Kemampuan Khusus: Prosedur darurat
			Marine Pollution
			Peraturan Pencegahan tubrukan dilaut dan Dinas Jaga
			Konstruksi dan stabilitas kapal
			Penanganan dan pengaturan muatan Hukum maritim
			Global Maritime Distress Safety System
103	Jaksa Ahli Pertama		Kemampuan Khusus:
			Asas-Asas Hukum Pidana
			Hukum Pidana Hukum Acara Pidana
			Hukum Pidana Khusus
			Hukum Pidana Internasional
			Kemahiran Litigasi
			Hukum Perjanjian Internasional Hukum dan HAM
			Hukum Perdata
		_	Hukum Waris Perdata
			Hukum Perjanjian
			Hukum Acara Perdata Hukum Acara Tata Usaha Negara
			Hukum Acara Tata Usana Negara Hukum Tata Negara
			Hukum Adat

Halaman 21 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

16 Ilmu Negara 17 Pengantar Ilmu Hukum 18 Hukum Hak Kekayaan Intelektual 19 Hukum Ketenagakerjaan 20 Hukum Ortonomi Daerah dan Desa 21 Hukum Perusahaan 22 Hukum Perusahaan 22 Hukum Perusahaan 23 Hukum Internasional 24 Hukum Marais 25 Hukum Laut Internasional 26 Hukum Bisnis 27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Fiisafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Data Gerak dan Pengendallan Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 6 Undang undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 9 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendallan Kapal 10 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendallan Kapal 10 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendallan Kapal 10 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendallan Kapal 10 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendallan Kapal 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Glambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Agabar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Berbengkelan 13 Dasar Sasar Akangamen Angkutan Laut 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Bisinis Seagenan Kapal 17 Dasar Bisinis Seagenan Kapal 18 Dasar Bisinis Seagenan Kapal	
18 Hukum Hak Kekayaan Intelektual 19 Hukum Kenagakerjaan 20 Hukum Otonomi Daerah dan Desa 21 Hukum Perusahaan 22 Hukum Agraria 23 Hukum Internasional 24 Hukum Laut Internasional 25 Hukum Laut Internasional 26 Hukum Bisnis 27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Filisafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penguanan Bahasa Asing 9 Penguasan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan tentang Belayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 4 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 5 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 6 Undang -undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 9 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 10 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 10 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 10 Dasar Basar Agangamen Angabar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Gembar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Gembar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Bisinis Seagenan Kapal 13 Dasar Bisinis Seagenan Kapal 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Bisinis Seagenan Kapal 17 Dasar Bisinis Sewa Menyewa Kapal	
19 Hukum Ketenagakerjaan 20 Hukum Otonomi Daerah dan Desa 21 Hukum Perusahaan 22 Hukum Agraria 23 Hukum Internasional 24 Hukum dan Masyarakat 25 Hukum Laut Internasional 26 Hukum Bisnis 27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Filisafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Keseshatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 3 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 3 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 4 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 5 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksamaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Repgetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 10 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Garil Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:	
20 Hukum Otonomi Daerah dan Desa 21 Hukum Perusahaan 22 Hukum Agraria 23 Hukum Internasional 24 Hukum dan Masyarakat 25 Hukum Laut Internasional 26 Hukum Bisnis 27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Filsafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Keseshatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer 10 Jenang Kapal Kelas I 104 Jenang Kapal Kelas I 105 Jenang Kapal Kelas I 106 Jenang Kapal Kelas I 107 Lenang Kapal Kelas I 108 Jenang Kapal Kelas I 109 Lenang Kapal Kelas I 109 Lenang Kapal Kelas I 109 Lenang Kapal Kelas I 100 Jenang Kapal Kelas I 101 Lenang Kapal Kelas I 102 Lenang Kapal Kelas I 103 Jenang Kapal Kelas I 104 Jenang Kapal Kelas I 105 Jenang Kapal Kelas II 105 Jenang Kapal Kelas II 105 Jenang Kapal Kelas II 106 Jenang Kapal Kelas II 107 Jenang Kapal Kelas II 108 Jenang Kapal Kelas II	
22 Hukum Internasional 23 Hukum Internasional 24 Hukum dan Masyarakat 25 Hukum Laut Internasional 26 Hukum Bisnis 27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Filsafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasan Komputer 104 Jenang Kapal Kelas I 105 Jenang Kapal Kelas I 106 Jenang Kapal Kelas I 107 Jenang Kapal Kelas I 108 Jenang Kapal Kelas I 109 Jenang Kapal Kelas I 100 Jenang Kapal Kelas I 100 Jenang Kapal Kelas I 100 Jenang Kapal Kelas I 101 Jenang Kapal Kelas I 102 Jenang Kapal Kelas I 103 Jenang Kapal Kelas I 104 Jenang Kapal Kelas I 105 Jenang Kapal Kelas I 105 Jenang Kapal Kelas I 106 Jenang Kapal Kelas I 107 Jenang Kapal Kelas I 108 Jenang Kapal Kelas I 109 Jenang Kapal Kelas I 109 Jenang Kapal Kelas I 109 Jenang Kapal Kelas I 109 Jenang Kapal Kelas I 109 Jenang Kapal Kelas II 109 Jenang Kapal Kelas II	
23 Hukum Internasional 24 Hukum dan Masyarakat 25 Hukum Laut Internasional 26 Hukum Bisnis 27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Filsafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistiki Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Terknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Repedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Repegetahuan tentang Repedulian Lingkungan 10 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Perraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 10 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 10 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 15 Dasar Pengetahuan Humum:	
24 Hukum dan Masyarakat 25 Hukum Laut Internasional 26 Hukum Bisnis 27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Filsafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Humum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Posedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Repedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Repngetahuan tentang Repedulian Lingkungan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Perpetahuan tentang Listrik dan Elektronika 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 10 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 10 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 10 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 10 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 11 Dasar Bisnis Keagenan Kapal	
25 Hukum Laut Internasional 26 Hukum Bisnis 27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kirimiologi 3 Filsafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer 1 Dasar Pengetahuan Tehtang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Tehtang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Tehtang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Tehtang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan Tehtang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Apedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 14 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 15 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 18 Dasar Ganta Rujadan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganta Rujadan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganta Rujadan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganta Rujadan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganta Rujadan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganta Rujadan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganta Rujadan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganta Rujadan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganta Rujadan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganta Rujadan A	
27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Filsafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Posedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 14 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 15 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asura	
Pengetahuan Umum: 1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Filsafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Niah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Rengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 10 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 10 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 11 Kemampuan Umum:	
1 Sosiologi dan Budaya Dasar 2 Kriminologi 3 Filsafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umrum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Husus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Rengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Rengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Memampuan Umum:	
2 Kriminologi 3 Filsafat Hukum 4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Negedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Repegtahuan tentang Repedulian Lingkungan 10 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Berbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Berbengkelan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Akuntansi 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Paraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Jenang Kapal Kelas II	
4 Argumentasi Hukum 5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer 104 Jenang Kapal Kelas I 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika 8 Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:	
5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut	
6 Statistik Dasar 7 Kesehatan Dasar 8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Repemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:	
8 Penggunaan Bahasa Asing 9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Banti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut	
9 Penguasaan Komputer Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 19 Jenang Kapal Kelas II	
Kemampuan Umum: 1	
1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:	
Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:	
1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:	_
2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:	
3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 15 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut	
5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	erkait
18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
105 Jenang Kapal Kelas II Kemampuan Umum:	
Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim	
2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika	
Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar	
2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi	
Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR	
4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal	
5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya	
7 Kecakapan Bahari	
8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja	
9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan	
11 Pengenalan Permesinan Kapal	
12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika	
13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut	
14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang T	erkait
16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal	
17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal	
18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut 106 Juru Masak Kapal Kelas I Kemampuan Umum:	
1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim	
Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika	·
Kemampuan Khusus:	
Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi	
3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR	
4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal	
5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan	

Halaman 22 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
	 		Kecakapan Bahari Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika Dasar-dasar Akuntansi
		_	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
107	hum Maaak Kanal Kalaa II	18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
107	Juru Masak Kapal Kelas II	1	Kemampuan Umum: Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
	<u> </u>		Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalah Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
	 		Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
	 		Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
	•		Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
108	Juru Mesin Kapal Kelas I		Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
	<u> </u>	2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
	•	6	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
	 		Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
	 		Dasar Bisnis Keagenan Kapal Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
109	Juru Mesin Kapal Kelas II		Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
	 	1	Kemampuan Khusus: Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan Lindang undang Pelayaran dan Pelakcanganya
	 		Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal Pagar Pengetahuan tentang Lietrik dan Flektronika
	 		Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut

Halaman 23 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
	ŀ		Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
	ľ		Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
110	Juru Mesin Kapal Kelas III		Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		2	Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendahan Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
	+		Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Pendengkelah Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
	-		Dasar-dasar Akuntansi Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
111	Juru Minyak Kapal Kelas I	ıø	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:
	y	1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		1	Kemampuan Khusus: Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
	ľ		Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datai Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
	•		Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
110	Lury Minusk Kanal Kalas II	18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
112	Juru Minyak Kapal Kelas II	1	Kemampuan Umum: Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
	ţ		Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
	-		Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
	•		Kecakapan Bahari
		8	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
	-		Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
	-		Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait
	ŀ		Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
	ţ		Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
4	1 M. 112 112 112 111	18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
113	Juru Minyak Kapal Kelas III	1	Kemampuan Umum: Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
			Dasar Pengetahuan tentang Banasa Inggris Mantim Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar

Halaman 24 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
114	Juru Mudi Kapal Kelas I	.0	Kemampuan Umum:
	·		Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		4	Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4	Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
445	L M CK LK L	18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
115	Juru Mudi Kapal Kelas II	1	Kemampuan Umum: Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendahan Kapai Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabunanan dan Undang-undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
116	Juru Mudi Kapal Kelas III		Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
l	i	0	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan

Halaman 25 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Pengenalan Permesinan Kapal Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
117	Juru Operasi dan Pemeliharaan		Kompetensi Umum:
	Sumber Daya Air		Pengetahuan umum, peraturan dan teori tentang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air
			Kompetensi Khusus: Tata cara operasi sumber daya air
			Tata cara operasi sumber daya air Tata cara pemeliharaan sumber daya air
			Alat ukur dan instrumentasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air
118	Juru Pelihara Cagar Budaya		Peraturan Perundang-Undangan tentang Cagar Budaya
			Dasar Hukum Pemeliharaan Cagar Budaya Pengertian Pelindungan Cagar Budaya
			Pengertian Pemeliharaan Cagar Budaya
			Tata Cara Pemeliharaan Cagar Budaya
			Tata Cara Pembersihan Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya
			Tata Cara Pembersihan Situs dan Lingkungannya Tata Cara Perawatan dan Pembersihan Situs dan Fasilitasnya
L			Pembersihan Cagar Budaya Secara Manual Kering atau Basah
119	Kasab Deck Kapal Kelas I		Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalah Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Penbengketah Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
120	Kasab Deck Kapal Kelas II		Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		1	Kemampuan Khusus: Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7	Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi Dasar Dasar Managaman Angkutan Laut
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
101	Kasab Mesin Kapal Kelas I	18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
141	nasau iviesiii napai neids I	1	Kemampuan Umum: Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
•			<u> </u>

Halaman 26 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
	-		Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
	-		Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
	 		Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
	-		Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
	-		Pengenalan Permesinan Kapal Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
	-		Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
	<u> </u>		Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
122	Kataloger Pemula		Permenhan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kodifikasi Sistem NSN
			Prosedur kodifikasi secara teknis di lingkungan Kemhan dan TNI
		3	Program pengembangan teknologi industri pertahanan
123	Kelasi Kapal Kelas I	1	Kemampuan Umum: Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7	Kecakapan Bahari
	<u>_</u>		Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
	-		Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
	-		Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
	 		Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
124	Kelasi Kapal Kelas II		Kemampuan Umum:
	<u> </u>		Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
	 -		Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
	<u> </u>		Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7	Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
125	Kelasi Kapal Kelas III		Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7	Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
1 1	ı L	9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan

Halaman 27 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
126	Kelasi Kapal Kelas IV		Kemampuan Umum:
	·	1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gelak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
		8	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi Dasar Dasar Managaman Angkutan Laut
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
127	Kelasi Kapal Kelas V		Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Prosecui Daharat dan SAN Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7	Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
1.5		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
128	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III	_	Kemampuan Umum:
			Matematika Dasar Bahasa Inggris Maritim
			Banasa inggris Maritim Teknologi Informatika
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
			Sistem Manajemen Kapal
			Kemampuan Khusus:
			Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol Ilmu Bahan
			Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
129	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV	,	Kemampuan Umum:
		1	Matematika Dasar
			Bahasa Inggris Maritim
		3	Teknologi Informatika
		4	Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
			Sistem Manajemen Kapal
			Sistem Manajemen Kapal Kemampuan Khusus: Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional

Halaman 28 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
			Ilmu Bahan
		_	Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
130	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V		Kemampuan Umum:
		1	Matematika Dasar
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Sistem Manajemen Kapal
			Kemampuan Khusus:
			Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3	Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
			Ilmu Bahan Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
131	Kerani Kapal Kelas I	-/	Kemampuan Umum:
'	Troian rapa rolas i	1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
132	Kerani Kapal Kelas II	_	Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya Kecakapan Bahari
			Recaкapan Banan Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
133	Kerani Kapal Kelas III		Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		_	Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi Dasar Pengetahuan tentang Procedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Clair Gerak dan Pengendalian Kapal Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Halaman 29 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
404	16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
134	Konselor Adiksi Ahli Pertama		Kompetensi Umum: Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi
			Pengetahuan tentang komunikasi efektif di bidang P4GN
			Pengetahuan adiksi narkoba
			Kompetensi Khusus:
		1	Skrining
		2	Penerimaan awal
			Asesmen
			Rencana rawatan
			Rancangan edukasi
			Edukasi Konseling individu
			Konseling Individu Konseling kelompok
			Intervensi keluarga
			Penanganan krisis
			Konferensi kasus
		12	Konsultasi dan koordinasi
		13	Supervisi layanan
			Pencatatan dan pelaporan
135	Konselor SDM		Kemampuan Umum:
			Regulasi mengenai kepegawaian
			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
			Manajemen PNS
			Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN
			Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
			Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
		7	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
		8	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
		9	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
			Kompetensi Khusus:
		1	Teori motivasi
			Teori hierarki kebutuhan
			Teori kinerja
			Teori pelayanan dan Teori kepuasan pelanggan
			Teori manajemen Unsur-unsur manajemen
			Unsur-unsur manajemen Teori human capital
			Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
			Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
			Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
			Manajemen PNS Peraturan I AN Namer 15 Tahun 2020 tentang Pengambangan Kempatangi PPPK
		12	Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK SE Mantari PANPR Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui, lalur
		13	SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan
			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
			Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 jo. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara
			Pemberian Cuti PNS
			Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
			Kosep dasar bimbingan dan konseling
			Tujuan. Prinsip, asas dan fungsi bimbingan dan konseling
			Ragam bimbingan dan konseling menurut masalah
			Kualitas pribadi konselor Katarampilan pandakatan stratogi dan taknik dalam himbingan dan konseling
			Keterampilan pendekatan strategi dan teknik dalam bimbingan dan konseling Manajemen konflik
			Strategi revolusi konflik dan bentuk intervensi konflik
			Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS
136	Konservator		Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
			Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
	•		

Halaman 30 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
ļ		5	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
ļ		7	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
137	Konstabel Kapal Kelas I		Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		_	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya Kecakapan Bahari
		_	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
		_	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15	Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
138	Konstabel Kapal Kelas II	L.	Kemampuan Umum:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		_	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
130	Konsultan Industri	18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:
100		1	Wawasan tentang indistri dan perannya dalam perekonomian
			Undang-Undang Perindustrian
			Kemampuan Khusus:
			Identifikasi Kebutuhan Konsultasi Industri
			Perancangan Konsultasi Industri Industri Berbasis Sumber Daya Alam
			Industri Berbasis Sumber Daya Alam Industri Hijau, Circular Ekonomi, dan Zero Waste
			Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		6	Jasa Industri dan Rantai Nilai Global
		_	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri
			Industri Halal
			Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Kebijakan Satu Data
			Industri Strategis
			Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)
		13	Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0
			Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key
4.5		14	Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project
140	Kurator	14	Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key

Halaman 31 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		7	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
141	Kurator Keperdataan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
		2	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Kemampuan Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
		2	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan
			Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		4	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
		5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02-HT.05.10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan
		6	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
142	Kurator Koleksi Hayati Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Pengenalan Kurator Koleksi Hayati
		2	Manajemen Koleksi Kompetensi Khusus:
		1	Eksplorasi Koleksi Keanekaragaman Hayati
		2	Teknik Handling Spesimen dan/atau Kultur Koleksi
		3	Dasar-Dasar Analisis Koleksi
		5	Perawatan Spesimen dan/atau Kultur Koleksi dan Fasilitas Pendukung Koleksi Pelaporan Koleksi Hayati
143	Mandor Mesin Kapal Kelas I		Kemampuan Umum:
	·	1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		1	Kemampuan Khusus: Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3	Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4	Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 6	Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
		8	Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
144	Manggala Agni Terampil		Kemampuan Umum:
			Wawasan regulasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan Wawasan regulasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan
			Wawasan regulasi terkait pengendalian kebakaran nutan dan lanan Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional Manggala Agni
		4	Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		5	Wawasan umum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		1	Kemampuan Khusus: Pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
			Pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya
			Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
			Pengelolaan sistem peringatan dan deteksi dini
			Penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan Pengecakan langgan informasi kebakaran hutan dan lahan (groundebeek hotspot)
			Pengecekan lapangan informasi kebakaran hutan dan lahan (groundcheck hotspot) Penatalaksanaan pemadaman darat
			Dukungan pemadaman udara
			Evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan
		-	

Halaman 32 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Inventarisasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan
		11	Inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
145	Manggala Informatika Ahli Pertama	4	Kemampuan Umum:
			Konsep dasar TIK Sistem komputer
			Jaringan komputer
			Sistem informasi
			Kriptografi
			Kemampuan Khusus:
			Budaya Kaminfo
			Manajemen risiko Standar dan Regulasi Kaminfo
146	Markonis Kapal Kelas I		Kemampuan Umum:
140	Markonis Rapai Reias i		Matematika Dasar
			Fisika Terapan
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Sistem Manajemen Kapal
			Budaya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan
			Kemampuan Khusus: Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Sistem Navigasi Elektronik
			P2TL dan Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Ilmu Pelayaran Datar
		6	Isyarat Visual
			Teknik Radio
			Perjanjian Internasional terkait Komunikasi (ITC dan SOLAS)
			Peraturan Radio
			Service Document
			Telepon Radio GMDSS
147	Markonis Kapal Kelas II		Kemampuan Umum:
	mamorilo rapa riolao ii		Matematika Dasar
			Fisika Terapan
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Sistem Manajemen Kapal
			Budaya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan
			Kemampuan Khusus: Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Sistem Navigasi Elektronik
			P2TL dan Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
		5	Ilmu Pelayaran Datar
			Isyarat Visual
			Teknik Radio
			Perjanjian Internasional terkait Komunikasi (ITC dan SOLAS)
			Peraturan Radio Service Document
			Telepon Radio
			GMDSS
148	Masinis I Kapal Kelas I		Kemampuan Umum:
	·		Matematika Dasar
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
			Sistem Manajemen Kapal
			Kemampuan Khusus: Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
			Ilmu Bahan
			Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
149	Masinis I Kapal Kelas III		Kemampuan Umum:
			Matematika Dasar
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesenatan dan Keselamatan Kerja) Sistem Manajemen Kapal
			Kemampuan Khusus:
			Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal

Halaman 33 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
			Ilmu Bahan
			Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
150	Masinis I Kapal Kelas IV		Kemampuan Umum:
			Matematika Dasar
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Sistem Manajemen Kapal
		5	Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2	Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol Ilmu Bahan
			Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
151	Masinis II Kapal Kelas I	•	Kemampuan Umum:
	·	1	Matematika Dasar
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5	Sistem Manajemen Kapal Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3	Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 7	Ilmu Bahan Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
152	Masinis II Kapal Kelas II		Kemampuan Umum:
		1	Matematika Dasar
		2	Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5	Sistem Manajemen Kapal Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 7	Ilmu Bahan Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
153	Masinis II Kapal Kelas III		Kemampuan Umum:
		1	Matematika Dasar
		2	Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5	Sistem Manajemen Kapal Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
			Ilmu Bahan Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
154	Masinis III Kapal Kelas I		Kemampuan Umum:
			Matematika Dasar
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5	Sistem Manajemen Kapal Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Mesin Penggerak Utama
		4	Mesin Bantu
1			
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol Ilmu Bahan Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu

Halaman 34 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
155	Masinis III Kapal Kelas II		Kemampuan Umum:
			Matematika Dasar
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika
			Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5	Sistem Manajemen Kapal
		1	Kemampuan Khusus: Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2	Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Mesin Penggerak Utama
			Mesin Bantu
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
			Ilmu Bahan
		7	Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
156	Mediator Hubungan Industrial Ahli		Kemampuan Khusus:
	Pertama	1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
			Hubungan Kerja
			Perjanjian Kerja
			Peraturan Perusahaan
			Perjanjian Kerja Bersama
			Pengupahan Parawa IAMOO
			Program JAMSOS Organisasi Pengusaha
			Organisasi Pengusana Serikat Pekerja/Serikat Buruh
			LKS Bipartit dan LKS Tripartit
			Dewan Pengupahan
			Pemasyarakatan Hubungan Industrial
			Pemetaan dan Kerawanan Deteksi Dini
			Mogok dan Lock Out
		15	Perselisihan Industrial
		16	Teknis Mediasi Perselisihan Industrial
		17	Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung
			Kemampuan Umum:
			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
			Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
			Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
			Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
			Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis
		6	Kementerian Ketenagakerjaan
157	Medik Veteriner Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
			Kompetensi Khusus:
			Tatacara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
		2	Identifikasi status reproduksi dan penanganan reproduksi dan kebidanan pada hewan
158	Metrolog Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Penyediaan dan pengembangan standar pengukuran atau bahan acuan
		-	Kemampuan Khusus:
			Peneliharaan standar pengukuran atau bahan acuan
			Pelaksanaan diseminasi standar pengukuran atau bahan acuan Pemenuhan pengakuan nasional atau internasional standar pengukuran atau bahan acuan
159	Mualim I Kapal Kelas I	J	Kemampuan Umum:
133	ποαιτι τιαραι ποιασ ι	1	Matematika Terapan
			Fisika Terapan
			Teknologi Informatika
		-	Kemampuan Khusus:
		1	Ilmu Pelayaran Datar
		2	Ilmu Pelayaran Astronomi
			Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
			Meteorologi
			Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
			Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual Olah Carak Kanal
			Olah Gerak Kapal Penanganan dan Pengaturan Muatan
			Penanganan dan Pengaturan Muatan Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
i	<u>i</u>		- 12

Halaman 35 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran Kepemimpinan dan Kerja sama tim
160	Mualim I Kapal Kelas II		Keperimpinan dan Kerja sama tim Kemampuan Umum:
	apa. reide		Matematika Terapan
			Fisika Terapan
			Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Astronomi Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
			Meteorologi
			Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
			Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual
			Olah Gerak Kapal Penanganan dan Pengaturan Muatan
			Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran Kepemimpinan dan Kerja sama tim
161	Mualim I Kapal Kelas III		Keperimpinan dan Kerja sama tini Kemampuan Umum:
101	Maaiiii Trapai reias iii		Matematika Terapan
			Fisika Terapan
		3	Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Astronomi
			Sistem Navigasi Elektronik Kompas dan Sistem Kemudi
			Meteorologi
			Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
			Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual
			Olah Gerak Kapal
			Penanganan dan Pengaturan Muatan Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15	Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran
162	Mualim I Kapal Kelas IV		Kepemimpinan dan Kerja sama tim Kemampuan Umum:
102	www.min i Napai NeidS IV		Kemampuan Umum: Matematika Terapan
			Fisika Terapan
			Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Astronomi
			Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi Meteorologi
			Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
			Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual
			Olah Gerak Kapal
			Penanganan dan Pengaturan Muatan
			Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17	Regulasi Pelayaran
		18	Kepemimpinan dan Kerja sama tim
163			Kemampuan Umum:
.00	Mualim II Kapal Kelas I		
	Mualim II Kapal Kelas I	1	Matematika Terapan Fisika Terapan

Halaman 36 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar Ilmu Pelayaran Astronomi
			Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
			Meteorologi
		6	Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
			Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual Olah Gerak Kapal
			Penanganan dan Pengaturan Muatan
			Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14	Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran
164	Mualim II Kapal Kelas II		Kepemimpinan dan Kerja sama tim Kemampuan Umum:
104	iwaiiii ii Napai Neias ii		Matematika Terapan
			Fisika Terapan
			Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Astronomi
			Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
			Meteorologi Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
	•		Peraturan Penceganan Tubrukan di Laut Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual
			Olah Gerak Kapal
			Penanganan dan Pengaturan Muatan
			Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran
			Kepemimpinan dan Keria sama tim
165	Mualim II Kapal Kelas III		Kemampuan Umum:
	·		Matematika Terapan
			Fisika Terapan
			Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Astronomi Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
			Meteorologi
			Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7	Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual
			Olah Gerak Kapal
			Penanganan dan Pengaturan Muatan Kepadulian Lingkungan dan Penggahan Polusi
			Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17	Regulasi Pelayaran
			Kepemimpinan dan Kerja sama tim
166	Mualim III Kapal Kelas I		Kemampuan Umum:
			Matematika Terapan
			Fisika Terapan
			Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus: Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Datar
			Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
. '	·		

Halaman 37 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Meteorologi
			Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
			Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR Isyarat Visual
			Olah Gerak Kapal
			Penanganan dan Pengaturan Muatan
			Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13	Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran Kepemimpinan dan Kerja sama tim
167	Mualim III Kapal Kelas II		Kemampuan Umum:
			Matematika Terapan
		2	Fisika Terapan
			Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Astronomi Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
			Meteorologi
			Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7	Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual
			Olah Gerak Kapal
			Penanganan dan Pengaturan Muatan
			Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran
			Kepemimpinan dan Kerja sama tim
168	Nakhoda Kapal Kelas III		Kemampuan Umum:
			Matematika Terapan
			Fisika Terapan
			Teknologi Informatika Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Astronomi
			Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
		5	Meteorologi
			Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
			Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual Olah Gerak Kapal
			Penanganan dan Pengaturan Muatan
			Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran
160	Nakhoda Kapal Kelas IV	18	Kepemimpinan dan Kerja sama tim Kemampuan Umum:
109	ivaniioua napai nelas IV		Kemampuan omum: Matematika Terapan
			Fisika Terapan
			Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Astronomi
			Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
			Meteorologi Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
			Peraturan Penceganan Tubrukan di Laut Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual
			Olah Gerak Kapal
•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Halaman 38 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Penanganan dan Pengaturan Muatan
	•		Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran
170	Nakhada Kasal Kalaa V	18	Kepemimpinan dan Kerja sama tim
170	Nakhoda Kapal Kelas V	1	Kemampuan Umum: Matematika Terapan
		2	Fisika Terapan
			Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Ilmu Pelayaran Datar
			Ilmu Pelayaran Astronomi Sistem Navigasi Elektronik
			Kompas dan Sistem Kemudi
			Meteorologi
			Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
			Dinas Jaga
			Prosedur Darurat dan SAR
			Isyarat Visual Olah Gerak Kapal
			Olan Gerak караі Penanganan dan Pengaturan Muatan
			Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Pemadaman Kebakaran di Kapal
			Teknik Penyelamatan diri
			Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
			Regulasi Pelayaran Kepemimpinan dan Kerja sama tim
171	Negosiator Perdagangan Ahli	10	Kemampuan Khusus:
	Pertama	_	Penyajian data dan informasi perdagangan serta penjelasan terkait data dan informasi perdagangan yang
		1	menjadi kewenangannya
			Analis bahan kerjasama perdagangan internasional
		3	Advokasi kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil advokasi
		4	Analisis posisi runding dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait sesuai dengan prosedur kerja yang ada
			lsu yang relevan terkait perundingan/kerja sama perdagangan internasional di kawasan atau mitra dagang
		5	(ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan)
		6	Analisis bahan untuk aktivasi perjanjian internasional sesuai dengan pedoman yang berlaku
172	Nutrisionis Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Keputusan Menkes RI No. HK.01.07/Menkes/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien dan Permenkes No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
			Asuhan gizi klinik (clinical nutrition)
			Kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia
			Kompetensi Khusus:
			Pengelolaan masalah gizi
		2	Pemantauan/surveilans gizi
		3	Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat gizi dan kesehatan
			Asuhan gizi individu, kelompok dan masyarakat
			Pengelolaan sistem penyelenggaraan makanan (food service)
173	Nutrisionis Terampil	6	Pengelolaan sumber daya lokal, bisnis gizi (nutripreneurship) Keterampilan Umum:
	·	1	Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan asuhan gizi
		2	Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengelolaan gizi masyarakat
		3	Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelenggaraan makanan
			Keterampilan Khusus:
		1	Pengelolaan asuhan gizi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		2	Penyelenggaraan, pembimbingan pelaksanaan atau penyusunan peta jalan
		_	penyusunan/pemanfaatan/penggunaan Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengelolaan gizi
		3	masyarakat
		4	Pengelolaan asuhan gizi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		5	Penyelenggaraan dan pembimbingan pelaksanaan gizi masyarakat atau penyusunan, pemanfaatan, atau
			penggunaan peta jalan
			Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelenggaraan makanan
		7	Pengelolaan asuhan gizi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis Penyelenggaraan dan pembimbingan penyelenggaraan makanan atau penyusunan pemantaatan atau
		8	Penyelenggaraan dan pembimbingan penyelenggaraan makanan atau penyusunan, pemanfaatan, atau penggunaan peta jalan
			poriggerisari pota jaran

Halaman 39 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

Komampuan Umum:	NO NAMA JABATAN		MATERI POKOK
2 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang ASN 3 PMK No 75 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi 4 SK IOTI No 134/Skep/IOTI-PUSATV/2021 Tentang perubahan Kode Etik Okupasi Terapis Kemampuan Khusus: 1 Screening 2 Pemeriksaan ADLs 3 Pemeriksaan ADLs 4 Pemeriksaan ADLs 5 Pemeriksaan ADLs 6 Pemeriksaan taktil 6 Pemeriksaan taktil 7 Pemeriksaan taktil 8 Pemeriksaan taktil 9 Pemeriksaan taktil 1 Pemeriksaan taktil 9 Pemeriksaan taktil 1 Pemeriksaan Pendengaran 10 Pemeriksaan Pendengaran 10 Pemeriksaan Pendengaran 11 Pemeriksaan stereognosis 12 Pemeriksaan stereognosis 12 Pemeriksaan stereognosis 13 Pemeriksaan stereognosis 14 Pemeriksaan stereognosis 15 Pemeriksaan stereognosis 16 Pemeriksaan stereognosis 17 Pemeriksaan stereognosis 18 Pemeriksaan stereognosis 19 Pemeriksaan stereognosis 19 Pemeriksaan stereognosis 19 Pemeriksaan stereognosis 10 Pemeriksaan stereognosis 10 Pemeriksaan stereognosis 11 Pemeriksaan stereognosis 12 Pemeriksaan stereognosis 13 Pemeriksaan stereognosis 14 Pemeriksaan stereognosis 15 Pemeriksaan stereognosis 16 Pemeriksaan stereognosis 17 Pemeriksaan stereognosis 18 Pemeriksaan stereognosis 19 Pemeriksaan posisi dalam ruung 19 Pemeriksaan posisi dalam ruung 19 Pemeriksaan posessi dalam ruung 19 Pemeriksaan posisi dalam ruung 10 Pemeriksaan posisi dalam ruung 11 Pemeriksaan posisi dalam ruung 12 Pemeriksaan posisi dalam ruu	174 Okupasi Terapis Terampil		
3. PMK No. 76 Ierdiang Standart Jayanan Terapi Chugasi 4. Sik IOTI No 1348/sepi/OTI PUSAT/V/2021 Tentang perubahan Kode Etik Okupasi Terapis Kemampuan Khusus: 1. Screening 2. Pemeriksaan ADLs 3. Pemeriksaan ADLs 4. Pemeriksaan IADLs 4. Pemeriksaan IADLs 6. Pemeriksaan IADLs 7. Pemeriksaan IADLs 8. Pemeriksaan IADLs 9. Pemeriksaan IADLs 1. Peme			
SK KOTIN D 134/Skep/OTI-PUSATV/2021 Tentang perubahan Kode Etik Okupasi Terapis Kemampuan Khusus: Screening			ů ů
Kemanpuan Khusus: Screening Pemeriksaan ADLs Pemeriksaan IADLs			
1 Screening 2 Pemeriksaan ADLs 3 Pemeriksaan iADLs 4 Pemeriksaan iADLs 5 Pemeriksaan iADLs 6 Pemeriksaan iADLs 7 Pemeriksaan iADLs 7 Pemeriksaan iADLs 8 Pemeriksaan iADLs 8 Pemeriksaan iADLs 8 Pemeriksaan iADLs 9 Pemeriksaan iADLs 9 Pemeriksaan iADLs 1 Pemeriksaan i		-	
3. Pemeriksaan IADLs 4. Pemeriksaan tessensi 5. Pemeriksaan tessensi 6. Pemeriksaan tessensi 7. Pemeriksaan tessensi 8. Pemeriksaan tessensi 9. Pemeriksaan visual 9. Pemeriksaan Pendengaran 10. Pemeriksaan tersengnogis 11. Pemeriksaan steregongois 12. Pemeriksaan tersengnogis 13. Pemeriksaan tersengnogis 14. Pemeriksaan tersengnogis 15. Pemeriksaan tersengnogis 16. Pemeriksaan tessensi tersengnogis 17. Pemeriksaan tersengnogis 18. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 19. Pemeriksaan tersengnogis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 11. Pemeriksaan tersengnis 12. Pemeriksaan tersengnis 13. Pemeriksaan tersengnis 14. Pemeriksaan tersengnis 15. Pemeriksaan tersengnis 16. Pemeriksaan tersengnis 17. Pemeriksaan tersengnis 18. Pemeriksaan tersengnis 19. Pemeriksaan tersengnis 19. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Pemeriksaan tersengnis 10. Peme		1	
4 Pemeriksaan kesadaran sensori 5 Pemeriksaan taktil 6 Pemeriksaan proprioceptif 7 Pemeriksaan Visual 8 Pemeriksaan Visual 9 Pemeriksaan Visual 10 Pemeriksaan Pendengaran 11 Pemeriksaan pengecapan 11 Pemeriksaan sensoria pengecapan 11 Pemeriksaan sersoria pengecapan 11 Pemeriksaan sersoria pengecapan 11 Pemeriksaan sersoria pengecapan 11 Pemeriksaan sekema tubuh. 14 Pemeriksaan sekema tubuh. 15 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan-kiri. 16 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan-kiri. 17 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 21 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 22 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 23 Pemeriksaan onersepsi persepsi latar depan dan belakang. 24 Pemeriksaan onersepsi persepsi latar depan dan belakang. 25 Pemeriksaan elementa persepsi latar depan dan belakang. 26 Pemeriksaan onersepsi persepsi latar depan dan belakang. 27 Pemeriksaan elementa persepsi latar depan dan belakang. 28 Pemeriksaan onersepsi persepsi latar depan dan belakang. 29 Pemeriksaan elementa persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan elementa persepsi latar depan dan belakang. 21 Pemeriksaan elementa persepsi latar depan dan belakang. 22 Pemeriksaan elementa persepsi latar depan dan belakang. 23 Pemeriksaan elementa persepsi latar depan dan belakang. 24 Pemeriksaan elementa persepsi latar depan dan belakang. 25 Pemeriksaan eneromuscular perunjang okupasional 26 Pemeriksaan eneromuscular perunjang okupasional 27 Pemeriksaan eneromuscular perunjang okupasional 28 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 29 Pemeriksaan eneromiscular penunjang okupasional 30 Pemeriksaan eneromiscular penunjang okupasional 31 Pemeriksaan horodinasi gerak penunjang okupasional 32 Pemeriksaan horodinasi gerak penunjang okupasional 33 Pemeriksaan horodinasi gerak penunjang okupasional 34 Pemeriksaan horodinasi gerak penunjang okupasional 35 Pemeriksaan horodinasi gerak penunjang okupasional 36 Peme		2	Pemeriksaan ADLs
5 Pemeriksaan proprioseptif 7 Pemeriksaan vestibular 8 Pemeriksaan vestibular 8 Pemeriksaan visual 9 Pemeriksaan Predengaran 10 Pemeriksaan pengecapan 11 Pemeriksaan stereognosis 12 Pemeriksaan stereognosis 12 Pemeriksaan stereognosis 13 Pemeriksaan stereognosis 14 Pemeriksaan stereognosis 15 Pemeriksaan stereognosis 16 Pemeriksaan skema tubuh, 16 Pemeriksaan idskriminasi sisi kanan-kiri, 17 Pemeriksaan konstansi bentuk, 17 Pemeriksaan posia didam ruang 18 Pemeriksaan presapa latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan presapa latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan presapa latar depan dan belakang. 21 Pemeriksaan presapa latar depan dan belakang. 22 Pemeriksaan orientasi topografi. 23 Pemeriksaan indensa presapa kadalaman/jarak. 21 Pemeriksaan indensa presapa kadalaman/jarak. 22 Pemeriksaan neriensa persapa kadalaman/jarak. 23 Pemeriksaan neriensa penunjang okupasional 24 Pemeriksaan neriemusucular penunjang okupasional 25 Pemeriksaan indensa penunjang okupasional 26 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyalarg garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 29 Pemeriksaan neriensa penunjang okupasional 30 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 31 Pemeriksaan neriensa penunjang okupasional 32 Pemeriksaan neriensa penunjang okupasional 33 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 34 Pemeriksaan nemori 35 Pemeriksaan nemori 36 Pemeriksaan nemori 37 Pemeriksaan nemori 38 Pemeriksaan nemori 39 Pemeriksaan nemori 39 Pemeriksaan nemori 39 Pemeriksaan nemori 39 Pemeriksaan nemori 30 Pemeriksaan nemori 30 Pemeriksaan nemori 31 Pemeriksaan nemori 32 Pemeriksaan nemori 33 Pemeriksaan nemori 34 Pemeriksaan nemori 35 Pemeriksaan nemori 36 Pemeriksaan nemori 37 Pemeriksaan nemori 38 Pemeriksaan nemori 39 Pemeriksaan nemori 30 Pemeriksaan nemori 30 Pemeriksaan nemori 31 Pemeriksaan nemori		_	
6 Pemeriksaan proprioseptif 7 Pemeriksaan Vestibular 8 Pemeriksaan Visual 9 Pemeriksaan Vestibular 10 Pemeriksaan pengecapan 11 Pemeriksaan pengecapan 11 Pemeriksaan kinesthesia 13 Pemeriksaan kinesthesia 13 Pemeriksaan kinesthesia 13 Pemeriksaan skena tubuh. 15 Pemeriksaan skena tubuh. 15 Pemeriksaan skena tubuh. 16 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan-kiri. 16 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan-kiri. 17 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 19 Pemeriksaan posisi dalam ruang 19 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 20 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan bubungan spasial. 22 Pemeriksaan nerumasular penunjang okupasional 24 Pemeriksaan nerumusular penunjang okupasional 25 Pemeriksaan nerumusular penunjang okupasional 26 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 29 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 29 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 32 Pemeriksaan rakasi 33 Pemeriksaan rakasi 34 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 35 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 36 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 37 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 38 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 39 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional			
7 Pemeriksaan Vestbular 8 Pemeriksaan Prisual 9 Pemeriksaan Pendengaran 10 Pemeriksaan pengecapan 11 Pemeriksaan stereognosis 12 Pemeriksaan stereognosis 12 Pemeriksaan stereognosis 13 Pemeriksaan stereognosis 14 Pemeriksaan stereognosis 15 Pemeriksaan skema tubuh. 15 Pemeriksaan skema tubuh. 16 Pemeriksaan konstansi bentuk. 17 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 19 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 21 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 22 Pemeriksaan brusual-Closure. 23 Pemeriksaan brusual-Closure. 24 Pemeriksaan orieritasi topografi. 25 Pemeriksaan relevan persepsi kedalaman/arak. 26 Pemeriksaan relevan persepsi kedalaman/arak. 27 Pemeriksaan relevan persepsi kedalaman/arak. 28 Pemeriksaan relevan penunjang okupasional 29 Pemeriksaan releva penunjang okupasional 20 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 20 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 21 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 22 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 38 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 39 Pemeriksaan integrasi silatar penunjang okupasional 30 Pemeriksaan norientasi salaman penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontroli gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontroli gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan norientasi 32 Pemeriksaan nemoriasi silatar penunjang okupasional 31 Pemeriksaan norientasi 33 Pemeriksaan memoriasi silatar penunjang okupasional 44 Pemeriksaan keterampian pre-akademik 45 Pemeriksaan keterampian pre-akademik 46 Pemeriksaan keterampian interpersonal 47 Pemeriksaan keterampian pre-akademik 48 Pemeriksaan keterampian interpersonal 49 Memerikkan keterampian interpersonal 40 Memerikkan bujuan area kirepa okupasional			
8 Pemeriksaan Visual 9 Pemeriksaan Pendengaran 10 Pemeriksaan pengecapan 11 Pemeriksaan stereognosis 12 Pemeriksaan kinesthesia 13 Pemeriksaan kinesthesia 13 Pemeriksaan skena tubuh. 14 Pemeriksaan skena tubuh. 15 Pemeriksaan skena tubuh. 16 Pemeriksaan skena tubuh. 17 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 19 Pemeriksaan posisi dalam ruang 19 Pemeriksaan posisi dalam ruang 19 Pemeriksaan posisi dalam ruang 19 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 22 Pemeriksaan pubungan spasial. 23 Pemeriksaan biomekarik penunjang okupasional 24 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 25 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 26 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 27 Pemeriksaan alteralitias penunjang okupasional 28 Pemeriksaan lateralitias penunjang okupasional 29 Pemeriksaan koordinasi subarat penunjang okupasional 30 Pemeriksaan koordinasi subarat penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 32 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 33 Pemeriksaan ruangan persepsi bilateral penunjang okupasional 34 Pemeriksaan ruangan persepsi bilateral penunjang okupasional 36 Pemeriksaan ruangan persepsi bilateral penunjang okupasional 37 Pemeriksaan menyilangan persepsi bilateral penunjang okupasional 38 Pemeriksaan menyilangan persepsi bilateral penunjang okupasional 39 Pemeriksaan menyilangan persepsi bilateral penunjangan okupasional 40 Pemeriksaan menyilangan persepsi bilateral penunjangan okupasional 41 Pemeriksaan kateralityan penunjangan okupasional			
9 Pemeriksaan Pendengaran 10 Pemeriksaan pengecapan 11 Pemeriksaan sirerognosis 12 Pemeriksaan sirerognosis 13 Pemeriksaan respon nyeri. 14 Pemeriksaan sirerognosis 15 Pemeriksaan sirerognosis 16 Pemeriksaan sirerognosis 17 Pemeriksaan sirerognosis 18 Pemeriksaan sirerognosis 19 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan-kiri. 19 Pemeriksaan nosisi dalam ruung 19 Pemeriksaan Nisual-Closure. 19 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan persepsi lateralaman/jarak. 21 Pemeriksaan neprespsi kadalaman/jarak. 22 Pemeriksaan neriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 23 Pemeriksaan neriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 24 Pemeriksaan neriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 25 Pemeriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 26 Pemeriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 27 Pemeriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 28 Pemeriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 29 Pemeriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 29 Pemeriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 29 Pemeriksaan neriksaan persepsi kedalaman/jarak. 30 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 31 Pemeriksaan neriksaan praksis 32 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan noordinasi gerak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan noordinasi gerak halus/dexteritas 34 Pemeriksaan noordinasi gerak halus/dexteritas 35 Pemeriksaan noordinasi gerak halus/dexteritas 36 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 37 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 38 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 39 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 30 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 31 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 32 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 34 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 35 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas 36 Pemeriksaan noordinasi perak halus/dexteritas			
11 Pemeriksaan kinesthesia 12 Pemeriksaan kinesthesia 13 Pemeriksaan kinesthesia 14 Pemeriksaan respon nyeri. 14 Pemeriksaan sokan tubuh. 15 Pemeriksaan oliskiriminasi sisi kanan- kiri. 16 Pemeriksaan konstansi bentuk. 17 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 19 Pemeriksaan persepsi kadalaman/jarak. 20 Pemeriksaan persepsi kadalaman/jarak. 21 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 22 Pemeriksaan orientasi topografi. 23 Pemeriksaan orientasi topografi. 24 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 25 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 26 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 27 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 28 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 29 Pemeriksaan sunderik kasar penunjang okupasional 29 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 32 Pemeriksaan responsian penunjang okupasional 33 Pemeriksaan responsian penunjang okupasional 34 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 35 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 36 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 37 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 38 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 39 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 30 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 31 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 32 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 33 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 34 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 35 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 36 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 38 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 39 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional 30 Pemeriksaan renderian penunjang okupasional			
12 Pemeriksaan kema tubuh. 14 Pemeriksaan skema tubuh. 15 Pemeriksaan skema tubuh. 16 Pemeriksaan skema tubuh. 17 Pemeriksaan skema tubuh. 18 Pemeriksaan konstanis sisi kanan- kiri. 19 Pemeriksaan posisi dalam ruang. 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang. 18 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 21 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan represpsi kedalaman/jarak. 22 Pemeriksaan represpsi kedalaman/jarak. 23 Pemeriksaan represpsi kedalaman/jarak. 24 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 25 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 26 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 31 Pemeriksaan rodrinasi gerak halus/dexteritas 32 Pemeriksaan rodrinasi gerak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 34 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 35 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 36 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 37 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 38 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 39 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 40 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 41 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 42 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 43 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 44 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas 45 Pemeriksaan kordinasi gerak halus/dexteritas		10	Pemeriksaan pengecapan
13 Pemeriksaan skema tubuh. 15 Pemeriksaan diskriminasi isisi kanan- kiri. 16 Pemeriksaan konstansi bentuk. 17 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 19 Pemeriksaan posisi dalam ruang 20 Pemeriksaan persepsi kalam ruang 21 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan bungan spasial. 22 Pemeriksaan nubungan spasial. 23 Pemeriksaan nubungan spasial. 24 Pemeriksaan nubungan spasial. 25 Pemeriksaan nubungan spasial. 26 Pemeriksaan nubungan spasial. 27 Pemeriksaan nubungan spasial. 28 Pemeriksaan nubungan spasial. 29 Pemeriksaan nubungan supasional 29 Pemeriksaan nubungan supasional 29 Pemeriksaan nubungan supasional 29 Pemeriksaan nubungan supasional 29 Pemeriksaan supasional 29 Pemeriksaan supasional 29 Pemeriksaan persepsi benunjang okupasional 30 Pemeriksaan persepsi penunjang okupasional 31 Pemeriksaan persepsi penunjang okupasional 32 Pemeriksaan persepsi penunjang okupasional 33 Pemeriksaan persepsi supasional 34 Pemeriksaan persepsi supasional 35 Pemeriksaan persepsi supasional 36 Pemeriksaan praksis 37 Pemeriksaan praksis 38 Pemeriksaan rentang supasional 39 Pemeriksaan rentang at penunjang okupasional 30 Pemeriksaan rentang at penunjang okupasional 31 Pemeriksaan rentang supasional 32 Pemeriksaan rentang supasional 33 Pemeriksaan rentang supasional 34 Pemeriksaan rentang at penunjang okupasional 35 Pemeriksaan rentang at penunjang okupasional 36 Pemeriksaan rentang at penunjang okupasional 37 Pemeriksaan rentang at penunjang okupasional 38 Pemeriksaan rentang at penunjang okupasional 49 Pemeriksaan konsep diri 40 Pemeriksaan konsep diri 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan konsep diri 43 Pemeriksaan konsep diri 44 Pemeriksaan konsep diri 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan tujuan area kinerja okupasional		_	
14 Pemeriksaan skema tubuh. 15 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan- kiri. 16 Pemeriksaan konstansi bentuk. 17 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 22 Pemeriksaan nuorangan spasial. 23 Pemeriksaan nuorangan spasial. 24 Pemeriksaan nuorangan spasial. 25 Pemeriksaan nuorangan spasial. 26 Pemeriksaan nerellex penunjang okupasional 27 Pemeriksaan nerellex penunjang okupasional 28 Pemeriksaan nerellex penunjang okupasional 29 Pemeriksaan nerellex penunjang okupasional 29 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 31 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 32 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 33 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 34 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 35 Pemeriksaan integrasi visual motor 36 Pemeriksaan rientang atensi 37 Pemeriksaan integrasi visual motor 38 Pemeriksaan rientang atensi 39 Pemeriksaan rientang atensi 39 Pemeriksaan rientang atensi 39 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan rientang atensi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 42 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 43 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identilikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional			
15 Pemeriksaan konstansi berutuk. 17 Pemeriksaan konstansi berutuk. 18 Pemeriksaan yosisi dalam ruang 18 Pemeriksaan yosisi dalam ruang 18 Pemeriksaan yosisi dalam ruang 19 Pemeriksaan yosisi dalam ruang 20 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 21 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan hubungan spasisi. 22 Pemeriksaan vientasi topografi. 23 Pemeriksaan vientasi topografi. 24 Pemeriksaan vientasi topografi. 25 Pemeriksaan vientasi topografi. 26 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 27 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 28 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 32 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 33 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 34 Pemeriksaan vientasi si bilateral penunjang okupasional 35 Pemeriksaan vientasi si bilateral penunjang okupasional 36 Pemeriksaan vientasi si bilateral penunjang okupasional 37 Pemeriksaan vientasi si bilateral penunjang okupasional 38 Pemeriksaan vientasi si bilateral penunjang okupasional 39 Pemeriksaan vientasi si bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan vientasi si bilateral penunjang okupasional 31 Pemeriksaan vientasi si bilateral penunjang okupasional 32 Pemeriksaan rentang atensi 33 Pemeriksaan rentang atensi 34 Pemeriksaan rentang atensi 35 Pemeriksaan rentang atensi 36 Pemeriksaan koteponisisi 37 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 38 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 39 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 40 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 41 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 42 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 43 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Menentukan tujuan terapi berbasis k			
16 Pemeriksaan konstansi bentuk. 17 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan Visual-Closure. 19 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan hubungan spasiai. 22 Pemeriksaan nubungan spasiai. 23 Pemeriksaan nersepsi pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 24 Pemeriksaan neritasi topografi. 25 Pemeriksaan neritasi topografi. 26 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 27 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 28 Pemeriksaan nenyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 29 Pemeriksaan nenyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 29 Pemeriksaan interjasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 32 Pemeriksaan interjasi bilateral penunjang okupasional 33 Pemeriksaan rortalisa penunjang okupasional 34 Pemeriksaan rortalisa penunjang okupasional 36 Pemeriksaan rortalisa penunjang okupasional 37 Pemeriksaan rortalisa perak halus/dexteritas 38 Pemeriksaan rortalisa perak halus/dexteritas 39 Pemeriksaan rortalisa perak halus/dexteritas 30 Pemeriksaan rentang atensi 31 Pemeriksaan rentang atensi 32 Pemeriksaan rentang atensi 33 Pemeriksaan rentang atensi 34 Pemeriksaan kategorisasi 46 Pemeriksaan kategorisasi 47 Pemeriksaan kategorisasi 48 Pemeriksaan kategorisasi 49 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 41 Pemeriksaan kategorisasi perakademik 41 Pemeriksaan kategorisasi perakademik 42 Pemeriksaan kategorisasi perakademik 43 Pemeriksaan kategorisasi perakademik 44 Pemeriksaan kategorisasi perakademik 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional		_	
18 Pemeriksaan posisi dalam ruang 18 Pemeriksaan visual-Closure. 19 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 21 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan ohubungan spasial. 22 Pemeriksaan hubungan spasial. 23 Pemeriksaan ohubungan spasial. 24 Pemeriksaan ohubungan spasial. 25 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 26 Pemeriksaan nelves penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 32 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 33 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 36 Pemeriksaan integrasi visual motor 37 Pemeriksaan recognisi 38 Pemeriksaan recognisi 39 Pemeriksaan recognisi 39 Pemeriksaan rentang atensi 39 Pemeriksaan rentang atensi 39 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 42 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 43 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional		_	
18 Pemeriksaan Visual-Closure. 19 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang. 20 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan hubungan spasial. 22 Pemeriksaan orientasi topografi. 23 Pemeriksaan orientasi topografi. 24 Pemeriksaan orientasi topografi. 25 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 26 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 27 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 28 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 31 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 32 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan integrasi visual motor 35 Pemeriksaan integrasi visual motor 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan rentang atensi 38 Pemeriksaan rentang atensi 39 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 44 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 45 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 46 Penegakan kinerja peran 47 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional		_	
20 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak. 21 Pemeriksaan hubungan spasial. 22 Pemeriksaan hubungan spasial. 23 Pemeriksaan biomekanik penunjang okupasional 24 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 25 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 26 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 29 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 30 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 32 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 33 Pemeriksaan soordinasi gerak halus/dexteritas 34 Pemeriksaan okordinasi gerak halus/dexteritas 35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan recognisi 37 Pemeriksaan rentang atensi 38 Pemeriksaan rentang atensi 39 Pemeriksaan memori 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 41 Pemeriksaan kontrol gerah penunjang okupasional 42 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 43 Pemeriksaan kinerja peran 44 Pemeriksaan kinerja peran 45 Pemeriksaan kinerja peran 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional			·
21 Pemeriksaan hubungan spasial. 22 Pemeriksaan orientasi topografi. 23 Pemeriksaan biomekanik penunjang okupasional 24 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 25 Pemeriksaan relfex penunjang okupasional 26 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 27 Pemeriksaan okordinasi motorik kasar penunjang okupasional 28 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 32 Pemeriksaan integrasi visual motor 33 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 36 Pemeriksaan reodinasi gerak halus/dexteritas 37 Pemeriksaan reodinasi gerak halus/dexteritas 38 Pemeriksaan reodinasi gerak halus/dexteritas 39 Pemeriksaan reodinasi 30 Pemeriksaan rentang atensi 31 Pemeriksaan rentang atensi 32 Pemeriksaan rentang atensi 33 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan katerampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 42 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 43 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identrifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional			
22 Pemeriksaan orientasi topografi. 23 Pemeriksaan biomekanik penunjang okupasional 24 Pemeriksaan nellex penunjang okupasional 25 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 26 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan praksis 32 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan rentang atensi 35 Pemeriksaan rentang atensi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan rentang atensi 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 42 Pemeriksaan konsep diri 43 Pemeriksaan konsep diri 44 Pemeriksaan konsep diri 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
23 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 24 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 25 Pemeriksaan relex penunjang okupasional 26 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan raksis 32 Pemeriksaan raksis 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan orientasi 35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan recognisi 37 Pemeriksaan recognisi 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 41 Pemeriksaan kategorisasi 42 Pemeriksaan kategorisasi 43 Pemeriksaan kategorisasi 44 Pemeriksaan kategorisasi 45 Pemeriksaan kategorisasi 46 Pemeriksaan kategorisasi 47 Pemeriksaan kategorisasi 48 Pemeriksaan konsep diri 49 Pemeriksaan konsep diri 40 Pemeriksaan konsep diri 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan konsep diri 43 Pemeriksaan konsep diri 44 Pemeriksaan konsep diri 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 48 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
24 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional 25 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 26 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 32 Pemeriksaan renksis 33 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 34 Pemeriksaan rentasi 35 Pemeriksaan rentang atensi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan rentang atensi 38 Pemeriksaan rentang atensi 39 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 41 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan katenan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 48 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
25 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional 26 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan praksis 32 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan reintasi 35 Pemeriksaan reotang atensi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 42 Pemeriksaan keterampilan peran 43 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
26 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional 27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional 28 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan praksis 32 Pemeriksaan rordinasi gerak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan orientasi 35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan recognisi 37 Pemeriksaan rentang atensi 38 Pemeriksaan nemori 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan kinerja peran 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
28 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional 29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan praksis 32 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan recognisi 35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan rentang atensi 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 41 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional			
29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional 30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan praksis 32 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan orientasi 35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan sekuensis 40 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan konsep diri 43 Pemeriksaan konsep diri 44 Pemeriksaan konsep diri 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan trujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 48 Menentukan trujuan area kinerja okupasional		27	Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional
30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional 31 Pemeriksaan praksis 32 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan orientasi 35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan kategorisasi 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan partisipasi sosial 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan hinerja peran 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
31 Pemeriksaan praksis 32 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan orientasi 35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan sekuensis 40 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
32 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas 33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan orientasi 35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan sekuensis 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan kinerja peran 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
33 Pemeriksaan integrasi visual motor 34 Pemeriksaan orientasi 35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan interja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan partisipasi sosial 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional		_	
35 Pemeriksaan recognisi 36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
36 Pemeriksaan rentang atensi 37 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
37 Pemeriksaan memori 38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
38 Pemeriksaan sekuensis 39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
39 Pemeriksaan kategorisasi 40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik 41 Pemeriksaan konsep diri 42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional		_	
42 Pemeriksaan kinerja peran 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
 43 Pemeriksaan partisipasi sosial 44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional 		41	Pemeriksaan konsep diri
44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
 45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional 			
 46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional 			
 47 Menentukan prognosis fungsional 48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional 			
48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional 49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional			
50 Menentukan tujuan area kinerja okupasional		_	
51 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan sensomotorik penunjang okupasional			
52 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan integrasi sensori			
53 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi pemrosesan persepsi penunjang okupasional 54 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan biomekanik penunjang okupasional			
55 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan neuromuskular penunjang okupasional			
56 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan integrasi kognitif penunjang okupasional			
57 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi psikososial penunjang okupasional			
58 Penerapan teknologi dan alat bantu fungsional.			
59 Menyusun laporan hasil pemeriksaan			
60 Menyusun Laporan kemajuan intervensi			
61 Menyusun Laporan penghentian/kelanjutan terapi 62 Membuat laporan dan dokumentasi diagnosis okupasi terapi			
63 Melakukan komunikasi terapeutik terapi okupasional			
64 Memberikan edukasi dan informasi terapi okupasional			
175 Operator Alat Berat Kompetensi Umum:	175 Operator Alat Berat	<u> </u>	
1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum		1	
2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pengoperasian Alat Berat		2	
Kompetensi Khusus:			
Pengoperasian Alat Berat		<u> </u>	rengoperasian Alat Berat

Halaman 40 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
176	Operator Layanan Kesehatan		Kemampuan Umum:
			Permenkes Nomor 27 Tahun 2017
			Permenkes Nomor 71 Tahun 2015
			Permenkes Nomor 45 Tahun 2014
			Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Ttg Kesehatan
			Bentuk Pelayanan Primer Menurut UU Kesehatan
	•		Ciri Fasyankes Utama menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2023
	•		Peran Dan Fungsi BPJS Alva Britishan BBJS
			Alur Rujukan BPJS
			Menyebutkan Jenis-Jenis Rujukan Kesehatan
	•		Jenis Layanan Kesehatan Di Rumah Sakit Tipe A Peraturan Perundangan Tentang ASN
			Karakteristik ASN
			Kode Etik ASN
			Hak Dan Kewajiban ASN
			Konsep Penegakan Dispilin
			Nilai Dasar ASN
			Larangan Bagi PNS
			Jenis Hukuman Disiplin Bagi PNS Yang Melanggar Aturan
			Mencegah korupsi/menolak gratifikasi/penyuapan
		20	Tindakan yang termasuk korupsi/gratifikasi di RS
			Jenis-jenis korupsi
			Kemampuan Khusus:
		1	Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
			Standard precautions for the prevention and control of infections 2022 Permenkes Nomor 27 Tahun 2017
			Permenkes Nomor 45 Tahun 2014
			Permenkes Nomor 27 Tahun 2017
		5	Buku Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru 15 Apr 2021
		6	Management of needlestick injuries and exposures to blood and high-risk body fluids, NHS GG&C Clinical Guideline / Permenkes Nomor 27 Tahun 2017
		7	Permenkes Nomor 66 Tahun 2016
		8	Permen LH Nomor 14 Tahun 2013
		9	Permen LHK Nomor P.12 Tahun 2020
		10	Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 / Occupational health and safety risks in the healthcare sector, European Union, 2011
			Pengertian Komunikasi Efektif Pasien - Petugas
			Ciri Komunikasi Efektif Antara Pasien – Petugas Kesehatan
			Teknik Komunikasi Pada Pasien Baru
			Komunikasi Non Verbal Pada Pasien
	•		Tahapan Komunikasi Petugas -Pasien
			Teknik Komunikasi Dengan Atasan/Pimpinan
			Cara Meminta Maaf Kepada Pasien Atau Pimpinan Teknik Pemberian Informasi Umum RS Kepada Pasien Dan Keluarga
	•		Hambatan/Kendala Dalam Berkomunikasi
			Hak -Hak Pasien Di RS
			Kewajiban Petugas Kesehatan Di Yankes
			Pengertian Pelayanan Prima Di RS
			Tujuan Pelayanan Prima/Service Excellent
			Manfaat Pelayanan Prima Bagi Yankes
			Unsur/ Komponen Pokok Dalam Pelayanan Prima
			Upaya Pelayanan Prima Yang Di Lakukan RS
			Pengertian Sikap Caring Yang Harus Dimiliki Tenaga Kesehatan
			Perilaku Caring Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan
			Manfaat perilaku caring terhadap pasien dan petugas kesehatan
		30	Hubungan Antara Menjaga Penampilan Dan Pelayanan Prima
			Cara Membina Hubungan Baik Dengan Pasien
			Sikap Positif Dalam Menghadapi Pasien Dan Tenaga Kesehatan Lain
			Cara/ Teknik Menjaga Emosi/ Performance Saat Menghadapi Pasien Yang Komplain
			Sikap Dan Perilaku Yang Sesuai Dengan Prinsip Pokok Dalam Pelayanan Prima Perbedaan Antara Pelayanan Barang Dan Jasa
			Upaya Yang Dapat Dilakukan Petugas Untuk Meningkatkan Layanan
177	Operator Sistem Informasi		Pengetahuan Umum:
	Administrasi Kependudukan Terampil	1	Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
		2	Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
		3	Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
		-1	Pengetahuan Khusus: Materi khusus terkait Administrasi Kopondudukan yang bersifat khusus
			Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
			Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator SIAK
170	Ortotis Prostetis Terampil		
1/0	Onous Frostetis Terampii		Kemampuan Umum:

Halaman 41 dari 103

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
	<u> </u>	Pengetahuan tentang patologi Cerebral Palsy
		Pengetahuan tentang patologi Stroke
		Pengetahuan tentang patologi Polio, CTEV dan congenital disease lainnya
	-	Pengetahuan tentang patologi Diabetes Patologi pada spinal ortotik
		Pengetahuan terkait amputasi pada ekstremitas bawah
		Pengetahuan terkait amputasi pada ekstremitas atas
		Pengetahuan dasar terkait material dan bahan pembuatan prostesis ortosis
		Pengetahuan dasar komponen ortosis
		Pengetahuan dasar komponen prostesis
		1 Pengetahuan anatomi tulang ekstremitas atas
		Pengetahuan anatomi tulang ekstremitas bawah
	l l	Pengetahuan anatomi tulang area spinal/tulang belakang Pengetahuan anatomi otot ekstremitas atas
	-	5 Pengetahuan anatomi otot ekstremitas atas
	-	6 Pengetahuan anatomi persendian pada tubuh manusia
	la contraction de la contracti	Pengetahuan mengenai peralatan, mesin, dan prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
	1	8 Pengetahuan konsep dasar Biomekanik
		Kemampuan Khusus:
		Asesmen (subjektif dan objektif) FO
		Penentuan Preskripsi FO
1	-	Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) FO Proses rektifikasi FO
1		Proses fabrikasi FO
J		Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) FO
	-	Asesmen (subjektif dan objektif) AFO
1	l l	Penentuan Preskripsi AFO
1		Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) AFO
	l l	0 Proses rektifikasi AFO
	la contraction de la contracti	1 Proses fabrikasi AFO
		Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) AFO Asesmen (subjektif dan objektif) KO/HO/KAFO/HKAFO
		4 Penentuan Preskripsi KO/HO/KAFO/HKAFO
	la contraction de la contracti	Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) KO/HO/KAFO/HKAFO
	<u> </u>	6 Proses rektifikasi KO/HO/KAFO/HKAFO
		7 Proses fabrikasi KO/HO/KAFO/HKAFO
		8 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) KO/HO/KAFO/HKAFO
	la contraction de la contracti	9 Asesmen (subjektif dan objektif) ULO 0 Penentuan Preskripsi ULO
		Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) ULO
		2 Proses rektifikasi ULO
		3 Proses fabrikasi ULO
		Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) ULO
		5 Asesmen (subjektif dan objektif) SO 6 Penentuan Preskripsi SO
	<u> </u>	7 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) SO
	<u> </u>	8 Proses fabrikasi SO
		9 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) SO
		0 Asesmen (subjektif dan objektif) HDP
		1 Penentuan Preskripsi HDP
1	<u> </u>	Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) HDP Asesmen (subjektif dan objektif) ADP
1	l l	4 Penentuan Preskripsi ADP
1	la contraction de la contracti	Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) ADP
		6 Proses rektifikasi ADP
1	la contraction de la contracti	7 Proses fabrikasi ADP
1		8 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) ADP
1		9 Asesmen (subjektif dan objektif) TTP
1		0 Penentuan Preskripsi TTP 1 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) TTP
		2 Proses rektifikasi TTP
	la contraction de la contracti	3 Proses fabrikasi TTP
J		Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) TTP
1		5 Asesmen (subjektif dan objektif) KDP
1		6 Penentuan Preskripsi KDP
- 1	la contraction de la contracti	7 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) KDP 8 Proses rektifikasi KDP
1		9 Proses fabrikasi KDP
		Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) KDP
1		1 Asesmen (subjektif dan objektif) TFP
1	<u> </u>	Penentuan Preskripsi TFP
1		3 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) TFP
	-	Proses rektifikasi TFP
	<u> </u>	5 Proses fabrikasi TFP 6 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) TFP
ı !	L	- 1 O A Gabaran ann ann an ann ann ann ann ann ann

Halaman 42 dari 103

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Asesmen (subjektif dan objektif) ULP Penentuan Preskripsi ULP
	•		Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) ULP
		60	Proses rektifikasi ULP
			Proses fabrikasi ULP
170	Pamong Budaya Ahli Pertama	1	Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) ULP Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
173	Tamong budaya Amir ertama	2	Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		3	Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
			Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
	<u> </u>	5	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
		6	Tahun 2027 tentang Pemajuan Kebudayaan
			Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
			Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan
		9	Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
		10	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
		11	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
		12	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		13	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		14	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasinal Cagar Budaya
180	Pamong Budaya Terampil		Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		3	Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
			Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		6	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang Pemajuan Kebudayaan
		7	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		8	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
		9	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
		10	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
		11	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
		12	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		13	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		14	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasinal Cagar Budaya
181	Pamong Pemerintahan		Kemampuan Umum:
		2	Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
			Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
			Kemampuan Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
182	Paramedik Veteriner Pemula		Kompetensi Umum:
	<u> </u>		Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan Kompetensi Khusus:
		1	Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		2	Tatacara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
100	Daramadik Votania - 17 19	3	Identifikasi status reproduksi dan penanganan reproduksi dan kebidanan pada hewan
183	Paramedik Veteriner Terampil		Kompetensi Umum: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
	ľ		Kompetensi Khusus:

Halaman 43 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		1	Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
			Tatacara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
101	Pawang Anjing Pelacak	3	Identifikasi status reproduksi dan penanganan reproduksi dan kebidanan pada hewan Kemampuan Umum:
104	rawang Anjing relacak	1	Pengetahuan umum tentang anjing
		2	Pengetahuan umum tentang kesehatan anjing
			Kemampuan Khusus:
			Pengetahuan umum tentang perawatan anjing
105	Pekerja Sosial Ahli Pertama	2	Pengetahuan khusus tentang bekerja dengan anjing Kompetensi Umum:
103	r ekerja 30siai Amii r ertama	1	Perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial
			Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi
			Kompetensi Khusus:
			Penyimpan bahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis terkait Manajemen Pekerjaan Sosial
			Analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis Penyusunan rancangan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial
			Penerapan layanan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
			Pemahaman konsep pembinaan dan pengawasan pekerja sosial
186	Pelatih dan Perawat Satwa Liar		Kemampuan Umum:
			UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE
			UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Permenhut 48/2008 tentang Penanganan Konflik Satwa Liar
			Permen LHK No 106/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
		5	PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
		6	Permen LHK No 22/2019 tentang LK
			UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN
		8	PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Kemampuan Khusus:
		1	Kesehatan satwa
		2	Feeding satwa
			Pemeliharaan satwa
			Kandang satwa
			Perawatan satwa Perilaku satwa
			Reproduksi
			Dokumentasi/pencatatan satwa
			Konflik manusia dengan satwa liar
			Populasi
			Habitat Penanganan satwa
			Pelepasliaran
		14	Pelatihan satwa
187	Pelatih Olahraga Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Pengetahuan tentang Olahraga
			UU Keolahragaan Tahun 2022 Permenpora Tahun 2023 DOD
			Perpres Tahun 2021 DBON
			Kemampuan Khusus:
			Faal dan Fisiologi Tubuh
			Identifikasi Psikologis Atlet
188	Pemadam Kebakaran Pemula	3	Ilmu Kepelatihan Olahraga Kompetensi Umum:
			Teori Segitiga Api
			Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		4	Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) Kompetensi Khusus:
		1	Rompetensi Knusus: Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Tali Temali dan Penyelamatan
		3	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK)
189	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli	-	Kompetensi Umum:
	Pertama		Hukum kesehatan dan perundangan K3 Etika dan Kode Etik Profesi
			Komunikasi K3
			Management Patient Safety
			Kompetensi Khusus:
		1	Surveilans Kesehatan Kerja
			Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Manajemen Risiko di Tempat Kerja
			Pembimbingan dan Pendampingan Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja
			Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pekerja dan Kemitraan
190	Pembina Industri Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian

Halaman 44 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		2	Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasiona
		_	Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)
		3	Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0 Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key
		4	Project
		5	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri
		6	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)
191	Pembina Jasa Konstruksi Ahli		Kompetensi Umum:
	Pertama		Manajemen Kontrak Konstruksi
		_	Manajemen Risiko Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kebijakan Publik
		_	Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
			Statistik Monev dan Pelaporan
		6	Manajemen Lingkungan Pekerjaan Konstruksi
		_	Kompetensi Khusus:
			Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi Pengembangan Kerjasama Jasa Konstruksi Strategis Di Dalam Dan Luar Negeri
			Manajemen Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi
			Manajemen Pengembangan Pasar Jasa Konstruksi
			Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi
			Manajemen Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi
			Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
			Manajemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi
			Manajemen Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi
		_	Manajemen Pengembangan Teknologi Konstruksi
			Manajemen Peningkatan Penggunaan Komponen Dalam Negeri Manajemen Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi
			Manajemen K3 Konstruksi
			Manajemen Penjaminan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi
		16	Manajemen Konstruksi Hijau
	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama		Kemampuan Umum: Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan
	r enkanan Anii r enama		Kemampuan Khusus:
		1	Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan
			Proses perumusan standar produk kelautan dan perikanan
			Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
			Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan Pengelolaan sarana dan prasrana hasil perikanan
193	Pemelihara Tumbuhan	Ľ	Kemampuan Umum:
,	Tomomara Tambanan		Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
Ì	Tonomaa Tunbalai	2	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990
	Tomornad Tomodian	3	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021
	Tollowing Tollowing	3 4	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019
		3 4	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021
		2 3 4 5	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif
		2 3 4 5 1 2	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
		2 3 4 5 1 2 3	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem
		2 3 4 5 1 2 3 4	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021
		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019
		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan
		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018
		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan
		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Tumbuhan Permen LHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Standar Nasional Indonesia Pengujiam Benih Tanaman Hutan
104		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Tumbuhan Permen LHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Standar Nasional Indonesia Pengujiam Benih Tanaman Hutan
194	Pemeriksa Ahli Pertama	2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Tumbuhan Permen LHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Standar Nasional Indonesia Pengujiam Benih Tanaman Hutan Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus:
194		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Tumbuhan Permen LHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Standar Nasional Indonesia Pengujiam Benih Tanaman Hutan
194		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Tumbuhan Permen LHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Standar Nasional Indonesia Pengujiam Benih Tanaman Hutan Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Proses Bisnis Pemerintah Pusat/KL
194		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-II/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Tumbuhan Permen LHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Standar Nasional Indonesia Pengujiam Benih Tanaman Hutan Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Proses Bisnis Pemerintah Pusat/KL
194		2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Janis Invasif Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Permenhut No. 48/Menhut-Il/2014 tentang Pemulihan Ekosistem Ilmu Biologi Dasar Permen LHK No. P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Permen LHK No. 23 Tahun 2021 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Pengantar Morfologi Tumbuhan Berbasis Lingkungan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Karantina Tumbuhan Permen LHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 Standar Nasional Indonesia Pengujiam Benih Tanaman Hutan Vademecum Kehutanan Indonesia 2020 Kemampuan Khusus: Proses Bisnis Pemerintah Pusat/KL Proses Bisnis Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan Keuangan Negara (UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU

Halaman 45 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

7 Standar Premerikasan Keurangan Negara (SPKN)	NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
9 Perpendian Data				Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
10 Auditing - Perspelaham Data Kemarapana Umum:				
Semantpular University Semantpular BPK Semantpular Perentissa				
1 Separah BPK 2 Lombago BPK 3 ASN BPK (Fungaional Pemerikaa) 4 Koote Eik kan Budaya IP (Integrias, Independensi dan Profesionalisme) 5 Sessara Indonesia dalam Pemyusunan Laporan 6 Doses Krounilada dalam Pemyusunan Laporan 7 Sessara Indonesia dalam Pemyusunan Laporan 7 Sessara Indonesia dalam Pemyusunan Laporan 7 Pemerikaa Declain Industri Asia 7 Pemerikaan Declain Industri Asia 7 Pemerikaan Declain Industri 3 Kestalikaat Locarno 3 Pemerikaan Declain Industri 3 Kestalikaat Locarno 4 Pergetinan umum terdang kekayaan Intelektual 5 Pergetinan umum terdang kekayaan Industri 3 Kestalikaat Locarno 7 Terliff's Agroement				
2 Lambaga BPK 3 ASIS BPK (Fingsional Pemeriksa) 4 Koo6 Etik dan Budaya IIP (Integritas, Independencia dan Profesionalisme) 5 Salasas Informacia dalam Provincia dalam (Pemeriksa)				
4 Kodo Elik dan Budaya IIP (Integritias, Integration can Protegionalismo)				
Separation Sep			3	ASN BPK (Fungsional Pemeriksa)
6 Dasar Komunikasi dalam Femerikasan 7 Meterolika Dasar 7 Meterolikasan 8 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Umum 8 Kemampaan Umum 1 Delinisi desain industri 1 Delinisi desain industri 2 Jukura pemerikasan desain industri 3 Kasalikasa Locarno 4 Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kenara Kerisanan Interestian Jukura Pemerintah Kerisanan Interestian Interestian				
Pemerikaa Desain Industri Ahii				
Separation Permerikan Desain Industri Ahil Remarquan Umum Definition desain industri				
Perfama				
Pertama 1 Definisi desani industri 2 Jukris pemeliksaan desani industri 3 Klasifikasi Locamo 4 Pengethuna umum tentang seni atau desani 6 Peratuma Pemerintah Norro T Tahun 2005 7 TRIPS Agreement 8 Undragn/Undang Norro T Tahun 2005 7 TRIPS Agreement 8 Undragn/Undang Norro T Tahun 2000 tentang Desani Industri 8 Undragn/Undang Norro ST Tahun 2000 tentang Desani Industri 8 Undragn/Undang Norro ST Tahun 2000 tentang Desani Industri 9 Undragn/Undang Norro ST Tahun 2000 tentang Desani Industri 9 Undragn/Undang Norro ST Tahun 2000 tentang Desani Industri 9 Undragn/Undang Norro ST Tahun 2000 tentang Desani Industri 9 Pengelahuan umum tentang kekayaan intelektual 8 Pengelahuan umum tentang seni atau desani 9 Pengelahuan umum ten	195	Pemeriksa Desain Industri Ahli	0	
Simple S			1	
Pengelahuan umum tentang Kekayaan Intelektual			2	Juknis pemeriksaan desain industri
S. Pengetahuan umum tentang seni atau desain 6 Peratruran Permeintan Momori 1 Tahun 2005 7 TRIPS Agreement 8 Undong-Undang Momor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 8 Mang-Undang Momor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 1 Definis desain industri 2 Juknis permeiksaan desain industri 3 Klasifikasi Locamo 4 Ketentuan terkati kejelasan dari kesatuan desain industri 5 Pengetahuan umum tentang kekayaan Intelektual 6 Pengetahuan umum tentang kekayaan Intelektual 6 Pengetahuan umum tentang seni atau desain 7 Peratruran Permeintah Momori 1 Tahun 2005 8 TRIPS Agreement 9 Undang-Undang Momori 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 1 Pengetahuan umum tentang seni atau desain 1 Pengetahuan umum tentang seni atau desain 2 Pengumpulan Bukit Digital 2 Pengumpulan Bukit Digital 2 Pengumpulan Bukit Digital 3 Analisis Data Digital 4 Penanganan dan Pelestarian Bukit Digital 5 Endripsi dari Forensik Digital 6 Penggunaan Alat Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi Degrasi 9 Permeik Bukit Meware 1 Permeik Bukit Meware 1 Permeik Bukit Meware 1 Permeik Bukit Meware 1 Permeik Membal Degrasi 1 Pengetahuan Umum 1 Pergetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Elitura Keimigrasian 4 Pengawaan dan Permeik Digital 5 Pengawaan dan Pendenik Digital 6 Pengawaan dan Pendenik Digital 6 Pengawaan dan Pendenik Digital 6 Pengawaan dan Pendenik Degrasi 6 Pengalawan Umum 1 Pengalahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian				
Peraturan Pemerintan Nomor I Tahun 2005				
Pemeriksa Forensik Digital				
B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Nemampuan Khusus:				
Nemarpuan Khusus: 1 Definisi desain industri				
1 Definisi desain industri 2 Jukris pemeriksaan desain industri 3 Klispilikasi Locamo 4 Keterlusn terkait kejelasan dan kesatuan desain industri 5 Pengetahuan umum tentang kekayaan Intelektual 6 Pengetahuan umum tentang kekayaan Intelektual 6 Pengetahuan umum tentang peri atau desain 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 8 TRIPS Agreement 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 1 Perinsip Dasag Forensik Digital 2 Pengampaten Bushi Digital 2 Pengampaten Bushi Digital 2 Pengampaten Bushi Digital 2 Pengampaten Bushi Digital 2 Pengampaten Bushi Digital 3 Analisis Data Digital 4 Penaraganan dan Pelestarian Bukhi Digital 5 Pengugnahan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penarak Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penarak Penaraganan Penaraganan Atai Forensik Digital 7 Penarak Penaraganan Penaraganan Penaraganan Penaraganan Penaraganan Penaraganan Atai Penarak Bigi Data Penarak Penaraganana				
2 Jukriis pemeriksaan desain industri				F
4 Ketentuan terkait kejelasan dan kesatuan desain industri				
5 Pengetahuan umum tentang seni atau desain 6 Pengetahuan umum tentang seni atau desain 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 8 TRIPES Agreement 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 1 Prinsip Dasas Forensik Digital 2 Pengumpulan Bukti Digital 3 Analisis Datab Digital 4 Penanganan dan Pelestarian Bukti Digital 5 Enkingsi dan Forensik Digital 8 Penanganan dan Pelestarian Bukti Digital 9 Penanganan dan Pelestarian Bukti Digital 1 Prinsip Dasas Forensik Digital 1 Pengumpanan Alat Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 9 Pemulihan Data yang Terhapus 1 Pemulihan Data yang Terhapus 1 Permasik Perangah Bergerak 1 Forensik Cinud 1 Analisis Malware 7 Forensik Cinud 1 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi datam Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 1 Pengawasan Digital (Analisis Jaringan dan Trafik Internet 1 Pengawasan Digital (Analisis Jaringan dan Trafik Internet 2 Peraturan Kemingasian 3 Reingasian 4 Pengawasan Digital (Anaman Internet) 5 Pengawasan Digital (Anaman Internet) 5 Pengawasan Digital (Anaman Internet) 5 Pengawasan Digital (Anaman Internet) 5 Pengawasan Digital (Anaman Internet) 5 Pengawasan Digital (Anaman Internet) 5 Pengawasan Digital (Anaman Internet) 5 Pengawasan Digital (Anaman Internet) 5 Pengawasan Digital (Anaman Internet) 5 Pengawasan Di				
Femeriksa Forensik Digital				
Pemeriksa Forensik Digital Pemeriksa Forensik Digital Pemeriksa Forensik Digital Pemeriksa Forensik Digital Pemeriksa Forensik Digital Pengupuan Umum: Pengusan Jugital Pengupuan Bukit Digital Pengupuan Bukit Digital Pengupuan Bukit Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pemerik Digital Pengupan Pe				
StripPS Agreement 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 1 Prinsip Dasar Forensik Digital 2 Pergumpulan Bukti Digital 3 Analisis Data Digital 4 Penanganan dan Pelestarian Bukti Digital 4 Penanganan dan Pelestarian Bukti Digital 5 Enkripsi dan Forensik Digital 8 Enkripsi dan Forensik Digital 8 Hukum dan Repulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Repulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Repulasi yang Terhapus 2 Keamanan Jaringan dan Forensik 3 Forensik Sistem Operasi 4 Forensik Perangkat Bergerak 5 Forensik Resident 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi dalam Forensik Digital 8 Forensik Remail 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 12 Forensik Media Sosial 12 Forensik Analisis Bilg Data 14 Forensik Media Can Janalisis Bilg Data 14 Forensik Media Can Janalisis Bilg Data 14 Forensik Media Can Log Analisis 20 Simulasi Sig Data 15 Forensik Bokechain dan Corphotournery 18 Pengamaan Aldan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 2 Peraturan Kelmigrasian 2 Peraturan Kelmigrasian 3 Intellien Keimigrasian 4 Izin Tinggal Kelmigrasian 6 Izialu Lintas Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Feknologi In				
9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Kemampuan Humm: 1 Prinsip Dasar Forensik Digital 2 Pengumpulan Bukti Digital 3 Analisis Data Digital 4 Penanganan dan Pelestarian Bukti Digital 5 Enkripsi dan Forensik 6 Penggunaan Alai Forensik Digital 7 Etika dalam Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 9 Forensik Berlaku Defarasi 1 Pemulihan Data yang Terhapus 2 Keamanan Jaringan dan Forensik 3 Forensik Steme Operasi 4 Forensik Perangkat Bergerak 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat IoT (Internet of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Pengaman Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 21 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Kelmigrasian 22 Kermampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Kelmigrasian 3 Intelijen Kelmigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Kenlogig Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
Remarpuan Umum: 1				
1 Prinsip Dasar Forensik Digital 2 Pengumpulan Bukit Digital 3 Analisis Data Digital 4 Penanganan dan Pelestarian Bukit Digital 5 Enkripsi dan Forensik 6 Pengumaan Alat Forensik Digital 7 Elika dalam Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Kernampuan Khusus: 1 Pemulihan Data yang Terhapus 2 Keamanan Jaringan dan Forensik 3 Forensik Sistem Operasi 4 Forensik Derasis 4 Forensik Perangkat Bergerak 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Sistemal 10 Pengawasan Digital dan Forensik 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Pengunan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Peraturan Kelmigrasian 19 Peraturan Kelmigrasian 19 Peraturan Kelmigrasian 19 Peraturan Kelmigrasian 19 Peraturan Kelmigrasian 19 Pengawasan dan Penindakan Kelmigrasian 2 Lalu Lintas Kelmigrasian 3 Intelijen Kelmigrasian 4 Lint Tinggal Kelmigrasian 5 Kegasama Kelmigrasian 6 Lalu Lintas Kelmigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Kelmigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Kelmigrasian	196	Pemeriksa Forensik Digital		
2 Pengumpulan Bukti Digital 3 Analisis Data Digital 4 Penanganan dan Pelestarian Bukti Digital 5 Enkripsi dan Forensik 6 Penggunan Alat Forensik Digital 7 Elika dalam Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital (Kemampuan Khusus: 1 Pemulihan Data yang Terhapus 2 Keamanan Jaringan dan Forensik 3 Forensik Sistem Operasi 4 Forensik Perangkat Bergerak 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Cloud 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Forensik Perangkat Bergerak 11 Kepatuhan dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat I Til (Internet of Things) 16 Analisis Jaringan dan Tratik Internet 17 Forensik Biockchain dan Cryptocurrecy 18 Pengenanan Al dan Machrine Learning dalam Forensik Digital 19 Pengenanan Al dan Machrine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 1 Kemampuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 1 Keriasama Keimigrasian 2 Intelijan Keimigrasian 3 Intelijan Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian		9		
4 Penanganan dan Pelestarian Bukti Digital 5 Enkripsi dan Forensik 6 Penggunaan Alat Forensik Digital 7 Elika dalam Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital 8 Kemampuan Khusus: 1 Pemulihan Data yang Terhapus 2 Keamanan Jaringan dan Forensik 3 Forensik Sistem Operasi 4 Forensik Perangkat Bergerak 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kirjtografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalam Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat LoT (Internert of Things) 16 Analisis Janingan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockhain dan Crybocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Anaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 1 Pengetahuan Umum: 2 Peraturan Keimigrasian 4 Kemampuan Umum: 2 Peraturan Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
S. Elnkripsi dan Forensik				
6 Penggunaan Alat Forensik Digital 7 Etika dalam Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital Kemampuan Khusus: 1 Pemulihan Data yang Terhapus 2 Keamanan Jaringan dan Forensik 3 Forensik Sistem Operasi 4 Forensik Sistem Operasi 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptograff dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Redia Onalisis 15 Forensik Redia Onalisis 15 Forensik Blockchain dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Pemeriksa Keimigrasian Pemula 19 Peraturan Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
7 Etika dalam Forensik Digital 8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital Kemampuan Khusus: 1 Pemulihan Data yang Terhapus 2 Keamanan Jaringan dan Forensik 3 Forensik Sistem Operasi 4 Forensik Perangkat Bergerak 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat Io' (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 4 Izi Tinggal Keimigrasian 4 Izi Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 4 Izi Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Pennidakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital Kemampuan Khusus: 1 Pemulihan Data yang Terhapus 2 Keamann Jaringan dan Forensik 3 Forensik Sistem Operasi 4 Forensik Pisrangkat Bergerak 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat loT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Anaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Pemeriksa Keimigrasian Pemula 19 Pemeriksa Keimigrasian Pemula 19 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 10 Kemampuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 11 Izin Tinggal Keimigrasian 12 Izin Tinggal Keimigrasian 13 Intelijen Keimigrasian 14 Izin Tinggal Keimigrasian 15 Kerjasama Keimigrasian 16 Lalu Lintas Keimigrasian 17 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 18 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
Kemampuan Khusus: 1				
1 Pemulihan Data yang Terhapus 2 Keamanan Jaringan dan Forensik 3 Forensik Sistem Operasi 4 Forensik Perangkat Bergerak 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat loT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurreny 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 21 Pergeturan Keimigrasian 22 Peraturan Keimigrasian 33 Intellijen Keimigrasian 44 Izin Tinggal Keimigrasian 55 Kerjasama Keimigrasian 66 Lalu Lintas Keimigrasian 67 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 68 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 78 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 88 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
3 Forensik Sistem Operasi 4 Forensik Perangkat Bergerak 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kribograff dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat lof (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
4 Forensik Perangkat Bergerak 5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat loT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
5 Forensik Cloud 6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kriptograff dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat loT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelija Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
6 Analisis Malware 7 Forensik Media Sosial 8 Kirptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat IoT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Pengetahuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 1 Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izir Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
7 Forensik Media Sosial 8 Kriptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat IoT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
8 Kriptografi dalam Forensik Digital 9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Web dan Log Analisis 16 Forensik Perangkat lof (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 1 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
9 Forensik Email 10 Pengawasan Digital dan Forensik Digital 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat IoT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 14 Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 10 Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 10 Kemampuan Keimigrasian 11 Kemampuan Keimigrasian 12 Izin Tinggal Keimigrasian 13 Intelijen Keimigrasian 14 Izin Tinggal Keimigrasian 15 Kerjasama Keimigrasian 16 Lalu Lintas Keimigrasian 17 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 18 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
10 Pengawasan Digital dan Forensik 11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis Big Data 15 Forensik Perangkat loT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 2 Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital 12 Forensik Gambar dan Video Digital 13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Web dan Log Analisis 16 Forensik Perangkat loT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital 19 Remeriksa Keimigrasian Pemula 19 Pemeriksa Keimigrasian Pemula 10 Pengetahuan Umum 11 Pengetahuan Umum 12 Peraturan Keimigrasian 13 Intelijen Keimigrasian 14 Izin Tinggal Keimigrasian 15 Kerjasama Keimigrasian 16 Lalu Lintas Keimigrasian 17 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 18 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data 14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat IoT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan AI dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 6 Kerjasama Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian			11	Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital
14 Forensik Web dan Log Analisis 15 Forensik Perangkat IoT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan AI dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				0
15 Forensik Perangkat IoT (Internert of Things) 16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan AI dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intellijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet 17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency 18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
18 Penggunaan Al dan Machine Learning dalam Forensik Digital 19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
19 Ancaman Internal dan Investigasi 20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				· · ·
1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
2 Peraturan Keimigrasian Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	197	Pemeriksa Keimigrasian Pemula		
Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
1 Pengetahuan Umum 2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
2 Peraturan Keimigrasian 3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
3 Intelijen Keimigrasian 4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
4 Izin Tinggal Keimigrasian 5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
5 Kerjasama Keimigrasian 6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
6 Lalu Lintas Keimigrasian 7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				
Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian			6	Lalu Lintas Keimigrasian
198 Pemeriksa Paten Ahli Pertama Kemampuan Umum:	400	D " D A A " D .	8	
	198	remeriksa Paten Ahli Pertama		remampuan umum:

Halaman 46 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Sejarah, pengenalan dan perjanjian internasional mengenai paten
		2	Paten dan kaitannya dengan kekayaan intelektual secara umum
		1	Kemampuan Khusus: Definisi-definisi terkait dengan sistem paten di Indonesia
		2	Lingkup perlindungan paten
			Permohonan paten
		4	Publikasi paten
			Pemeriksaan substantif
			Komisi banding dan permohonan banding
			Pengalihan hak, lisensi dan paten sebagai objek jaminan fidusia Paten sederhana (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023)
			Biaya tahunan paten
			Penghapusan paten
		11	Penyelesaian sengketa
199	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Pertama	1	Penanganan laporan dan penyusunan kertas kerja serta konsultasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/pengawasan/audit di bidang perdagangan berjangka komoditi/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas
		2	Analisis data dan dokumen serta pemberian layanan informasi terkait pengaturan perdagangan berjangka komoditi/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas
		3	Penyajian data dan informasi serta identifikasi terkait pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas
		4	Analisis pelaksanaan fasilitasi substansi perdagangan berjangka komoditi/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas
200	Pemeriksa Perlindungan Varietas		Kompetensi Umum:
	Tanaman Ahli Pertama	2	Pertanian umum Agranomi
			Agronomi Dasar pemuliaan
			UU PVT dan Permentan 25/2021
			Sistem pelepasan varietas tanaman
			Biologi
		7	Taksonomi tumbuhan
		4	Kompetensi Khusus:
			Pemuliaan dan ilmu genetika tanaman lanjutan Fisiologi tumbuhan
			Statistik
			Morfologi tanaman
		5	Ilmu HPT
		6	llmu tanah
001	Donata Arratasi Abli Dontona	7	Permentan No. 29 Tahun 2021
201	Penata Anestesi Ahli Pertama	1	Kemampuan Umum: Peraturan tentang etik legal dan keselamatan pasien
			Peraturan terkait pengembangan diri dan profesionalisme
		3	Peraturan terkait komunikasi efektif
		4	Peraturan terkait dengan Landasan ilmu biomedik, anestesiologi dan instrumentasi
		_	Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi
		2	Peraturan terkait dengan Tatalaksanan Obat, Gas, Mesin dan Peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan Pra, Intra, Pasca anestesi
		3	Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan anestesi pada Kegawatdaruratan dan bencana
202	Penata Bangunan Gedung dan		Kompetensi Umum:
	Permukiman	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		4	Kompetensi Khusus:
			Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Bangunan Gedung
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
			Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
203	Penata Kadastral Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		2	Dasar Pertanahan Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Kemampuan Khusus:
		1	Pemetaan Pemetaan
		2	Pengukuran Bidang Tanah
		3	Survei Pertanahan
204	Penata Kehakiman Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Pengetahuan Dasar Hukum dan Peran Fungsi Komisi Yudisial Kemampuan Khusus:
		1	Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
		2	Peningkatan Kapasitas Hakim
		3	Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
		4	Pemetaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Halaman 47 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Penelusuran Rekam Jejak Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
			Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
205	Penata Kelola Bangunan Gedung dan	7	Penyelenggaraab Persidangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kompetensi Umum:
200	Kawasan Permukiman Ahli Pertama		Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan
		1	Permukiman
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan
			Permukiman
		_	Kompetensi Khusus:
	-		Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Bangunan Gedung
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
			Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
206	Penata Kelola Hukum dan Perundang		Kemampuan Umum:
	Undangan		Pengantar Ilmu Hukum
			Konsensus Kebangsaan Pengantar Filsafat Hukum
			Teori Hukum
		т.	Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
		2	Data dan bahan terkait penyusunan telaahan di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
		3	Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan
			Perundang-Undangan
207	Ponata Kolola, lalan dan Jambatan	4	Data dan bahan terkait evaluasi di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
207	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	1	Kompetensi Umum: Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan
	7 iiii 1 ortama		Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan
		2	Jembatan
			Kompetensi Khusus:
			Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan
			Pelaksanaan Konstruksi Jalan
			Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan
			Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan Lingkungan dan Keselamatan Jalan
			Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial
			Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan
			Pengoperasian Lalu Lintas
		9	Bahan Uji Mutu
208	Penata Kelola Kelautan dan		Kemampuan Umum:
	Perikanan		Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap Kemampuan Khusus:
		1	Jenis Ikan, Biologi Perairan, Statistik Perikanan dan Daerah Penangkapan Ikan
			Rancang bangun kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan Metode Penangkapan Ikan
		3	Melaksanakan tata kelola pengawakan kapal perikanan
			Permesinan kapal perikanan, alat bantu penangkapan ikan, dan tingkah laku ikan
			Tambat Labuh, radio komunikasi, pemanduan kapal perikanan
209	Penata Kelola Layanan Kesehatan		Kompetensi Umum:
	-		UU No 20 tahun 2023 tentang ASN UU Kesehatan no 17 tahun 2023
	ŀ	۷	Kompetensi Khusus:
	ŀ	1	Pedoman K3
	ļ		Prinsip Komunikasi
		_	Pedoman Promosi Kesehatan
010	Darrata Kalala Obaz I AA I	4	Konsep Pelayanan Prima dalam layanan kesehatan
210	Penata Kelola Obat dan Makanan	1	Kompetensi Umum: Sistem informasi dan teknologi
	ŀ		Sistem informasi dan teknologi Manajemen mutu
	ŀ		Peraturan obat dan makanan
	ļ		Komunikasi risiko terkait obat dan makanan
			Visi Misi BPOM/Budaya Kerja BPOM
			Kompetensi Khusus:
			Pengawasan dan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
	-		Pemeriksaan sarana produksi tingkat dasar Pemeriksaan sarana distribusi tingkat dasar
	-		Pemeriksaan sarana distribusi tingkat dasar Pengambilan contoh
			Pengawasan penandaan obat dan makanan
			Analisa/evaluasi permohonan surat keterangan impor/ekspor/API-PI/IPB2 obat dan makanan atau analisa
		6	hasil pengawasan narkotik, psikotropik dan prekursor
		7	Pemeriksaan penerapan farmakovigilans di industri farmasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh industri
	ļ		farmasi untuk melaksanakan farmakovigilan tingkat dasar
			Pengawasan periklanan dan promosi setelah beredar
	-		Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi tingkat dasar Verifikasi produk kosmetik tingkat dasar
	ŀ		Penilaian terhadap berkas permohonan pendaftaran pangan olahan tingkat dasar
	L		

Halaman 48 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

12 Pergulan brotis cost date mulastania.	NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
Temperature February Februa				Pengujian kimia obat dan makanan
Separation February Separation Separ				0, 0
Persutak Kelola Pemberdayaan				, ,
Perusta Kelola Pemberdayaan Remyuandan Anak Competende Luman: Competende Luman: Competende Luman: Competende Compet				
214 Persata Kelola Pemberdayaan Rempendent Umum: Celojakan sterial tesestaturan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan nanak Celojakan sterial tesestaturan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan Celojakan sterial tesestaturan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan Celojakan sterial tesestaturan perdentungan perempuan dan anak Celojakan sterial tesestaturan perdentungan perempuan dan anak Celojakan sterial sterial tesestaturan perdentungan perempuan dan anak Celojakan sterial sterial tesestaturan perdentungan perempuan dan anak Celojakan sterial sterial tesestaturan perdentungan perempuan dan anak Celojakan sterial sterial tesestaturan perdentungan perempuan dan anak Celojakan sterial ster				
Perempuan dan Perlindungan Anak Konjalasan terkait kesetaraan gender, pembedayaan perempuan dan perindungan parak Konjalasan terkait kesetaraan gender, pembedayaan dan perindungan perempuan Konjalasan terkait kesetaraan gender, pembedayaan dan perindungan perempuan Konjalasan terkait starafara kayanan perindungan perempuan Konjalasan terkait starafara kayanan perindungan perempuan dan anak Konjalasan terkait starafara kayanan perindungan perempuan dan anak Konjalasan terkait starafara kayanan perindungan perempuan dan anak Konjalasan dan Undang Dalasar 1945 Perasasan dan Undang Lahara perasan perindungan perempuan dan anak Konjalasan perasan n	211	Penata Kelola Pemberdayaan	10	
Robiplant terhal keselaraan gender, pembedayaan dan perindungan perempuan		•		Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Excipional technic pedindungan kitusus anak dan pemenunah hak anak			1	
Penata Kelola Pemerintahan				
Pancasila dan Undang-Undang Desar 1945 2 Anals Kebigikan pemerintah terhadap perkenomian negara 3 Perencamaan negara guna mempenyuat ketaharana kenomis sosial dan budaya 4 Kemampuan Khusus: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serat urunannya 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemawayarakutan 3 Perencamaan negara guna mempenyuat ketaharana kehomis, sosial dan budaya 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemawayarakutan 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Percentahan Padagan Dudang Nomor 17 Tahun 2014 4 Indrang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Percentahan Rakyat, Dewah Perwekilah Perwekilah Rakyat, Dewah Perwekilah Rakyat, Dewah Perwekilah Rakyat, Dewah Perwekilah Rakyat, Dewah Perwekilah Rakyat, Dewah Perwekilah Rakyat, Dewah Perwekilah Rakyat, Dewah Perwekilah Rakya			3	
Penata Kelola Penanaman Modal	212	Penata Kelola Pemerintahan	1	
Perata Kelola Pemilihan Umum Ahii Talian Perata Talian P				
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta turunennya				
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatanan				
Pernata Kelola Pemilihan Umum Ahli				
1				
Dewan Perwisklian Bakyat Dearch				
1 Sejarah Pemilud indonesia			4	
Pertama 2 Sistem Pemilu dan Pikada 3 Peatki Remilu di Indonesia 4 Siruktur Organisasi 5 Kewenangan 6 Elik 7 Policy maker dan implementator 8 Kewaliban KPU (Romisioner) 9 Tugas dan Fungal Kesekretariatan 10 Perencanaan kouangan dan anggaran 11 Tahapan pelaksanaan anggaran 11 Tahapan pelaksanaan anggaran 12 Pencalonan 13 Data pemilih 14 Pemungutan dan penghitungan suara 15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Aza-szas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 20 Kode Elik 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Ahil Pertama 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pensanaman Modal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Persaroan Terbatas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penibutahan Peraturan Penidangan 17 Peraturan Peremintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizuan Berusaha Berbasis 18 Peraturan Peremintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizuan Berusaha Berbasis 18 Peraturan Peremintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizuan Berusaha Berbasis 18 Peraturan Peremintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizuan Berusaha Berbasis 18 Peraturan Peremintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizuan Berusaha Berbasis Risiko 18 Peraturan Berkelikah Penibangan Penibangan Penibangan Penibangan Penibangan Penibangan	213	Penata Kelola Pemilihan I Imum Ahli	1	·
Struktur Organisasi 5 Kewenangan 6 Etik 7 Policy maker dan implementator 8 Kewanangan 6 Etik 7 Policy maker dan implementator 8 Kewanangan dan Fungai Kesokretariatan 10 Perencanana keuangan dan anggaran 11 Tahapan pelaksanaan anggaran 12 Pencalonan 13 Data pemilih 14 Perungutan dan penghitungan suara 15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penseroan Terbatas 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perseroan Peraturan Perendang-Undangan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perseroan Peraturan Perendang-Undangan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perseroan Peraturan Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perseroan Peraturan Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroanan Peritahan Perseroanan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perseroanan Peritahan Perseroananan Nodal 10 Peraturan Perseroananan Nodal 10 Peraturan Per				•
S. Kewenagan 6				
Fig. Elik				
Policy maker dan implementator			_	·
9 Tugas dan Fungsi Keseketariatan 10 Perencanaan keuangan dan anggaran 11 Tahapan pelaksanaan anggaran 12 Pencalonan 13 Data pemilih 14 Pemungulan dan penghitungan suara 15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 2014 Penata Kelola Penanaman Modal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penseroan Terbatas 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penseroan Terbatas 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penseroan Terbatas 27 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembertukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Apariatur Spil Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penselapan Peraturan Perintah Pengani Undang Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penselapan Peraturan Perintah Pengani Undang Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penselapan Peraturan Perintah Pengani Undang Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penselapan Peraturan Perintah Pengani Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penselapanan PPK 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penselapagaran Perizinan Berusaha Berbasis Nisiko (Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penselapagaran Perizinan Berusaha Berbasis Nisiko (Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Nisiko (Nomor 15 Tahun 2021 tenta				
10 Perencanaan keuangan dan anggaran 11 Tahapan pelaksanaan anggaran 12 Pencalonan 13 Data pemilih 14 Pemungulan dan penghitungan suara 15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 10 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penalapan Peraturan Perintah Penganti Undang-Undang 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PPS Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PPS Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peraturan Berusaha Berbasis Risiko dana Pengelolaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Modal Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pera				
11 Tahapan pelaksanaan anggaran 12 Pencatonan 13 Data pemilih 14 Pemungulan dan penghitungan suara 15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelengan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Administrasi Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perintan Berusaha Berbasis Risiko 19 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 19 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 19 Peraturan Penamaman Modal 10 Peraturan Penamaman Modal 10 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah D				
12 Pencalonan 13 Data pemilih 14 Pemunguian dan penghitungan suara 15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemiluh 19 Prinsip				
14 Pemungutan dan penghitungan suara 15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal 19 Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal 19 Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal 19 Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal 19 Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal 19 Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal 19 Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal 19 Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal 19 Prinsip penyelenggaraan Penanaman Modal 19 Prinsip penyelenggaraan Penanamaman Penanaman Penanaman Penanaman Penanaman Penanaman Penanaman Penanaman Penanaman Penanaman Penanamanaman Penanaman Penanaman Penanamanaman Penanaman Penanaman Penanamanaman Penanamanaman				
15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 20 Kode Etik 20 Kode Etik 20 Kode Etik 20 Kode Etik 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 20 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Aparatur Sipi Negara 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Aparatur Sipi Negara 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penebapan Peraturan Perindah Penganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penebapan Peraturan Perindah Penganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Manajemen PPK 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Manajemen PPK 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 20 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penaturan Pelasana Dundang Nomor 28 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penaturan Penaturan Pelasang Bangunan Gedung 20 Peraturan Persiden Ri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penaturan Pen				
16 Indang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Peraturan Peraturan Peraturan Pemangan Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemserintahan 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 10 Prinsip Pemangan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 10 Prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PPK 10 Prinsip Pemangan Pemerintah Nomor 11 tahun 2018 tentang Pengaraan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penitang Nomor 28 Prinsip Pemangan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penitang Nomor 28 Prinsip Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penitang Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penitang Pemangan Modal Prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penitang Penyelenggaraan Penitang Penyelengaraan Penitang Penanganan Modal Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penitang Penanganan Modal Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penitang Penanganan Modal Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanga				
18				
19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 20 Kode Etik Kode Etik Kode Etik 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pensetukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Manajemen PNS Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Manajemen PPNK Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peritinah Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peritindungan dan Pengelolaan Ingikungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peritindungan dan Pengelolaan Ingikungan Hidup Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Periz				
Penata Kelola Penanaman Modal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembertukan Peraturan Perundang-Undangan 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipii Negara 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risisko 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risisko 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinang Bidang Usaha Penanaman Modal 15 Peraturan BKPM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 16 Peraturan BKPM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dina Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kompetensi Umum:			_	*** ** ** *
Ahli Pertama 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Persiden RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Bers Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Bers Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Bers Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Bers Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman 47 Tahun 2021 tentang Bersata Kelola Penanaman Modal 17 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Bersatas Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Bersatas Risiko Unum:				
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Menjadi Undang-Undang Penetauran Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PPK 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2018 tentang Manajemen PPK 9 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 15 Peraturan Persiden RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 16 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 17 Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	214			
3 Sehat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Homor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Undang Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PPS 9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risisko 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penatuan Remainan Momor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14 Penanaman Modal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 16 Peraturan BFS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 17 Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal		Ahli Pertama		
5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan BFS Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan BKPM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			3	
6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Manajemen PNS 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PPPK 10 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14 Peraturan Persiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 15 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 16 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 17 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Kompetensi Umum:				
7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Berusaha Berbasis Risiko 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 15 Peraturan Peresiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 16 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 17 Peraturan BRPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Redoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal				
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang				
9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 15 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 16 Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 17 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mompetensi Umum:				
Risiko				
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 15 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kompetensi Umum:			10	
12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 15 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 16 Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 17 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kompetensi Umum:			11	
13			12	
14 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 15 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 17 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kompetensi Umum:			13	0 , 00 0
Penanaman Modal 15 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kompetensi Umum:			1.4	
16 Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 17 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 215 Penata Kelola Pengadaan Tanah Kompetensi Umum:				Penanaman Modal
Modal 17 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kompetensi Umum:				
Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kompetensi Umum:			16	Modal
18 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Z15 Penata Kelola Pengadaan Tanah Kompetensi Umum:			17	
Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal 19 Penaturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 215 Penata Kelola Pengadaan Tanah Kompetensi Umum:			10	
215 Penata Kelola Pengadaan Tanah Kompetensi Umum:			Ιď	Berbasis Risiko dna Fasilitas Penanaman Modal
215 Penata Kelola Pengadaan Tanah Kompetensi Umum:			19	
Pengertian dan Pengaturan Umum Pengadaan Tanah	215	Penata Kelola Pengadaan Tanah		Kompetensi Umum:
	1			Pengertian dan Pengaturan Umum Pengadaan Tanah

Halaman 49 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		4	Kompetensi Khusus:
		2	Perencanaan Pengadaan Tanah Persiapan Pengadaan Tanah
			Pelaksanaan Pengadaan Tanah
		4	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
		5	Pengadaan Tanah Skala Kecil
			Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional
216	Penata Kelola Pengawasan	7	Sumber Dana Pengadaan Tanah dan Insentif Perpajakan Kemampuan Umum:
210	Pemilihan Umum Ahli Pertama	1	Teori Pemilihan Umum
		2	Sistem-sistem Pemilihan Umum
			Peran dan Fungsi Bawaslu, KPU, dan DKPP
		4	Perkembangan Kelembagaan Pengawasan Pemilihan Umum
		1	Kemampuan Khusus: Pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
			Penyusunan pedaman penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu
			Pengawasan Pemilu
			Pengawasan partisipatif
			Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu
			Persidangan pelanggaran Pemilu Permohonan sengketa proses Pemilu
			Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu
			Tindak lanjut dan pemantauan putusan
217	Penata Kelola Penyehatan		Kompetensi Umum:
	Lingkungan Ahli Pertama	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		2	Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
			Pengelolaan Air Limbah Domestik
218	Penata Kelola Pertambangan	4	Pengelolaan Drainase Lingkungan Kompetensi Umum:
210	r enata Nelota i ertambangan	1	UU Nomor 3 Tahun 2020 & UU Nomor 4 Tahun 2009
		2	PP Nomor 96 Tahun 2021
			PP Nomor 25 Tahun 2023
			Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
			Kepmen ESDM No. 77.K-MB.01-MEM.B-2022 Kepmen ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018
		_	PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
		/	REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017
			Kompetensi Khusus:
		1	Prinsip Dasar Geologi Mineralogi dan Petrologi
			Teknik Eksplorasi Geologi
			Potensi Sumberdaya Geologi Indonesia
		5	Estimasi Sumber Daya dan Cadangan
			Pengeboran
			Pengeboran kering (tanpa fluida) dan dengan fluida Alat Gali, Muat dan Angkut
			Pengolahan Bahan Galian
			Mesin diesel dan Otto
			Kelistrikan
			Generator Material liability
			Motor listrik Metode dan sistem tambang terbuka
			Metode dan sistem tambang terbuka Metode dan sistem tambang bawah tanah
			Geoteknik Tambang Terbuka
			Geoteknik Tambang Bawah Tanah
			Hidrologi Hidrogoologi
			Hidrogeologi Survei
			Perencanaan tambang
		22	Produksi tambang
			Teknologi proses metalurgi
			Analisis proses metalurgi
		25	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Th 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021
		26	Pengelolaan dan pemantauan kualitas air dan air limbah berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001
		27	Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 kegiatan pertambangan berdasarkan PP No 101 Tahun 2014
			dan PP No. 74 Tahun 2001
		28	Audit Lingkungan Hidup berdasarkan PermenLH No. 3 tahun 2013
		29	Pemantauan kualitas udara kegiatan pertambangan berdasarkan PermenLH No. 4 Tahun 2014 dan PP No 41 Tahun 1999
		30	Pengelolaan sampah dan limbah padat kegiatan pertambangan berdasarkan UU No 18 Tahun 2008
	:		

Halaman 50 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Izin Lingkungan berdasarkan PermenLHK No 4 Tahun 2021
			Permen ESDM No 1827 Tentang Pertambangan yang baik
			Job Safty Analysis (JSA) Sistem manajemen Keselamatan Pertambanggan (SMKP)
219	Penata Kelola Perumahan Ahli	34	Kompetensi Umum:
	Pertama	1	Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Program
		2	Pemantauan Evaluasi
			Pengelolaan Data dan Informasi
			Penganggaran
			Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
			Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Manajemen Risiko
			Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan
			Kompetensi Khusus:
		1	Penyelenggaraan dan Stimulan Rumah Umum dan Komersial
			Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun
			Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
220	Danata Kalala Ciatam dan Taknalasi	4	Penyediaan Rumah Khusus
220	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	Kemampuan Umum: Kebijakan dan Standar TI
	inomasi		Manajemen Risiko TI
			Kepatuhan dan Regulasi TI
			Keamanan Siber
			Manajemen Proyek TI
			Manajemen Layanan TI
			Outsourcing dan Vendor Management
			Manajemen Perubahan TI Cloud Computing
		J	Kemampuan Khusus:
		1	Manajemen Aset TI
		2	Strategi dan Perencanaan TI
		3	Arsitektur Enterprise
			Manajemen Data dan Informasi
			Audit TI dan Pengendalian Internal
			Manajemen Sumber Daya TI Pengembangan dan Implementasi Sistem
			Pengelolaan Kinerja TI
			Tata Kelola Privasi Data
			Business Intelligence dan Analitik Data
			Manajemen Infrastruktur TI
			Inovasi dan Transformasi Digital
			Kesinambungan Bisnis dan Pemulihan Bencana TI
			Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam TI Manajemen Portofolio TI
			Integrasi Sistem dan Interoperabilitas
			Manajemen Sistem Informasi Kesehatan
			Pengembangan Agile dan Metodologi Scrum
			Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin dan Bisnis
221	Penata Kelola Usaha		Kompetensi Umum:
	Ketenagalistrikan	1	Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan
		2	Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang
		<u> </u>	ketenagalistrikan
		1	Kompetensi Khusus: Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik
			Pengetahuan terkan penyapan usana penyediaan tenaga listrik Pengetahuan terkait fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan
			Pengetahuan terkait mutu layanan penyediaan ketenagalistrikan
			Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan
			Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan
222	Penata Kependudukan dan Keluarga		Kompetensi Umum:
	Berencana Ahli Pertama		Kebijakan Pengendalian Penduduk
			Konsep Dasar Keluarga Kebijakan Pembangunan Keluarga
		3	Kebijakan Pembangunan Keluarga Kompetensi Khusus:
		1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
			Advokasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		3	Analisis Demografi
			Penyusunan Program Kesehatan Reproduksi
			Pembangunan Keluarga
200	Panata Kanratakalas	6	Analisis Data dan Informasi Kependudukanm Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana
223	Penata Keprotokolan	1	Kemampuan Umum: Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan
			perundang-undangan Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-
		2	Pengetanuan dan pemanaman dasar mengenai konsep керготокоlan berdasarkan peraturan perundang- undangan

Halaman 51 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		3	Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokoler berdasarkan peraturan perundang-undangan
			Kemampuan Khusus:
		1	Pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		2	Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		3	Pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		4	Pelayanan keprotokolan terkait tata cara Protokol Internasional sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang keprotokolan Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
224	Penata Keselamatan dan Keamanan	3	Kemampuan Umum:
	Pelayaran		Matematika terapan
			Fisika terapan Informasi dan Teknologi
			Kesehatan dan Keselamatan Kerja
		5	Bahasa inggris maritim & SMCP
		6	Kepemimpinan (/
		1	Kemampuan Khusus: Prosedur darurat
			Marine Pollution
			Peraturan Pencegahan tubrukan dilaut dan Dinas Jaga
		4	Konstruksi dan stabilitas kapal
		5 6	Penanganan dan pengaturan muatan Hukum maritim
			Global Maritime Distress Safety System
225	Penata Keselamatan Pelayaran		Kemampuan Umum:
			Matematika terapan
			Fisika terapan
			Informasi dan Teknologi Kesehatan dan Keselamatan Kerja
			Bahasa inggris maritim & SMCP
			Kepemimpinan
			Kemampuan Khusus:
			Prosedur darurat Marine Pollution
			Peraturan Pencegahan tubrukan dilaut dan Dinas Jaga
			Konstruksi dan stabilitas kapal
			Penanganan dan pengaturan muatan
			Hukum maritim Global Maritime Distress Safety System
226	Penata Laksana Agraria dan Tata	/	Kemampuan Umum:
	Ruang	1	Dasar Pertanahan
		2	Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
		1	Kemampuan Khusus: Konsolidasi Tanah
			Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan
		3	Pengadaan Tanah
		4	Penilaian Tanah
			Pemberdayaan Tanah Masyarakat
			Penatagunaan Tanah Reforma Agraria
227	Penata Laksana Bangunan Gedung	<u> </u>	Kompetensi Umum:
	dan Kawasan Permukiman Pemula	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
			Kompetensi Khusus:
			Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4	Penataan Bangunan dan Lingkungan
000	Domete Lebesco D. C. /	5	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	1	Kompetensi Umum: Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
			Kompetensi Khusus:
			Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		<u> </u>	

Halaman 52 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
229	Penata Laksana Barang Terampil		Kemampuan Umum:
			Kebijakan Jabatan Fungsional Konsep dasar pengelolaan BMN
			Konsep dasar pengelolaan bivin Konsep dasar keuangan negara
			Konsep dasar kedangan negara Konsep dasar akuntansi pemerintahan
			Kemampuan Khusus:
		1	Kebijakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara
			Kebijakan penggunaan Barang Milik Negara
			Kebijakan pemanfaatan Barang Milik Negara
			Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara
			Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN
			Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan
		8	Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
230	Penata Laksana Jalan dan Jembatan		Kompetensi Umum:
	Pemula	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
			Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan
		2	Pelaksanaan Konstruksi Jalan
			Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan
1			Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan
			Lingkungan dan Keselamatan Jalan Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial
1			Pengadaan Lanan dan Dampak Sosiai Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan
			Pengoperasian Lalu Lintas
			Bahan Uji Mutu
231	Penata Laksana Jalan dan Jembatan		Kompetensi Umum:
	Terampil	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan
			Jembatan Kompetensi Khusus:
		1	Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan
			Pelaksanaan Konstruksi Jalan
		3	Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan
			Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan
			Lingkungan dan Keselamatan Jalan
			Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan
			Pengoperasian Lalu Lintas
			Bahan Uji Mutu
232	Penata Laksana Penyehatan		Kompetensi Umum:
	Lingkungan Pemula	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
		2	Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan
			lingkungan Kompetensi Khusus:
		1	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
1			Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
1			Pengelolaan Air Limbah Domestik
		4	Pengelolaan Drainase Lingkungan
233	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil		Kompetensi Umum:
1	Lingkungan retampii		Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan
		2	lingkungan
			Kompetensi Khusus:
			Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
			Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
			Pengelolaan Air Limbah Domestik
234	Penata Laksana Sumber Daya Air	4	Pengelolaan Drainase Lingkungan Kompetensi Umum:
_57	Pemula	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
		2	Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya
		2	air
			Kompetensi Khusus:
			Pengelolaan Sumber Daya Air
			Pengelolaan Sungai Pengelolaan Daerah Pantai
			Pengelolaan Daeran Pantal Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan
1			Pengelolaan Daerah Irigasi
			Pengelolaan Daerah Rawa
		7	Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku
		7 8	Pengelolaan Bendungan
025	Penata Laksana Sumber Daya Air	7 8	

Halaman 53 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
	Terampil	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
		2	Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya
	+		air Kompetensi Khusus:
		1	Pengelolaan Sumber Daya Air
			Pengelolaan Sungai
			Pengelolaan Daerah Pantai
			Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan
			Pengelolaan Daerah Irigasi
			Pengelolaan Daerah Rawa
	•		Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku Pengelolaan Bendungan
			Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
236	Penata Pameran	1	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
			Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
237	Penata Penanggulangan Bencana		Kemampuan Umum:
	Ahli Pertama		Konsep Dasar Penanggulangan Bencana Perencanaan Penanggulangan Bencana
		2	Kompetensi Khusus:
		1	Pengkajian Risiko Bencana
			Kesiapsiagaan logistik dan peralatan bencana
			Pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat
			Fasilitasi kebutuhan korban dan pengungsi
			Mitigasi bencana
	-		Pusdalops Peringatan dini bencana
			Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
			Rencana operasi penanganan darurat
			Pengendalian operasi/komando penanganan
		11	Pemenuhan kebutuhan dasar
			Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
			Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan
	•		Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
		16	Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban
238	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli	17	Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam Kompetensi Umum:
	Pertama	1	Konsep dan strategi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
			Rencana kerja dan kegiatan promosi dan desiminasi terbitan ilmiah
		3	Etika publikasi dalam proses verifikasi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
		4	Kompetensi Khusus:
	 		Penerimaan naskah atau materi audiovisual Penelaahan dan penilaian naskah atau materi audiovisual
			Peneraanan dan penilaian naskan atau maten audiovisual Penyuntingan
			Desain
			Produksi
239	Penata Perizinan Ahli Pertama	1	UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017
240	Penata Perlindungan Saksi dan		Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan Kemampuan Umum:
	Korban Ahli Pertama		Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		2	Definisi Perlindungan Definisi Subyek Perlindungan
	 		Syarat Permohonan Perlindungan
			Tata Cara Pengajuan Permohonan
			Jangka Waktu Permohonan Perlindungan
			Persiapan Layanan Permohonan Perlindungan
			Jenis Tindak Pidana Dalam Pemberian Perlindungan
			Hak Saksi dan Korban
	 		Jenis Layanan Perlindungan Jangka Waktu Pemberian Perlindungan
		- 1	Kemampuan Khusus:
		1	Investigasi
		2	Asesmen
			Penelahaan Dokumen Permohonan Perlindungan
		4	Telaah Materiil Permohonan

Halaman 54 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Risalah Permohonan Keputusan Pemberian Perlindungan
			Teknis Perlindungan Fisik
			Teknis Pemberian Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikologis
			Teknis Pemenuhan Hak Prosedural Teknis Pemberian Rehabilitasi Psikososial
		11	Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku
			Teknis Pemenuhan Hak atas Pembiayaan
			Teknis Perpanjangan atau Pemberhentian Perlindungan Teknis Pemberian Perlindungan Hukum
			Teknis Pemberian Hak atas Informasi
241	Penata Pertanahan Ahli Pertama	-	Kemampuan Umum: Dasar Pertanahan
			Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Kemampuan Khusus:
			Konsolidasi Tanah Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan
			Pengadaan Tanah
			Penilaian Tanah
			Pemberdayaan Tanah Masyarakat Penatagunaan Tanah
		7	Reforma Agraria
242	Penata Ruang Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		2	Dasar Pertanahan Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
		۷	Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang Kemampuan Khusus:
			Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
			Pengawasan Penataan Ruang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
			Penyusunan Rencana Tata Ruang
		5	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
2/13	Penata Sarana dan Prasarana	6	Pengendalian, Pemanfaatan dan Sengketa Penataan Ruang Kemampuan Umum:
240	Kelautan dan Perikanan	1	Pedoman tentang pembudidayaan ikan
		2	Mengetahui pengetahaun umum di bidang Kelautan dan Perikanang kelautan dan perikanan
	-		Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan
			Pengetahuan dasar mengenai alat-alat pengolah data
			Peraturan Kelautan dan Perikanan
			Sistem manajemen keamanan pangan Sistem manajemen mutu pengujian
			Strategi Kebijakan Ekonomi Biru Bidang Kelautan dan Perikanan
			Dasar-dasar/falsafah penyuluhan perikanan
		11	Inovasi Difusi dan Adopsi Kemampuan Khusus:
		1	Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
			Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
			Penataan Pemasukan Benih Calon Induk dan Induk Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan
		5	Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
			Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		9	Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
			Pengenalan Jenis Ikan Identifikasi jenis - jenis kapal penangkapan ikan
			Identifikasi awak kapal perikanan
			Identifikasi jenis mesin dan alat penangkapan ikan
			Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan Mampu melakukan penataan sarana dan prasarana di bidang Kelautan dan Perikanan
			Pengetahuan dasar mengenai Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
			Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
			Pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
			Sistem manajemen keamanan pangan
			Sistem manajemen mutu pengujian
			Ketertelusuran dan penarikan produk pangan Akses teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan
		24	Kemitraan Usaha dan Pembiayaan/permodalan sektor kelautan dan perikanan
044	Panalagh Akraditasi Larahara	25	Pengolahan Data, Produktivitas dan Skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
∠44	Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	1	Kemampuan Umum: Penyusunan kebijakan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
			Pembinaan Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		1	Kemampuan Khusus:
	l l	1	Pemenuhan Persyaratan Badan Akreditasi

Halaman 55 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Pengembangan Sistem Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
045	Danalash Katartalya Ctarada	3	Penilaian Pemenuhan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	1	Kemampuan Umum: Penyusunan Kebijakan Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
			Pembinaan Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		_	Kemampuan Khusus:
		1	Penyediaan dan Pengembangan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan
			Pemeliharaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan
			Pelaksanaan Diseminasi Standar Pengukuran atau Bahan Acuan
246	Penelaah Pengembangan Standar	4	Pemenuhan pengakuan nasional atau internasional standar pengukuran atau bahan acuan Kemampuan Umum:
240	r enelaan r engembangan Standa	1	Penyusunan Kebijakan Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		2	Pembinaan Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengembangan Standar Nasional Indonesia
			Pengembangan Standar Internasional
247	Peneliti Ahli Muda	3	Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI Kompetensi Umum:
247	renenti Anni Muda	1	Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika.
			Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan
		2	aplikasi manajemen referensi
		3	Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI.
		4	Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian
			Kompetensi Khusus:
		1	Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); Invention, Inovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian.
		2	Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian
		3	Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian
		4	Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan.
		5	Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
248	Peneliti Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
		1	Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika.
		2	Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi
		3	Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan
			Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait Kl.
		4	Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian Kompetensi Khusus:
			Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif.
		1	kualitatif, dan mixed method); Invention, Inovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian.
		2	Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian
		3	Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian
		4	Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan.
		5	Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
249	Penera Ahli Pertama	1	Pelaksanaan Tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan III dan IV
		2	Pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan III dan IV
		3	Penanganan dan pengelolaan instalasi uji
250	Penera Terampil	1	Aturan dan prosedur pelaksanaan Tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan I dan II
		2	Aturan dan prosedur pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan
			Tingkat Kesulitan I dan II
05.1	Damariamah Al-II D	3	Pengetahuan dasar terkait pengelolaan instalasi uji
	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Arab		Kompetensi Umum:
	i Gnerjeman Danasa Ardu		Teori Penerjemahan Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2	Membaca teks Bahasa Indonesia
		3	Struktur Bahasa Arab dan ungkapan tulis Bahasa Arab
050	D	4	Pemahaman membaca teks Bahasa Arab
252	Penerjemah Ahli Pertama -		Kompetensi Umum:

Halaman 56 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
	Penerjemah Bahasa Belanda		Teori Penerjemahan
			Kompetensi Khusus:
			Merespons kaidah Bahasa Indonesia
			Membaca teks Bahasa Indonesia
			Struktur tata Bahasa Belanda dan ungkapan tulis Bahasa Belanda
252	Penerjemah Ahli Pertama -	4	Pemahaman membaca teks Bahasa Belanda Kompetensi Umum:
233	Penerjemah Bahasa Inggris		Teori Penerjemahan
	T onorjeman Banasa mggne		Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
			Membaca teks Bahasa Indonesia
			Struktur Bahasa Inggris dan ungkapan tulis Bahasa Inggris
			Pemahaman membaca teks Bahasa Inggris
254	Penerjemah Ahli Pertama -		Kompetensi Umum:
	Penerjemah Bahasa Jepang		Teori Penerjemahan
			Kompetensi Khusus:
			Merespons kaidah Bahasa Indonesia
			Membaca teks Bahasa Indonesia
			Struktur Bahasa Jepang dan ungkapan tulis Bahasa Jepang Pemahaman membaca teks Bahasan Jepang
255	Penerjemah Ahli Pertama -	7	Kompetensi Umum:
	Penerjemah Bahasa Korea		Teori Penerjemahan
	•		Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
			Membaca teks Bahasa Indonesia
			Struktur Bahasa Korea dan ungkapan tulis Bahasa Korea
		4	Pemahaman membaca teks Bahasa Korea
256	Penerjemah Ahli Pertama -		Kompetensi Umum:
	Penerjemah Bahasa Mandarin		Teori Penerjemahan
		_	Kompetensi Khusus:
			Merespons kaidah Bahasa Indonesia Membaca teks Bahasa Indonesia
			Intermbaca teks Banasa Indonesia Struktur Bahasa Mandarin dan ungkapan tulis Bahasa Mandarin
			Pemahaman membaca teks Bahasa Mandarin
257	Penerjemah Ahli Pertama -	7	Kompetensi Umum:
	Penerjemah Bahasa Prancis		Teori Penerjemahan
	•		Kompetensi Khusus:
		1	Merespons kaidah Bahasa Indonesia
			Membaca teks Bahasa Indonesia
			Struktur Bahasa Prancis dan ungkapan tulis Bahasa Prancis
		4	Pemahaman membaca teks Bahasa Prancis
258	Pengamat Gunung Api Pemula		Kompetensi Umum:
			Tugas fungsi Pengamat Gunung Api
			Peran Pengamat Gunung Api Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
			Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia
			Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia
			Kompetensi Khusus:
		1	Pembentukan gunung api
			Istilah Kegunungapian
			Dampak gunung api
			Kawasan rawan bencana gunung api
			Produk gunung api
			Klasifikasi gunung api
			Komponen dasar elektronika
			Rangkaian listrik Sensor dan Transducer
			Gelombang
			Mekanika (Gaya)
		12	Geometri
			Trigonometri
			Statistika
		15	Jaringan komputer
			Sistem bilangan komputer
			Peralatan pemantauan gunung api
			Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental
			Tingkat aktivitas gunung api
			Diseminasi informasi gunung api
250	Pengamat Gunung Api Terampil	21	Lingkungan kerja Pengamat Gunung Api Kompetensi Umum:
209	п өндантат бининд Арг Гегаптріі	1	Kompetensi Umum: Tugas fungsi Pengamat Gunung Api
			Peran Pengamat Gunung Api
			Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
			Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	ı	<u> </u>	gy-

Halaman 57 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia
		Ö	Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia Kompetensi Khusus:
		1	Pembentukan gunung api
			Istilah Kegunungapian
	•		Dampak gunung api Kawasan rawan bencana gunung api
			Produk gunung api
			Klasifikasi gunung api
		7	Komponen dasar elektronika
			Rangkaian listrik
			Sensor dan Transducer Alat Ukur dan Pengukuran
			Gelombang
			Thermodinamika
			Pengukuran dalam ilmu fisika
	•		Aplikasi dalam ilmu fisika Elektromagnetika
			Geometri
			Trigonometri
			Statistika Statistika
			Diferensial, integral dan limit Jaringan komputer
			Dasar-dasar pemrograman
		22	Elektronika digital
			Dasar Mikrocontroler dan Mikroprocessor
			Peralatan pemantauan gunung api
			Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental Tingkat aktivitas gunung api
			Diseminasi informasi gunung api
260	Pengamat Meteorologi dan Geofisika		Kemampuan Umum:
	Ahli Pertama		Pengenalan ilmu meteorologi dasar
			Pengolahan data meteorologi Prediksi cuaca
			Pengertian ilmu klimatologi-kualitas udara dasar
			Prakiraan iklim ekstrim
			Pengenalan ilmu geofisika dasar
	•		Sedimentologi dan stratigrafi Peralatan teknologi MKG
			Kalibrasi peralatan teknologi MKG
			Kemampuan Khusus:
			Model prakiraan meteorologi
	•		Peralatan operasional meteorologi Analisis meteorologi kompleks
			Pengolahan data klimatologi tingkat lanjutan
			Analisis klimatologi kompleks
			Iklim ekstrim
	•		Teknis operasional geofisika Pengolahan data geofisika
			Analisis geofisika kompleks
		10	Pengoperasian peralatan teknologi canggih/modern
			Pengujian peralatan teknologi MKG
261	Pengamat Tera Pemula		Kalibrasi peralatan teknologi canggih/modern Ketentuan dan metode pengambilan data alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang
		1	dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
			Penyiapan bahan pemeriksaan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam
			keadaan terbungkus dan satuan ukuran, perlabelan barang dalam keadaan terbungkus dan pemeriksaan
			tanda tera serta satuan ukuran pada pengumuman atau pemberitahuan yang menyatakan ukuran, takaran, berat pada tempat penjualan barang
		3	Penyiapan bahan penyuluhan bidang metrologi legal
262	Pengamat Tera Terampil	1	Pengumpulan dan penyajian data terkait alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang
		•	dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
			Pemeriksaan dan pengecekan unjuk kerja alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan tingkat
		2	kesulitan I, pemeriksaan pelabelan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dinyatakan
			dalam berat secara umum, dan jumlah hitungan, serta pemeriksaan satuan ukuran pada pengumuman
000	Pangantar Karia Ahli Dartarra	3	Penyuluhan bidang metrologi legal
263	Pengantar Kerja Ahli Pertama	1	Kemampuan Khusus: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
			Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		3	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Penempatan
	 	1	Kemampuan Umum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Halaman 58 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
		5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
264	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian		Kompetensi Umum:
	Ahli Pertama	1	UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman, PP Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
		2	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2016
			SNI tentang Alat dan Mesin Pertanian dan ISO tentang Sistem Manajemen Mutu Analisa ekonomi alat dan mesin pertanian
		5	llmu dasar mekanisasi pertanian, alat ukur/instrumentasi, keselamatan dan kesehatan kerja, perkembangan mekanisasi pertanian saat ini
		_	Kompetensi Khusus: Tahapan budidaya dan alat dan mesin pra panen (pengolahan tanah, penanaman, perlindungan tanaman)
		1	dan pengawasan pengadaan, penggunaan dan peredaran alsintan Tahapan panen, pascapanen dan pengolahan serta alat dan mesin komoditas tanaman pangan,
		2	hortikultura, perkebunan, dan peternakan
		3	Persiapan pelaksanaan pengujian, instrumen pengujian, prosedur dan tata cara pengujian, kinerja alat dan mesin pertanian
		4	Persiapan pelaksanaan sertifikasi, prosedur dan tata cara sertifikasi, serta SDM pelaksana proses sertifikasi alat dan mesin pertanian
265	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	1	Kompetensi Umum: Regulasi bidang pertanian
			Pengetahuan budidaya tanaman (produksi benih, seleksi/detaseling)
		3	Biologi umum (pemuliaan tanaman, morfologi, fisiologi)
		1	Kompetensi Khusus: Regulasi perbenihan nasional
		2	Pengawasan benih tanaman (sertifikasi, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih dan penilaian
266	Pengawas Benih Tanaman Pemula		pelepasan varietas) Kompetensi Umum:
200	r ongawao Bonin ranaman r omala	1	Regulasi bidang pertanian
			Pengetahuan budidaya tanaman (produksi benih, seleksi/detaseling)
		3	Biologi umum (pemuliaan tanaman, morfologi, fisiologi) Kompetensi Khusus:
		1	Regulasi perbenihan nasional
		2	Pengawasan benih tanaman (sertifikasi, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih dan penilaian pelepasan varietas)
267	Pengawas Benih Tanaman Terampil	-	Kompetensi Umum:
			Regulasi bidang pertanian Pengetahuan budidaya tanaman (produksi benih, seleksi/detaseling)
			Biologi umum (pemuliaan tanaman, morfologi, fisiologi)
		1	Kompetensi Khusus: Regulasi perbenihan nasional
			Pengawasan benih tanaman (sertifikasi, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih dan penilaian
000	D D107	2	pelepasan varietas)
268	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	1	Kompetensi Umum: Pengetahuan produksi benih dan bibit ternak (produksi benih, bibit, seleksi)
		2	Manajemen pemeliharaan ternak
		3	Istilah bidang peternakan
			Kompetensi Khusus: Ciri-ciri karakteristik ternak
269	Pengawas Bibit Ternak Terampil		Kompetensi Umum:
			Pengetahuan produksi benih dan bibit ternak (produksi benih, bibit, seleksi)
			Manajemen pemeliharaan ternak Istilah bidang peternakan
)	Kompetensi Khusus:
070	Pongowoo Energi Paris Tarkaris		Ciri-ciri karakteristik ternak
2/0	Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	1	Kompetensi Umum: Tugas, Fungsi, dan Peran Aparatur Sipil Negara
	y	2	Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil negara
		3	Peran jabatan Pengawas EBTKE
			Tugas dan tanggung jawab Pengawas EBTKE Organisasi EBTKE
		6	UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
			PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Halaman 59 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		8	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
			Perpres Nomor 112 Tahun 2022
			PP 33 Th 2023 tentang konservasi energi
			Permen ESDM no 14 th 2021
			Permen ESDM Nomor 12 tahun 2023 Permen ESDM No 32 Th 2008 ttg Bahan Bakar Nabati dan Perubahannya
			Kompetensi Khusus:
			Potensi Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia
			Konversi satuan dalam bidang EBTKE
			Bioenergi: Bahan Bakar Nabati
			Bioenergi: PLT Bio
			Bioenergi: Biogas
		6	Bioenergi: Biomassa
			Aneka EBT: Energi Baru (Nuklir, Hidrogen, Coal Bed Methane, Liquified Coal, Gassified Coal)
			Aneka EBT: Energi Surya
			Aneka EBT: Energi Angin
			Aneka EBT: Energi Gerakan dan Perubahan Suhu Air Laut
			Aneka EBT: Energi Aliran dan Terjunan Air
			Konservasi Energi: Manajemen Energi Konservasi Energi: SKEM dan Labeling
			Konservasi Energi: Program Konservasi Energi
			Analisis Ekonomi Energi
			Keselamatan dan Kesehatan Kerja
			Dampak Lingkungan dan Sosial Pengembangan dan Penggunaan EBTKE
			Target, Komitmen, dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
			Aspek Keteknisan (SNI, SKKNI, TKDN)
271	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli		Kompetensi Umum:
	Pertama		Aplikasi-aplikasi dan layanan call center yang ada di BPOM
			Sistem kerja dan proses bisnis di BPOM
			Tata kerja dan organisasi BPOM
			Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang obat dan makanan
			Gambaran visi, misi dan budaya kerja POM
			Komptensi Khusus: Kasus/kejadian kejahatan obta dan makanan
			Rasus/kejadian kejanatan obta dan makanan Regulasi yang berhubungan dengan bidang penindakan obat dan makanan
		3	Regulasi dalam pengawasan fasilitas produksi obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor
		4	Prinsip-prinsip cara pembuatan obat yang baik (CPOB)
			Regulasi dalam pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian (obat, produk biologi,
			narkotika, psikotropika, dan prekursor)
		6	Prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik (CDOB)
		7	Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian (obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor)
			Regulasi pengawasan mutu obat
			Regulasi pengawasan penandaan/label dan/atau iklan obat
			Regulasi pengawasan penandaan/label dan/atau iklan/promosi produk tembakau
			Regulasi pengawasan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor Regulasi penerapan farmakovigilans
			Regulasi penerapan tarmakovigilans Regulasi tentang persyaratan teknis bahan kosmetik (terutama bahan dilarang) dan cemaran dalam
		1:3	kosmetik
			Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi kosmetika
			Regulasi pengawasan penandaan kosmetika
			Regulasi dan prinsip-prinsip CPOTB dalam pengawasan sarana produki obat bahan alam dan suplemen
			kesehatan
			Regulasi dan prinsip-prinsip cara distribusi yang baik untuk obat bahan alam dalam pengawasan sarana
			distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan
			Regulasi pengawasan mutu dan keamanan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
			Regulasi dan tata cara pengawasan iklan obat bahan alami dan suplemen kesehatan
			Regulasi dan tata cara pengawasan penandaan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
			Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		シン	Sistem farmakovigilan dan efek tidak diinginkan pada penggunaan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
			Regulasi terkait prinsip cara peredaran pangan olahan yang baik/sistem jaminan keamanan dan mutu
			pangan olahan di sarana peredaran
			Regulasi terkait pengambilan contoh pangan dan tindak lanjut hasil pengujian pangan
			Regulasi terkait KLB keracunan pangan
			Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi pangan olahan
		27	Regulasi pengawasan penandaan dan/atau label pangan olahan
			Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan
		29	Registrasi produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan
		30	Pengetahuan dasar uji pra klinik/uji klinik obat bahan alam
		30 31	Notifikasi produk kosmetika
		30 31 32	Notifikasi produk kosmetika Penilaian dokumen informasi produk
		30 31 32 33	Notifikasi produk kosmetika

Halaman 60 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Dasar-dasar pengujian kimia, pengujiam kromatografi, spektrofotometri dan disolusi
			Dasar-dasar pengujian mikrobiologi, biologi molekuler, pengujian kualitatif/kuantitatif mikroba spesifik Pedoman penyusunan metodologi riset, metodologi kualitatif, dan metodologi kuantitatif
			Rancangan materi penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
			Kegiatan penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tingkat dasar
		40	Konsep pengawasan obat dan makanan
		41	Dasar hukum penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Peraturan Badan POM, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan
272	Pengawas Industri		Kemampuan Umum:
			Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian
		2	Undang-Undang Perindustrian
	•		Kemampuan Khusus: Definisi dan metode pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan industri atau perusahaan
		1	kawasan industri
		2	Substansi/bidang pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan industri atau perusahaan kawasan
			industri Tingkat risiko, pemberian sanksi dan rekomendasi atas hasil pengawasan dan pengendalian dalam
		3	rangka pembinaan industri
273	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
	renama	1	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
		2	Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
		4	Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
		5	Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sertifikasi dan Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal
		6	Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
		0	
		1	Kompetensi Khusus: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
			Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
		3	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal
		5	Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
		6	Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
		7	Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
274	Pengawas Jaringan Utilitas		Kompetensi Umum:
		_	Pengetahuan Dasar Terkait Pengelolaan Jaringan Utilitas, yang meliputi :
	+	2	Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu Jaringan Distribusi Air Minum
		3	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
		4	Jaringan Distribusi Pipa Gas
		5	Jaringan Distribusi Telekomunikasi
			Kompetensi Khusus: Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Utilitas, yang meliputi:
		1	Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu
	 		Jaringan Distribusi Air Minum
			Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
		4	Jaringan Distribusi Pipa Gas Jaringan Distribusi Telekomunikasi
275	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan	5	Jaringan Distribusi Telekomunikasi Kemampuan Umum:
	g	1	Bahasa Inggris Maritim
		2	Teknologi informatika
		3	Ilmu Ekonomi
	 	1	Kemampuan Khusus: Dasar-dasar Kepelabuhanan
			Dokumen Kepelabuhanan dan Dokumen Pengangkutan
		3	Peraturan nasional dan konvensi internasional
			Kepedulian Lingkungan
	 		K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Sistem Manajemen Keselamatan Kapal
			Jasa dan Fasilitas Pelabuhan
		8	IMDG Code
			ISPS Code
			Manajeman Angkutan Laut Keagenan
			keagenan Logistik dan Supply Chain Management
		13	Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal
			Manajemen Mutu
		_	

Halaman 61 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	ungan, gas cair, panjang, dan
Pertama Analisis kebultuhan kegiatan pengawasan alat ukur, alat tinbang kesulitan I dan II serta barang dalam keadaan terbungkus berat, jumlah hitu luas serta satuan ukuran pada produk periklanan komersial yang ditayangka Penyuluhan dan konsultasi kepada pelaku usaha tentang ketentuan metroli Kompetensi Umum: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran Peneriksaan kelaiklautan kapal Manajemen keselamatan kapal Semanduan 6 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan Kesyahbandaran Kesyahbandaran Kelancaran lalu lintas angkutan laut Kemampuan Khusus: 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k Menggunakan Somor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara	ungan, gas cair, panjang, dan
277 Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran Kompetensi Umum: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran 2 Kenavigasian 3 Pemeriksaan kelaiklautan kapal 4 Manajemen keselamatan kapal 5 Pemanduan 6 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan 7 Kesyahbandaran 8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut Kemampuan Khusus: 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil Kompetensi Umum:	
Terampil Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran 2 Kenavigasian 3 Pemeriksaan kelaiklautan kapal 4 Manajemen keselamatan kapal 5 Pemanduan 6 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan 7 Kesyahbandaran 8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut Kemampuan Khusus: 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	ogi legal
Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran 2 Kenavigasian 3 Pemeriksaan kelaiklautan kapal 4 Manajemen keselamatan kapal 5 Pemanduan 6 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan 7 Kesyahbandaran 8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut Kemampuan Khusus: 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
2 Kenavigasian 3 Pemeriksaan kelaiklautan kapal 4 Manajemen keselamatan kapal 5 Pemanduan 6 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan 7 Kesyahbandaran 8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut Kemampuan Khusus: 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
3 Pemeriksaan kelaiklautan kapal 4 Manajemen keselamatan kapal 5 Pemanduan 6 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan 7 Kesyahbandaran 8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut Kemampuan Khusus: 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
4 Manajemen keselamatan kapal 5 Pemanduan 6 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan 7 Kesyahbandaran 8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut Kemampuan Khusus: 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
5 Pemanduan 6 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan 7 Kesyahbandaran 8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut Pertama 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
7 Kesyahbandaran 8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut 278 Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut 278 Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
Pertama Kemampuan Khusus: 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
Pertama 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi ke 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan pe 6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi ke 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
6 pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan per mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi k 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	nyusunan kohiiskan
Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	raturan perundang-undangan,
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
	Negeri Sipil
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Ken	nenterian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20	21 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 20	24 tentang Perubahan Atas
5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisa Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan	asi dan Tata Kerja Unit
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 20 Kementerian Ketenagakerjaan	23 tentang Peta Proses Bisnis
279 Pengawas Koperasi Ahli Pertama Kemampuan Umum:	
1 Kebijakan pengawasan koperasi	
2 Manajeman perkoperasian Kemampuan Khusus:	
1 Pemeriksaan koperasi	
2 Penilaian kesehatan koperasi	
3 Penyusunan laporan hasil pemeriksaan 4 Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	
280 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Kemampuan Umum:	
Pertama 1 Definisi yang berkaitan dengan lingkungan hidup	
2 Peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkunga	n hidup
3 Hak asasi untuk lingkungan yang baik dijamin oleh negara 4 Persyaratan perizinan berusaha	
5 Sengketa lingkungan	
6 Pengawas lingkungan hidup	
7 Tugas dan fungsi pengawas lingkungan hidup 8 Tahapan kegiatan pengawasan lingkungan hidup	
8 Tahapan kegiatan pengawasan lingkungan hidup 9 Hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum	
10 Jenis-jenis Penegakan Hukum	
11 Dokumen lingkungan yang berlaku di Indonesia	
12 Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup 13 Kode etik yang harus ditegakkan oleh Pengawas Lingkungan Hidup	
Kemampuan Khusus:	
Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan a terkait persetujuan lingkungan	,
Dasar hukum dan ketentuan yang menjadi acuan pengawasan dalam Periz Persetujuan Lingkungan	ınan Berusaha terkait
Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan a pencemaran Air dan/atau Laut	
Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan a pencemaran udara	ıspek pengendalian
5 Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan a	ispek pengelolaan B3
6 Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan a	and the second second second

Halaman 62 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		7	Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah Non B3
281	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	1	Kompetensi Umum: Istilah di bidang pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan pangan, perkarantinaan, peternakan, budidaya pertanian, kelembagaan
		2	UU Pangan, UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, UU Perlindungan Konsumen, UU Standarisasi, UU Halal, UU Karantina, UU Perkebunan, UU Hortikultura, UU Peternakan, PP Label dan Iklan Pangan, PP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, PP Indikasi Geografis, Permentan tentang Pengawasan Keamanan PSAT di Pemasukan, Keamanan dan Mutu PSAT, Sistem Pertanian Organik, GAP, GHP, GMP, GRP, Pelarangan Bahan Kimia pada Beras, Tindakan Karantina untuk Pemasukan PSAT
			Kompetensi Khusus:
		1	Lembaga Pengawas Pangan, Lembaga Pengujian, Lembaga Sertifikasi Produk/Profesi, Lembaga Akreditasi, Lembaga Standar Internasional, termasuk di dalamnya personil/SDM yang menjalankan fungsi dan tugas terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian
		2	SNI Produk Pangan Hasil Pertanian, SNI Sistem terkait Mutu dan Keamanan Pangan, Standar Internasional terkait Mutu dan Keamanan pangan, Persyaratan Dasar Keamanan Pangan (SSOP, GAP, GHP, GMP, GRP, GFP), Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Persyaratan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan PSAT, Persyaratan Keamanan PSAT/PSAH
		3	Mekanisme Pengawasan untuk Pemasukan PSAT, Pre Market, Post Market, Mekanisme Pengujian Mutu Hasil Pertanian (Pengujian Cepat dan Pengujian dengan Instrumen), Mekanisme Pengambilan Contoh, Mekanisme Pengawasan Pemasukan Agens Hayati
000	Dengeure Mutu Delicie Al-B Deg	4	Cemaran Biologi, Kimia, Fisika
282	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	1	Kompetensi Umum: Regulasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		2	Pengetahuan Bidang Pakan Ternak
		3	Regulasi Bidang Pakan
			Kompetensi Khusus: Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan (Produksi, Pendaftaran, Peredaran, Pengujian, Bahan Pakan,
			Pakan Hijauan, Pakan Olahan)
283	Pengawas Mutu Pakan Pemula		Kompetensi Umum:
			Regulasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengetahuan Bidang Pakan Ternak Regulasi Bidang Pakan
			Kompetensi Khusus:
004	Danasa Mata Dalam Tanasa I		Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan (Produksi, Pendaftaran, Peredaran, Pengujian, Bahan Pakan, Pakan Hijauan, Pakan Olahan)
284	Pengawas Mutu Pakan Terampil	1	Kompetensi Umum: Regulasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Pengetahuan Bidang Pakan Ternak
		3	Regulasi Bidang Pakan
			Kompetensi Khusus: Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan (Produksi, Pendaftaran, Peredaran, Pengujian, Bahan Pakan, Pakan Hijauan, Pakan Olahan)
285	Pengawas Penanggulangan		Kemampuan Umum:
	Pencemaran dan Musibah SAR	2	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5	Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
286	Pengawas Pendataan Statistik		Kemampuan Umum:
			Statistik dasar Kemampuan Khusus:
			Pengumpulan data
			Pengolahan data
287	Pengawas Penyelenggara Pemilu	3	Evaluasi kegiatan statistik Kemampuan Umum:
201	i engawas renyelenggala renillu	1	Kemampuan Umum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
			Informasi Kepemiluan Dasar
	•		

Halaman 63 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Kemampuan Khusus:
			Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
			Pengawasan Pemilu Persidangan terhadap Pelanggaran Pemilu
			Pemantauan Putusan Penanganan Pelanggaran Pemilu
		5	Tindak lanjut dan Pemantauan Putusan
288	Pengawas Penyelenggaraan Urusan		Kemampuan Umum:
	Pemerintahan Daerah Ahli Pertama		PP 2 Tahun 2018, UU 23 Tahun 2014, PP 60 Tahun 2008, PP 12 Tahun 2017, UU 5 Tahun 2014,
			Permendagri 15 Tahun 2019, Permendagri 23 Tahun 2020, Permendagri 61 Tahun 2019, Permenpan 10
			Tahun 2019, Permendagri 18 Tahun 2020, UU 32 Tahun 2004, Permenpan 36 tahun 2020, PP 18 Tahun 2016, UU 25 Tahun 2009, PP 38 Tahun 2007
			Kemampuan Khusus:
		1	Butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD
			Tugas PPUPD
			Urusan pemerintahan
			Pemerintahan daerah Standar kompetensi jabatan PPUPD
			Unsur SPIP
			Manajemen PNS
			Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan
			Pelayanan Dasar
			Kompetensi ASN
			Angka kredit PPUPD Pembinaan dan pengawasan
289	Pengawas Perdagangan Ahli		Penpinaan dan pengawasan Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan
	Pertama		Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan
		2	pengendalian perdagangan
		3	Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan
		4	Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan
		5	Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan
		6	ldentifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana
200		Ü	pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan
290	Pengawas Perikanan Ahli Pertama		Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan
			Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan pengawasan perikanan
		2	Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		3	Penanganan pelanggaran bidan perikanan
291	Pengawas Radiasi Ahli Pertama		Kemampuan Umum: UU No. 10 Tahun 1997
			Kemampuan Khusus:
		1	Organisasi BAPETEN (Peraturan BAPETEN No 9 Tahun 2020)
		2	Peraturan, nilai, tusi, dan tata Kelola ASN dan jabatan fungsional pengawas radiasi
			Fisika Nuklir
			Proteksi Radiasi (Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2013)
			Teknologi Nuklir Pengelolaan Limbah Radioaktif (PP No 61 tahun 2013
292	Pengawas Salvage dan Pekerjaan		Kemampuan Umum:
	Bawah Air	1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		-	Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
00.7		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
293	Pengawas Transportasi Darat	-1	Kemampuan Umum:
			Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun
		2	2004 tentang Jalan
			<u> </u>

Halaman 64 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
		4	PM Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5	PM Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6	PM PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
		1	Kemampuan Khusus: Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
			Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
			Operasional terminal angkutan jalan Operasional angkutan jalan
	ľ		Perencanaan dan organisir kegiatan operasional transportasi
			Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
	+		Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat Transportasi darat ramah lingkungan
		9	Infrastruktur transportasi darat
			Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
			Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
294	Pengawas Transportasi		Kemampuan Umum:
	Perkeretaapian	2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
		7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
		1	Kemampuan Khusus: Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
			Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
			Pengaturan perjalanan kereta api Awak sarana perkeretaapian
		5	Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas,
			angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		<u>6</u> 7	Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
295	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir		Kemampuan Umum:
	Ahli Pertama		Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus:
		1	Perencanaan Tata Ruang laut dan Zonasi Kawasan
			Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
			Valuasi Ekonomi Sumber daya Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Kecil
296	Pengelola Keprotokolan		Kemampuan Umum: Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan
		1	perundang-undangan
		2	Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang- undangan
		3	Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokoler berdasarkan peraturan perundang-undangan
			Kemampuan Khusus: Pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
		1	keprotokolan Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
		2	keprotokolan Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
		3	bidang keprotokolan
		4	Pelayanan keprotokolan terkait tata cara protokol internasional sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang keprotokolan
207	Pangalala Kasahatan Ikan Ahli	5	Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
297	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama		Kemampuan Umum: Kebijakan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya
			Kemampuan Khusus:
			Penyiapan dan pelaksanaan Pengendalian Penyakit Ikan Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya
			Pengelolaan Laboratorium Kesenatan ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya Pengendalian Residu
		4	Konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penataan obat ikan Pengendalian
I I	l	•	Peredaran Obat Ikan

Halaman 65 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		5	Konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur rehabilitasi kawasan Lingkungan Perikanan Budidaya
298	Pengelola Keselamatan	6	Konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya Kompetensi Umum:
	Ketenagalistrikan	1	Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan
		2	Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang keselamatan ketenagalistrikan
		1	Kompetensi Khusus: Pengetahuan terkait permohonan registrasi sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik
			Pengetahuan pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
			SNI Wajib Ketenagalistrikan
			Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh badan usaha ketenagalistrikan Sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan keselamatan ketenagalistrikan
			NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan
		7	Aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi
			Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah
		9	Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dalam rangka penghargaan bidang keselamatan
		10	ketenagalistrikan
299	Pengelola Layanan Kelautan dan		Kemampuan Umum:
	Perikanan		Pedoman tentang pembudidayaan ikan
		_	Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan terkait UU dan PP
		4	Peraturan Kelautan dan Perikanan
		_	Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
			Sistem manajemen keamanan pangan
			Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Penganalan bahan baku hasil perikanan
			Pengenalan bahan baku hasil perikanan Strategi Kebijakan Ekonomi Biru Bidang Kelautan dan Perikanan
			Dasar-dasar/falsafah penyuluhan perikanan
		11	Inovasi Difusi dan Adopsi
		<u> </u>	Kemampuan Khusus:
			Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
		_	Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan
		_	Cara Penanganan Ikan yang Baik
			Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
			Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
			Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		9	Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
		10	Identifikasi data kesesuaian dan kelayakan kawasan
		11	ldentifikasi data kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keaneka ragaman hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis ikan
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Materi Teknis Kawasan Kelompok Sumberdaya Ikan
			Identifikasi komponen kapal perikanan
			Identifikasi Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
		16	Identifikasi komponen mesin dan alat penangkapan ikan
			Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
		_	Sistem manajemen keamanan pangan Sistem manajemen mutu pengujian
			Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		21	Ketertelusuran dan penarikan produk pangan
			Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
			Pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
			Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan
		26	Akses teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan
			Kemitraan Usaha dan Pembiayaan/permodalan sektor kelautan dan perikanan
300	Pengelola Layanan Kesehatan	28	Pengolahan Data, Produktivitas dan Skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan Kemampuan Umum:
- 30			UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN; Core Value ASN BerAkhlak; PP 11 Tahun 2017; PP 17 Tahun 2020
			Kemampuan Khusus:
			Regulasi terkait dengan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan
			Regulasi terkait promosi kesehatan, standar kompetensi nakes
			Jaminan kesehatan nasional Etika dan hukum kesehatan
			Regulasi kesehatan dan keselamatan kerja
			Regulasi terkait perencanaan bidang kesehatan
301	Pengelola Pemberdayaan		Kompetensi Umum:
	Perempuan dan Perlindungan Anak		Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		1	Kompetensi Khusus: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan
	ı		n ooganan ternan noodalaan geneen, perinberdayaan dan perindungan perempuan

Halaman 66 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak
		3	Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak
302	Pengelola Penanganan Perkara		Kemampuan Umum:
			Pancasila
			Kewarganegaraan Pengantar Ilmu Hukum
			Pengantar Hukum Indonesia
			Geografi
			Ekonomi
			Sejarah
		8	Sosiologi
		9	Seni dan Budaya
			Olahraga
			Politik
			Agama
		13	Teknologi Komampuan Khususi
		1	Kemampuan Khusus: Perundang-Undangan tentang Kejaksaan
			Administrasi Data
			Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data
			Penyusunan Laporan
			Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana
			Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata
303	Pengelola Pencarian dan Pertolongan		Kompetensi Umum:
			Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Menteri PANRB Nomor 33 Tahun 2021
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja
		6	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
		7	Sarana Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
			Pertolongan
		8	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan
		0	Pertolongan
		9	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian
			dan Pertolongan Indonesia
		10	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian
		11	dan Pertolongan
		12	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan
			Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		10	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan
		13	Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
		14	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
		15	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengakraditasian Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Peruntuhan Raggusan
			Pengakreditasian Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan Kompetensi Khusus:
		1	Teknik operasi SAR di gunung dan hutan
			Teknik operasi SAR di ketinggian
			Teknik operasi SAR di perairan
			Teknik pertolongan pertama
304	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
	Ahli Pertama		Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK
			Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan
			Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan
			Perumusan organisasi pengadaan
			Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan
			Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi
		ď	Reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan
		9	pengelolaan sanggah
			Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah
			Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan/atau spesifik
			Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
			Data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
			Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
			Pembentukan tim pengelola kontrak
		16	Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

Halaman 67 dari 103

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Serah terima hasil pengadaan barang/jasa pemerintah
			Evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk kuitansi, bukti
			Risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
		21	ldentifikasi dan pengumpulan bahan/data/informasi untuk melakukan persiapan dan pengendalian
			kontrak, serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa Perencanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan persiapan pengadaan barang/jasa secara
		22	swakelola
			Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola Pengawasan pengadaan barang/jasa secara swakelola
			Risiko pengadaan barang/jasa secara swakelola
		26	Identifikasi dan pengumpulan bahan, data, dan informasi dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola
305	Pengelola Peralatan Keselamatan		Kemampuan Umum:
	Pelayaran		Matematika Dasar
			Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
			Sistem Manajemen Kapal
			Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
			Konstruksi dan Stabilitas Kapal
			Mesin Penggerak Utama Mesin Bantu
			Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
			Ilmu Bahan
			Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
306	Pengelola Produksi Perikanan		Kemampuan Umum:
	Tangkap Ahli Pertama		Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
		-1	Kemampuan Khusus: Dinamika populasi, Keragaan SDI, Daerah Penangkapan Ikan dan Pengumpulan Data Perikanan
		2	Rancang bangun kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan Metode Penangkapan Ikan
			Melaksanakan tata kelola pengawakan kapal perikanan
		4	Permesinan kapal perikanan, alat bantu penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan dan tingkah laku
			ikan
007	Danasalala Diimaala Amaan	5	Fungsi, Klasifikasi, Fasilitas dan Aktivitas Pelabuhan Perikanan
307	Pengelola Rumah Aman		Kemampuan Umum: Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Aman
			Kemampuan Khusus:
		1	Pemenuhan Persyaratan Penempatan
			Persiapan Perlindungan
			Pelaksanaan Perlindungan
			Pengamanan dan Pengawalan Program Perlindungan
			Pemantauan dan Pengendalian
		7	Penghentian Perlindungan
308	Pengelola Sumber Daya Air Ahli		Kompetensi Umum:
	Pertama	1	Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
		2	Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air
			Kompetensi Khusus:
			Pengelolaan Sumber Daya Air
			Pengelolaan Sungai Pengelolaan Daerah Pantai
			Pengelolaan Dainase Utama Perkotaan
			Pengelolaan Daerah Irigasi
			Pengelolaan Daerah Rawa
			Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku
			Pengelolaan Bendungan Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
309	Pengembang Buku Elektronik	J	Kompetensi Umum:
		1	Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan
			Penerapan proses pemerolehan naskah buku
			Bentuk, jenis, dan isi buku
			Aspek legalitas dan etika penerbita buku Penerapan standar mutu buku
			Ekosisten dan pelaku perbukuan
			Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
		8	Bagian-bagian buku
		9	Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
		1	Kompetensi Khusus: Proses produksi
			Proses produksi Regulasi perbukuan
			Pengembangan aset audio visual
<u></u>		4	Perakitan buku elektronik

Halaman 68 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
310	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
	renama	2	Pengantar pemetaan potensi kewirausahaan Pengantar pemetaan data kewirausahaan
			Pengantar analisis usaha
			Kolaborasi stakeholder
			Pengantar pengembangan teknologi informasi usaha
	+		Pengantar asesmen teknologi informasi dalam usaha Pengantar inkubasi wirausaha
			Pengantar pembiayaan wirausaha
			Pengantar pengembangan permodalan wirausaha
			Pengantar pengembangan ekosistem bisnis
			Pengantar kurikulum kewirausahaan
	+	12	Pengantar pengembangan kewirausahaan Kemampuan Khusus:
		1	Praktik pemetaan potensi kewirausahaan
			Perumusan konsepsi survey
			Praktik analisis usaha
	}		Konsultasi bisnis Praktik konsultasi bisnis
			Pendampingan usaha
			Praktik pendampingan usaha dalam lingkup perizinan dan pembukuan
		8	Praktik pengembangan usaha baru berbasis teknologi
			Praktik pengembangan inkubator wirausaha pemerintah atau swasta
			Pengembangan ekosistem bisnis Kebijakan kewirausahaan
			Program pengembangan kewirausahaan
			Pemantauan pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan pengembangan kewirausahaan
		14	Praktik pemantauan pengembangan UMK
311	Pengembang Kurikulum Ahli Pertama		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
			Model konsep kurikulum
			Landasan pengembangan kurikulum
			Prinsip pengembangan kurikulum
			Komponen kurikulum
			Inovasi kurikulum Ekosistem pengembangan kurikulum
			Pengelolaan kurikulum
			Kerangka program pengembangan kurikulum
			Pengumpulan data untuk penyusunan program pengembangan kurikulum
			Perbaikan draf kurikulum Petunjuk pelaksanaan uji coba draf kurikulum
			Naskah pengarahan kegiatan uji coba draf kurikulum
			Uji coba draf kurikulum
	}		Pengumpulan dan klasifikasi data uji coba draf kurikulum Laporan hasil uji coba draf kurikulum
			Revisi draf kurikulum sesuai hasil analisis
			Rencana perbaikan draf kurikulum berdasarkan uji coba
			ldentifikasi draf kurikulum yang akan diperbaiki
			Pelaksanaan kegiatan perbaikan draf kurikulum Laporan hasil perbaikan draf kurikulum
			Laporan nasii perbaikan draf kurikulum Program sosialisasi
			Pelaksanaan sosialisasi
			Pelaksanaan persiapan implementasi
			Koordinasi dengan instansi terkait Perencanaan kegiatan bimbingan teknis
			Perencanaan kegiatan bimbingan teknis Perencanaan kegiatan pemantauan
			Perencanaan kegiatan penelitian pengembangan kurikulum
312	Pengembang Tafsir Al Quran Ahli		Kemampuan Umum:
	Pertama	1	Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-
		2	Qur'an Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan
			Mushaf Al-Qur'an Makna dan arti kosakata bahasa Arab
			Struktur dan kaidah bahasa Arab
		5	Wawasan keislaman
			Perkembangan buku digital dan bentuknya
			Peran media sosial dalam publikasi dan diseminasi pengetahuan Ilmu komputer dasar
		U	Kemampuan Khusus:
			Ilmu Asbabun Nuzul
			Ilmu Makkiyyah dan Madaniyyah
			Ilmu Muhkam dan Mutasyabih Ilmu Nasakh wa Mansukh
			ılmu Nasakn wa мansukn Ilmu Kisah Al-Qur'an
			Ilmu Qiraat Al-Qur'an
	: •		

Halaman 69 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Nama dan proses turun dan sejarah pembukuan Al-Qur'an Manuskrip AL-Qur'an
			мализкир AL-Qur'an Terjemahan Al-Qur'an, pengertian, sejarah dan metodenya
			Implementasi bahasa Arab dalam penerjemahan Al-Qur'an
			Diskursus tafsir dan ilmu tafsir
			Metode dan corak penafsiran Sejarah dan dinamika perkembangan tafsir di Indonesia
			Bahasa Arab dan hubungannya dengan tafsir
			Isi dan kandungan beberapa surah dalam Al-Qur'an
	Pengembang Teknologi		Kompetensi Umum:
	Pembelajaran Ahli Pertama		Peraturan terkait jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan turunannya, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023
		_	Kompetensi Khusus:
			Analisis pengembangan teknologi pembelajaran Perancangan pengembangan sumber belajar
			Pengembangan sumber belajar berbasis aneka sumber
		4	Penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
			Difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran
314	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli	6	Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi Kemampuan Umum:
	Pertama		Regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir,
			laut, dan pengelolaan bahan dan limbah B3
			Kemampuan Khusus:
315	Pengendali Dampak Lingkungan		Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Kemampuan Umum:
	Terampil		Regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir,
	•		laut, dan pengelolaan bahan dan limbah B3
			Kemampuan Khusus:
216	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli		Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
	Perigendali Ekosisterii Hutari Arili Pertama	1	Kemampuan Umum: Wawasan Umum Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan
			Wawasan Umum Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
			Peraturan, Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
		4	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
		1	Kemampuan Khusus: Peraturan, Data dan Informasi Pengendali Ekosistem Hutan
		2	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
			Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
			Pengendalian Perubahan Iklim Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
317	Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	Ü	Kemampuan Umum:
		1	Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan
		2	Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan pengendali ekosistem
		3	hutan Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional PEH
			Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
			Wawasan umum terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
			Kemampuan Khusus:
		1	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
			Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
			Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
		7	Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Pelakkananan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pelabilitasi
		8	Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
		9	Rehabilitasi Hutan
			Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari
			Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
			Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
			Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengendalian Perubanan Iklim Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
			Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
	Pengendali Ekosistem Hutan	4	Kemampuan Umum:
	Terampil		Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan
			Dasar dasar kehutanan
	!		

Halaman 70 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		4	Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan
			Kemampuan Khusus: Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan
310	Pengendali Frekuensi Radio Ahli		Pengetanuan dasar bidang pengendalian ekosistem nutan Kemampuan Umum:
	Pertama	1	Peraturan Perundang-Undangan terkait Telekomunikasi
			Dasar-Dasar Telekomunikasi
			Komponen Elektronika
		4	Rangkaian Dasar Elektronika
			Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
			Dasar-Dasar Komputer
			Jaringan Komputer Perangkat Lunak
			Regulasi tentang Informatika
			Pemeliharaan Komputer
			Kemampuan Khusus:
		1	Antena, Propagasi, dan Saluran Transmisi
			Sistem Jaringan Telekomunikasi
			Modulasi Gelombang Radio
			Rangkaian Dasar Elektronika
			Rangkaian Elektronika Telekomunikasi Elektronika Digital
			Jaringan Komputer
			Perangkat Lunak
			Pemeliharaan Komputer
320	Pengendali Frekuensi Radio Terampil		Kemampuan Umum:
			Peraturan Perundang-Undangan terkait Telekomunikasi
			Dasar-Dasar Telekomunikasi
			Komponen Elektronika
			Rangkaian Dasar Elektronika Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
			Dasar-Dasar Komputer
			Jaringan Komputer
			Perangkat Lunak
		9	Regulasi tentang Informatika
		10	Pemeliharaan Komputer
			Kemampuan Khusus:
			Antena, Propagasi, dan Saluran Transmisi
			Sistem Jaringan Telekomunikasi Modulasi Gelombang Radio
			Rangkaian Dasar Elektronika
			Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
			Elektronika Digital
		7	Jaringan Komputer
			Perangkat Lunak
		9	Pemeliharaan Komputer
	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	4	Kemampuan Umum:
	Ahli Pertama		Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
			Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
			Organisasi kesehatan hewan aguatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
			Permen PAN RB nomor 46 tahun 2022
		6	Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi,dan aturan KKP lain yang berkaitan
		J	dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
			Kemampuan Khusus:
		1	Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan - mampu menyebutkan dan
		2	menjelaskan tugas dan fungsi karantina Sanitary PhytoSanitar y(SPS) Agreement terhadap perlindungan kesehatan manusia, hewan dan
			tumbuhan Organisasi kecebatan bewan aguatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
			Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH) Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP
			Permen KP nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan media pembawa
			Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
			Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi karantina Ikan (IKI)
		8	Permen KP nomor 32 tahun 2012 tentang jenis tatacara, penerbitan dan format dokumen tindakan
		9	karantina Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan pembudidayaan peredaran dan
			pengeluaran jenis ikan yang berbahaya Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa katrantina ikan mutu dan
		10	keamanan hasil perikanan Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi,dan aturan KKP lain yang berkaitan
			INSPIRED N. HOHOL LIGHUH 2021 TEHRARU JEHR IKAH YAHU UHHUUHULUAH ARMATAN MATU VAHO DERKARAN
		11	dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi

Halaman 71 dari 103

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab golongan dan media pembawa
			Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
			Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif Pengelolaan laboratorium
			Teknik pengambilan sampel
322	Pengendali Kedaruratan Pengelolaan		Kemampuan Umum:
	Limbah Bahan Berbahaya Beracun	2	Dasar-dasar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3)
			Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
			Penyusunan Program Kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan NonB3
		5	Penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan NonB3
		1	Kemampuan Khusus: Pengelolaan B3
			Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
			Penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan Non B3
			Penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan Non B3 Pemulihan fungsi lingkungan hidup
			Pemahaman kebencanaan
			Pengelolaan sampah
			Prosedur tindakan pencegahan risiko bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja
			Perubahan Iklim Prosedur tindakan mitigasi risiko bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja
		11	Prosedur tindakan penanganan risiko bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja
0.55			Aspek Pencemaran Lingkungan
323	Pengendali Konten Internet	1	Kemampuan Umum: Pembuatan Konten Digital
			Pemasaran Media Sosial
		3	Pemasaran Konten
			Blogging dan Penulisan Online
			Video Marketing dan Produksi Podcasting
			E-commerce dan Perdagangan Online
		8	Strategi Media Sosial
			Iklan Online dan PPC (Pay-Per-Click)
			Manajemen Reputasi Online Penggunaan Media Sosial untuk Bisnis
			Keterlibatan Pengguna dan Komunitas Online
		13	Email Marketing
		14	Personal Branding di Internet Kemampuan Khusus:
		1	Pengoptimalan Mesin Pencari (SEO)
			Desain Web dan Pengembangan
			Analistik Web dan Pengukuran Data
			Keamanan dan Privasi Online Hak Cipta dan Lisensi Konten Digital
			Grafis dan Desain Visual untuk Web
			Pengembangan Aplikasi Mobile
			Strategi Konten Multiplatform
			Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) di Web Blockchain dan Implikasinya pada Konten Web
			Kecerdasan Buatan (Al) dalam Pembuatan Konten
			Etika dan Hukum dalam Konten Digital
			Analisis Sentimen pada Media Sosial Internet of Things (IoT) dan Konten Web
324	Pengendali Organisme Pengganggu	14	Kompetensi Umum:
	Tumbuhan Ahli Pertama		Regulasi terkait OPT/DPI
			Budidaya tanaman
			Pengetahuan umum OPT/DPI Pengendalian OPT/penanganan DPI secara umum
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengenalan OPT
			Pengenalan dan penanganan DPI Musuk alami
			Musuh alami Pengendalian OPT
			Koleksi OPT
		6	Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
325	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	1	Kompetensi Umum: Regulasi terkait OPT/DPI
	Tambunun Tolliula		Regulasi terkait OP1/DPI Budidaya tanaman
		3	Pengetahuan umum OPT/DPI
		4	Pengendalian OPT/penanganan DPI secara umum
		1	Kompetensi Khusus: Pengenalan OPT
			Pengenalan dan penanganan DPI
• !	ı	_	, p g

Halaman 72 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Musuh alami
			Pengendalian OPT Koleksi OPT
			Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
326	Pengendali Organisme Pengganggu	•	Kompetensi Umum:
	Tumbuhan Terampil	1	Regulasi terkait OPT/DPI
			Budidaya tanaman
			Pengetahuan umum OPT/DPI
			Pengendalian OPT/penanganan DPI secara umum Kompetensi Khusus:
			Pengenalan OPT
			Pengenalan dan penanganan DPI
			Musuh alami
			Pengendalian OPT
			Koleksi OPT Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
327	Pengevaluasi Penerbangan	0	Kemampuan Umum:
	- engermone constant	1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
			Peraturan pemerintah No. 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang penerbangan
		3	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
			ICAO Annexes
		5	Kemananan Khusus
		1	Kemampuan Khusus: Peralatan di Bandar Udara
			a. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
			b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara.
			c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.
			d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan.
			e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome).
		2	Fasilitas di Bandar Udara
			a. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
			b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara.
			c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.
			d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan.
			e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome).
			Keamanan Penerbangan a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
			b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur
			Penerbangan; d. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
			Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome); e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.
			f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access
			Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara. g. Keudaraan.
		4	Keselamatan Penerbangan
			a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara;
			b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
			c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139- 10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;

Halaman 73 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan.
			e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 038 Tahun 2017 Tentang Apron Management Service.
		5	Perawatan peralatan penerbangan
			a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 145 Amandemen tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara;
			b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1
			Amendment 0);
			c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; d. Advisory Circular 171 – 05 Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan;
			e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan.
		6	Operasi Pesawat Udara
			a. Civil Aviation Safety Regulation Part 61 Licensing of Pilots and Flight Instructors; b. Civil Aviation Safety Regulation Part 91 General Operating and Flight Rules;
			c. Civil Aviation Safety Regulation Part 135 Certification and Operating Requirement: For Commuter and Charter Certificate Holders;
			d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;
			e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.
328	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	_	Kemampuan Umum:
	Pertama		Jabatan Fungsional Tugas, Fungsi dan Peran Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Desa,
		_	Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Identifikasi khalayak sasaran penggerakan
		3	Iderittirkasi kriatayak sasarari penggerakari Kemampuan Khusus:
			Desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
			Kelembagaan desa
			Peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
			Kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi Konsep Kemandirian Masyarakat
			Jejaring Kemitraan dan Inovasi
			Pemberdayaan Masyarakat Sosiologi Perdesaan
		9	Perubahan Sosial dan Perubahan Budaya
329	Penghulu Ahli Pertama	10	Komunikasi dan Gerakan Perubahan Kemampuan Umum:
323	. S. gridia / i iii i Ortania		UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
			UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama
			Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
			Profil Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah
			Cara membaca Al-Qur'an Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris
			Kemampuan Khusus:
			UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
		3	PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
			Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBPNR)
			PP Nomor 59 Tanun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikan Hujuk (PNBPNH) Kompilasi Hukum Islam
			Fikih Munakahat Klasik
			Fikih Munakahat Kontemporer Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimasislaman
			Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimasislaman
		11	PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
330	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula		Kemampuan Umum:
			Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
		4	Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
			Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	l l	6	Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

Halaman 74 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		7	Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor
		8	Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
		1	Kemampuan Khusus: Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor
		2	Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor
			Sistem kendaraan bermotor
			Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
			Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor
			Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor SDM pengujian kendaraan bermotor
			Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor
331	Penguji Kendaraan Bermotor		Kemampuan Umum:
	Terampil	1	Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
			Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor
			Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
			Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor
		8	Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
		Ť	Kemampuan Khusus:
			Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor
			Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor
			Sistem kendaraan bermotor Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
			Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor
			Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor
			SDM pengujian kendaraan bermotor
		8	Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor
	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	-	Kemampuan Umum:
	Reija Ailii Feitailia		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
			Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
			Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
		5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
			Kemampuan Khusus:
			Perencanaan kegiatan K3
			Pengujian K3
			Pengujian kompetensi K3 Pengendalian K3
			Pengkajian K3
			Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
333	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	1	Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi
			Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		3	Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi
		4	Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi atau pengembangan skema sertifikasi/inspeksi
334	Penguji Mutu Barang Pemula	1	Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi, penyiapan contoh uji dan pengujian tingkat kesulitan l
		2	Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		3	Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		4	Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi
335	Penguji Mutu Barang Terampil	1	Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh dan pengujian/kalibrasi Tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 2
		2	Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu
		3	Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu
			Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar
		4	Pengnitungan persediaan, veriikasi kesesualan dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi
336	Penguji Perangkat Telekomunikasi		Kemampuan Umum:
	Ahli Pertama	1	Dasar-dasar Elektronika
I .		2	Dasar-dasar Kelistrikan

Halaman 75 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

3 Suest Telekomunikasi Setuler 5 Sistest 7 Sistest 7 Sistest 8 Sistest 9 Sistest 9 Sistest 10 Parangiar Lurisk 11 Dasar Elektromagnisk 12 Parangiar Lurisk 11 Dasar Elektromagnisk 12 Parangiar Lurisk 13 Parangiar Lurisk 14 Pathurangiar Romagnisk 15 Parangiar Sistest 16 Sistest 17 Statistica 18 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 11 Sistest 11 Sistest 12 Sistest 13 Sistest 14 Sistest 15 Sistest 16 Sistest 16 Sistest 17 Sistest 18 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 11 Sistest 11 Sistest 12 Sistest 13 Sistest 14 Sistest 15 Sistest 16 Sistest 16 Sistest 17 Sistest 18 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 11 Sistest 12 Sistest 13 Sistest 14 Sistest 15 Sistest 16 Sistest 16 Sistest 17 Sistest 18 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 19 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 10 Sistest 11 Sistest 12 Sistest 13 Sistest 14 Sistest 15 Sistest 16 Sistest 16 Sistest 17 Sistest 18 Sistest 19 Si	NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
5 Salesir 6 Ractor 7 Androma 8 Dissacridation Komputer 3 Dissacridation Komputer 3 Dissacridation Komputer 3 Dissacridation Register 11 Dissacridation State Plant				
6 Radar 7 Antenna 8 Disar disar Komputer 10 Pernoplat Linds 9 Jampan Komputer 11 Person (Pernoplat Linds) 11 Person (Person (P			_	
8 Desar-disser Komputer 10 Perangkat Lunak 11 Pasar Elektronagneik 11 Pasar Elektronagneik 12 Parameter RP 13 Desar Meterrangian Gelombang 11 Peraneter RP 15 Desar Meterrangian Gelombang 16 Desar Meterrangian Gelombang 17 Satistika 18 Junean Desar Meterrangian Gelombang 19 Satistika 19 Desar Gelombang 19 Desar Gelombang 10 Desar Gelombang 10 Desar Gelombang 10 Desar Gelombang 10 Desar Gelombang 11 Desar Gelombang 12 Desar Gelombang 13 Desar Gelombang 14 Panghalan Digital 15 Desar Elektronagneik 16 Desar Gelombang 19 Desar Gelombang 19 Desar Gelombang 10 Desar Gelombang 10 Desar Gelombang 10 Desar Gelombang 10 Desar Gelombang 11 Desar Gelombang 12 Desar Gelombang 13 Desar Gelombang 14 Panghalan Digital 15 Desar Gelombang 16 Desar Gelombang 18 Desar Gelombang 19 Desar Gelombang 19 Desar Gelombang 10 De				
Perception Per			7	Antenna
10 Pearguist Lunak 11 Dasar Elektromagnetis 12 Parameter RF 13 Dasar Mohasel 14 Presument dan Prajing Gelombang 15 Persportunasia Komputer 16 Ustreat Dipital 17 Nemangana Khusus: 1 Ossar dasar Elektromagnetis 1 Ossar Bestromagnetis 2 Ossar Bestromagnetis 3 Ospar Bestromagnetis 3 Ospar Bestromagnetis 4 Prapipila Osparit 5 Ossar Bestromagnetis 1 Ossar Bestromagnetis 1 Ossar Bestromagnetis 1 Ossar Bestromagnetis 2 Ossar Bestromagnetis 3 Ospar Bestromagnetis 3 Ospar Bestromagnetis 3 Ospar Bestromagnetis 4 Prapipila Osparit 5 Ossar Bestromagnetis 6 Preduction and Prajing Gelombang 7 Ospar Bestromagnetis 1 Ossar Bestromagnetis 1 Ossar Bestromagnetis 1 Ossar Bestromagnetis 1 Ossar Bestromagnetis 1 Ossar Bestromagnetis 2 Ossar Bestromagnetis 3 Ospar Bestromagnetis 3 Ospar Bestromagnetis 3 Ospar Bestromagnetis 4 Ossar Bestromagnetis 5 Ossar Bestromagnetis 6 Ossar Bestromagnetis 6 Ossar Bestromagnetis 7 Ospar Bestromagnetis 8 Ossar Bestromagnetis 8 Ossar Bestromagnetis 9 Ossar Bestro				
11 Dasar Dektromagneks 12 Parameter RFF 13 Dasar Modulai 14 Fretuene dan Parjaing Gelombang 15 Penguporasian Komputer 16 Linices Digital 17 Dasar Sana Perkeretaapian 18 Dasar Sana Perkeretaapian 19 Dasar Sana Perkeretaapian 2 Dasar Sana Perkeretaapian 2 Dasar Sana Perkeretaapian 2 Dasar Sana Perkeretaapian 2 Dasar Sana Perkeretaapian 2 Dasar Sana Perkeretaapian 2 Dasar Sana Perkeretaapian 2 Dasar Sana Perkeretaapian 2 Dasar Sana Perkeretaapian 3 Dempuji Sarana Perkeretaapian 3 Dempuji Sarana Perkeretaapian 3 Dempuji Sarana Perkeretaapian Arii 3 Penguji Sarana Perkeretaapian Arii 4 Pertimo 3 Penguji Sarana Perkeretaapian Arii 5 Penguji Sarana Perkeretaapian Arii 6 Penguji Sarana Perkeretaapian Arii 7 Penguji Sarana Perkeretaapian Arii 8 Permenyan Sana Sana Sana Sana Sana Sana Sana				
12 Parameter RF 13 Obser Modulasi 14 Prevuensi dan Pariang Gelombang 15 Prevpoper pasar Komputer 16 Literaal Digital 17 Slatistiks 18 Prevpoper pasar Komputer 18 Literaal Digital 19 Cosser Geloster Meliteriksan 2 Doser Geloster Meliteriksan 2 Doser Geloster Meliteriksan 3 Doser Meliteriksan 3 Doser Meliteriksan 3 Doser Geloster Geloster Meliteriksan 3 Doser Geloster Geloster Meliteriksan 3 Doser Geloster				
14 Frekuensi dan Parjaing Gelombang 15 Penguparaian Kompuler 16 Ulerasi Digital 17 Satateiban 18 Penguparaian Kompuler 18 Dasar-dasar Elektronikan 2 Dasar-dasar Elektronikan 3 Dogoth 3 Dogoth 4 Dasar-dasar Elektronikan 3 Dogoth 5 Dasar-dasar Elektronikan 9 Dasar-dasar Kelistrikan 9 Dasar-dasar Kelistrikan 9 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Elektronikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 9 Dasar-Basar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Digital 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasar Kelistrikan 1 Dasar-dasa			_	
15 Pengapperasian Komputer				
February February				
17. Satistika (
Kemampuan Khusus:				
Dasar-dasar Kelektronika 2 Dasar-dasar Kelektronika 3 Optik 4 Parapkalan Digital 5 Dasar Elektroniagnetik 5 Dasar Elektroniagnetik 5 Postungaretik 6 Prekurangaretik 6 Prekurangaretik 6 Prekurangaretik 7 Daya RF, gain dan atteruasi 8 Antenna dan Propagasi 9 S-Parameter 10 Komponen RF 17 Electromagnetic Compatibility (EMC) 12 Alla Prengula Prekardorian 13 Literas Digital 14 Statistika 14 Statistika 14 Statistika 14 Statistika 14 Statistika 14 Statistika 14 Statistika 15 Daya Republika 16 Day			<u> </u>	
3 Sqrik			1	
A Rangkaan Dipital			_	
Source Elektromagnetik			_	
Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Pertama Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perkeretaapian Ahli Perker				
Penguji Prasarana Perkeretaapian			_	
8 Antenna dan Propagasi 9 S. Parameter 10 Komponen RF 11 Electromagnetic Compatibility (EMC) 12 Alat Pengolah Perkantoran 13 Utrasa Digital 14 Statistika 15 Herisa Digital 14 Statistika 16 Herisan Digital 16 Herisan Digital 17 U.N. 23 Tahun 2017 Tentang Perkeretaapian 18 Pertama 19 Pertama Perkeretaapian Umum: 19 Perkerutan Perkeritah Ne 6 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian 19 Permenhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian Nemanan Perkeretaapian				
10 Komponen RF			8	Antenna dan Propagasi
11 Electromagnetic Compatibility (EMC) 12 Alat Pengolah Perkantoran 13 Later Stiglital 14 Statistika 15 Statistika 16 Ali Pertama 17 Ali Pertama 18 Ali Pertama 19 Ali Pertama 19 Ali Pertama 19 Ali Pertama 10 Uno 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 20 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 19 Pemerhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian 1 Pemerhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian 1 Pemerhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian 1 Pemerhub No. 87 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persiryalan Perkeretaapian 2 Pul 29 Tahun 2011 tentang Siasiun 3 Pul 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persiryalan Perkeretaapian 4 Pul 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persiryalan Perkeretaapian 5 Pul 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persiryalan Perkeretaapian 6 Rencarva kerja, prosedur, tala cara pengujian jalur dan bangunan, fasilitias pengoperasian kereta api sorta KS pelaksananan pengujian 8 Pertama 9 Pertama 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 2 Permenpan RB No. 32 Tahun 2002 tentang Perkeretaapian 3 Permenpan RB No 32 Tahun 2003 tentang Perkeretaapian 4 Peraturan Permeinah Nrusus 1 Dinamika sarana KA 1 Pernagai jabatan penguji sarana KA 1 Penguji astatis dan dinamis sarana 2 Perturan Permeinah Nrusus 3 Pola pengpoparasi sarana 4 Peraturan Permeinah Sarana KA 1 Perawatan sarana perkeretaapian 2 Peraturan Memerinah Sarana KA 1 Perawatan sarana perkeretaapian 2 Peraturan Memerinah Sarana KA 1 Perawatan sarana per				
12 Alat Pengolah Perkantoran 13 Luterasi Digital 14 Lensai Digital 15 Lensai Digital 15 Lensai Digital 15 Lensai Digital 16 Lensai Digital 16 Lensai Digital 17 Lensai Digital 18 Lensai Digital 18 Lensai Digital 18 Lensai Digital 19 Le			_	
13 Literas Digital 14 Statistika 15 Statistika 16 Statistika 17 LiU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 18 Pertama 19 Pertauran Permeintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perupelenggaraan Perkeretaapian 19 Permenhun No 87 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian 19 Permenhun No 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian 10 Permenhun No 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian 10 Permenhun No 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian 10 Permenhun No 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian 10 Permenhun No 87 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian 10 Permenhun No 87 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian 10 Permenhun No 87 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian 12 Penguji Sarana Perkeretaapian 13 Permenhun No 87 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian 15 Pertama Perkeretaapian Perkeretaapian 16 Pertama Perkeretaapian 17 Permenhan No 87 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 18 Permenhan No 87 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 19 Permenhan No 87 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 10 Permenhan No 87 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 10 Permenhan No 97 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 10 Permenhan No 98 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 10 Permenhan No 98 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 10 Pergujian statis dan dinamis sarana 10 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 10 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 10 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 11 Perawana Permentinah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 12 Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang P				
Romanpuan Umum: 1 UU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Permerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Pernyelenggaraan Perkeretaapian 2 Perrenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian Permenihub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Nomerina 2 Permenpan RB No. 33 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Nomerinaga Penguji Sarana Perkeretaapian Sarana Perkeretaapian Nomerinaga Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 2 PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun 3 PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian PM 55 PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian Perseratapian Perkeretaapian Pertama Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Pertama Perkeretaapian Perk			_	
Ahli Pertama 1 UU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian			14	
2 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 3 Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian Permenpan RB No 33 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian Sarahan Perkeretaapian Kemampuan Khususi: 1 PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api 2 PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun 3 PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian 4 PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian 6 Rencana kerja, prosedur, taka cara pengujian jalur dan bangunan, fasilitas pengoperasian kereta api serla K3 pelaksanaan pengujian 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 2 Pertama 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 2 Permenpan RB No. 32 Tahun 2022 2 Memampuan Rhususi 1 Dinamika sarana 2 Sarana Tanpa Penggerak 3 Sarana Tanpa Penggerak 4 Sarana Peralatan Khusus 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 1 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Penguji saratal KA 14 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 19 KSL 10 No identitas sarana perkeretaapian 2 Perkeretaapian 3 Sarana Tanpa Permenintah Si Tahun 2009 Tentang Perkeretaapian 19 KSL 10 Penguji Sumber Daya Manusia 10 Perkeretaapian Demenintah Si Tahun 2009 Tentang Perkeretaapian 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perkeretaapian 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perkeretaapian 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perkeretaapian 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perkeretaapian 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 19 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Derubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian 19			ļ.,	
Pernyelenggaraan Perkeretaapian		Anii Pertama	1	
3 Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian			2	
Permenhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian			3	
Kemampuan Khusus: 1 PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api 2 PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun 3 PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian 4 PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian 5 PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian 6 Rencana kerjia, prosedur, tata cara pengujian jalur dan bangunan, fasilitas pengoperasian kereta api serta K3 pelakasnaan pengujian 7 Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 8 Pertuana Perkeretaapian Ahli Pertuana Perherubungan Tahun 2011 9 Permenpan RB No. 32 Tahun 2022 Kemampuan Khusus: 1 Dinamika sarana 2 Sarana Berpenggerak 3 Sarana Tana Pengerak 4 Sarana Berpenggerak 4 Sarana Peralatan khusus 5 Sietem Mekanik Sarana KA 5 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRI. 10 No identitas sarana KA 1 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRI. 10 No identitas sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 14 Perawatan sarana perkeretaapian 14 Perawatan sarana perkeretaapian 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 15 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 15 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan No			1	Permenhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan
1 PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api 2 PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun 3 PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian 4 PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian 5 PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian 6 Rencana kerja, prosedur, tata cara pengujian jalur dan bangunan, fasilitas pengoperasian kereta api serta K3 pelaksamaan pengujian 8 Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama 1 Indang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 2 PM Perhubungan Tahun 2011 3 Permenpan RB No. 32 Tahun 2002 4 Kemampuan Khusus: 1 Indang-Undang No 23 Tahun 2002 4 Kemampuan Khusus: 1 Indang-Undang No 23 Tahun 2002 4 Kemampuan Khusus: 1 Indang-Undang No 23 Tahun 2002 4 Kemampuan Khusus: 1 Indang-Undang No 23 Tahun 2002 5 Sarana Berpenggerak 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Peru			_	
Penguji Sarana Perkeretaapian Ahi Pertama Persupata Persup			-	
3 PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian				
4 PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian 5 Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama 8 Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama 9 Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 2 PM Perhubungan Tahun 2011 3 Permenpan BB No. 32 Tahun 2022 4 Kemampuan Khusus: 1 Dinamika sarana 2 Sarana Berpenggerak 3 Sarana Tanpa Penggerak 4 Sarana Peralatan khusus 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Perkeretaapian 9 Perkeretaapian 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pervlebahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pervlebahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pervlebahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pervlebahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pervlebahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pervlebahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 1 Perkeretaapian 1 Pengeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang				
Rencana kerja, prosedur, tata cara pengujian jalur dan bangunan, fasilitas pengoperasian kereta api serta K3 pelaksanaan pengujian Kemampuan Umum:				
Serta K3 pelaksanaan pengujian Kemampuan Umum: Kemampuan Billiang Perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 2 PM Perhubungan Tahun 2011 3 Permenpan RB No. 32 Tahun 2022 Kemampuan Khusus: 1 Dinamika sarana 2 Sarana Berpenggerak 3 Sarana Tanpa Penggerak 3 Sarana Tanpa Penggerak 4 Sarana Penggerak 4 Sarana Penggerak 4 Sarana Penggerak 5 Sistem Mekanik Sarana KA 5 Sistem Pengereman Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 14 Perawatan sarana perkeretaapian 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pervelenggaraan Perkeretaapian 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 15 Peraturan Ment			5	
Sarana Perkeretaapian Ahli Commonstration Commonstr			6	
Pertama 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian 2 PM Perhubungan Tahun 2011 3 Permenpan RB No. 32 Tahun 2022 Kemampuan Khusus: 1 Dinamika sarana 2 Sarana Berpenggerak 3 Sarana Tanpa Penggerak 4 Sarana Peralatan khusus 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana perkeretaapian 13 ISUH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 14 Perawatan sarana perkeretaapian 15 Kemampuan Umum: 16 Perkeretaapian 17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusparaan Perkeretaapian 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perusparaan Perkeretaapian 19 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 17 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 17 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 17 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian	338	Penguii Sarana Perkeretaapian Ahli		1 1 0 7
2 PM Perhubungan Tahun 2011 3 Permenpan RB No. 32 Tahun 2022 Kemampuan Khusus: 1 Dinamika sarana 2 Sarana Berpenggerak 3 Sarana Tanpa Penggerak 4 Sarana Peralatan khusus 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 KSLH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 13 KSLH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 15 KSLH 16 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 16 Kemampuan Umum: 17 Peravatan serana perkeretaapian 18 Perkeretaapian 19 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Peryelenggaraan Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 4 Perekeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			1	
Kemampuan Khusus: 1 Dinamika sarana 2 Sarana Berpenggerak 3 Sarana Tanpa Penggerak 4 Sarana Peralatan khusus 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 14 Perawatan sarana perkeretaapian 15 Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 16 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Pervebahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Derubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Derubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 16 Perkeretaapian 17 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			2	PM Perhubungan Tahun 2011
1 Dinamika sarana 2 Sarana Berpenggerak 3 Sarana Tanpa Penggerak 4 Sarana Peralatan khusus 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 15 Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pervelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Peryelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Peryelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			3	
2 Sarana Berpenggerak 3 Sarana Tanpa Penggerak 4 Sarana Peralatan khusus 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian 8 Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian Perkeretaapian Penkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian			1	
3 Sarana Tanpa Penggerak 4 Sarana Peralatan khusus 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Penggeranan Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			_	
4 Sarana Peralatan khusus 5 Sistem Mekanik Sarana KA 6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 15 Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian				
6 Sistem Pengereman Sarana KA 7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Perkeretaapian Perkeretaapian 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			4	Sarana Peralatan khusus
7 Instrument kabin masinis 8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			_	
8 Pola pengoperasian sarana 9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Kemampuan Umum: Perkeretaapian 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkerataapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian				· y - · · · · · · ·
9 KRL 10 No identitas sarana KA 11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian				
11 Fungsi jabatan penguji sarana KA 12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			9	KRL
12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian 13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian 14 Perawatan sarana perkeretaapian 15 Penguji Sumber Daya Manusia Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Per				
13 K3LH 14 Perawatan sarana perkeretaapian Rerkeretaapian Ferkeretaapian Perkeretaapian 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan				
14 Perawatan sarana perkeretaapian Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian				
Perkeretaapian Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			_	
Perkeretaapian 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian	339	Penguji Sumber Daya Manusia	Ė	
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian				Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Penyelenggaraan Perkeretaapian 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian				
4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			3	
5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian			4	
6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian				
Perkeretaapian 7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian				
			7	
		I	<u> </u>	inemanipuan Knusus:

Halaman 76 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
		2	Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
			Pengaturan perjalanan kereta api Awak sarana perkeretaapian
		_	Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas,
			angkutan dan keselamatan perkeretaapian Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
			Pengujian sumber daya manusia Perkeretaapian Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
340	Penilai Pemerintah Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
		3	Konsep dasar keuangan negara
			Konsep dasar pengelolaan BMN/D Mikro ekonomi dasar
		3	Kemampuan Khusus:
			Konsep dasar penilaian
			Penilaian properti dengan pendekatan pasar Penilaian properti dengan pendekatan biaya
		4	Penilaian properti dengan pendekatan pendapatan
			Konsep dasar penilaian bisnis Konsep dasar penilaian Sumber Daya Alam
			Analisis terpisah di bidang penilaian = analisis HBU
341	Penilik Angkutan Laut		Kemampuan Umum:
			Bahasa Inggris Maritim Teknologi Informatika
		3	Ilmu Ekonomi
	-		Kemampuan Khusus: Dasar-dasar kepelabuhanan
			Dokumen kepelabuhanan dan dokumen pengangkutan
			Peraturan nasional dan konvensi internasional
			Kepedulian lingkungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
			Sistem Manajemen Keselamatan Kapal
			Jasa dan Fasilitas Pelabuhan IMDG Code
			ISPS Code
			Manajemen Angkutan Laut
			Keagenan Logistik dan supply chain management
		13	Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal
	-		Manajemen mutu Manajemen perusahaan pelayaran
342	Penilik Kelaiklautan Kapal		Kemampuan Umum:
			Matematika dasar
			Bahasa Inggris Maritim Teknologi Informatika
		4	Kepedulian lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
	-	5	Sistem Manajemen Kapal Kemampuan Khusus:
		1	Peraturan nasional dan konvensi internasional
			Konstruksi dan stabilitas kapal
			Mesin Penggerak Utama Mesin Bantu
			Sistem kelistrikan kapal, elektronika dan sistem kontrol
			Ilmu bahan Perawatan dan perbaikan mesin induk dan bantu
343	Penilik Kenavigasian		Kemampuan Umum:
			Matematika dasar Fisika terapan
			Bahasa Inggris Maritim
		4	Teknologi Informatika
	-		Sistem manajemen kapal Budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan
			Kemampuan Khusus:
			Peraturan nasional dan konvensi internasional
			Sistem navigasi elektronik P2TL dan dinas jaga
		4	Prosedur darurat dan SAR
	-		Ilmu Pelayanan Datar Isyarat visual
			Teknik radio
			Perjanjian internasional terkait komunikasi (ITC dan SOLAS) Peraturan Radio
			Service document

Halaman 77 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Telepon Radio GMDSS
344	Penilik Kepelabuhanan	12	Kemampuan Umum:
	·		Bahasa Inggris Maritim
			Teknologi Informatika Ilmu Ekonomi
		3	Kemampuan Khusus:
			Dasar-dasar kepelabuhanan
			Dokumen kepelabuhanan dan dokumen pengangkutan
			Peraturan nasional dan konvensi internasional Kepedulian lingkungan
			K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
			Sistem Manajemen Keselamatan Kapal
			Jasa dan Fasilitas Pelabuhan IMDG Code
			ISPS Code
			Manajemen Angkutan Laut
			Keagenan Logistik dan supply chain management
			Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal
		14	Manajemen mutu
0 :-		15	Manajemen perusahaan pelayaran
345	Penjaga Menara Suar	1	Kemampuan Umum: Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
	•		Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaannya
			Kecakapan Bahari Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkalan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
	-		Pengenalan Permesinan Kapal Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
			Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-Undang terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
346	Penjaga Tahanan		Kemampuan Umum:
	-		UUD 1945, UU HAM, UU ASN Kemampuan Khusus:
			UU Pemasyarakatan, KUHP, KUHAP, Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, Permenkumhan Pengamanan Lapas dan Rutan, Permenpan JF Pengaman Pemasyarakatan
			UU Narkotika, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi
347	Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama		Nasional P4GN Tahun 2020-2024 Analisis data dan informasi terkait pengembangan standar mutu produk
577	. Sugariini Mata i Todak Allii i Bitailia		Analisis data dan informasi terkah penjanangan standar mutu produk Analisis data dan informasi terkah penjaian mutu
			ldentifikasi data dan informasi hasil audit dalam rangka penerapan sistem mutu
348	Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama	4	Kemampuan Umum:
	i Citama		Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an PMA No. 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an
		3	Kodifikasi Al-Qur'an
		4	Struktur kalimat dan perubahan kata dalam bahasa Arab
		1	Kemampuan Khusus: Ilmu Rasm
			Ilmu Dhabt
			Ilmu Waqaf Ibtida
349	Penyelam Scuba Kapal Kelas I	4	Kemampuan Umum
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim. Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
			Kemampuan Khusus
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi. Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR. Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5	Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
			Kecakapan Bahari. Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
1	ı	U	раза поролітрінан дан сто пода.

Halaman 78 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan. Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
			Dasar-dasar Akuntansi.
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut.
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait.
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal. Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
			Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
350	Penyelam Scuba Kapal Kelas II		Kemampuan Umum
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
			Kemampuan Khusus Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayarah Datar. Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya. Kecakapan Bahari.
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
			Dasar-dasar Akuntansi. Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut.
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
051	Danielana Carrie IV. and IV. lan III	18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
351	Penyelam Scuba Kapal Kelas III	1	Kemampuan Umum Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
			Kemampuan Khusus
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR. Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
			Dasar Pengetahuan tentang Sian Serak dan Fengendahan Kapal. Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
			Kecakapan Bahari.
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja. Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
			Dasar Pengetahuan tentang Penbengkelan. Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
			Dasar-dasar Akuntansi.
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut. Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait.
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
352	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	4	Kompetensi Umum:
			Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Peran Penyelidik Bumi terkait tugas dan fungsi instansi di
		2	lingkungan Kementerian ESDM/Instansi lain/Pemerintah Provinsi
			Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Sumber daya mineral (mineral radioaktif) dan energi (batubara,
			minyak dan gas bumi, panas bumi, energi baru terbarukan)
			Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Mitigasi bencana geologi
			Pengetahuan isu strategis: Minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, panas bumi, kebijakan satu peta (KSP), aturan pemanfaatan data minyak dan gas bumi (Permen ESDM No. 1 Tahun 2022), mitigasi
			bencana geologi, geopark, perubahan iklim global dan warisan geologi
			Kompetensi Khusus:
		1	Pengetahuan kajian data sekunder Geologi: petrologi-mineralogi, geomorfologi, cekungan sedimen
			tersier, struktur geologi-tektonik, vulkanologi Pengetahuan kajian data sekunder Geofisika: geofisika dasar, seismologi, metode geofisika, geostatistika,
		2	rengetanuan kajian data sekunder Georisika: georisika dasar, seismologi, metode georisika, geostatistika, geofisika global
		3	Pengetahuan kajian data sekunder Kimia: kimia dasar, kimia terapan, geokimia
		4	Pengetahuan kajian data sekunder Geodesi: geomatika, penginderaan jauh, kartografi
			Pengetahuan kajian data sekunder Fisika: fisika dasar, instrumentasi
			Pengetahuan kajian data sekunder Teknik Sipil: geologi teknik
		7	Pengetahuan kajian data Geologi: petrologi-mineralogi, geomorfologi, stratigrafi-sedimentologi- paleontologi, struktur geologi-tektonik, vulkanologi
			, <u> </u>

Halaman 79 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		8	- 3
			Pengetahuan kajian data Kimia: kimia dasar (persamaan reaksi kimia), kimia terapan, geokimia Pengetahuan kajian data Geodesi: penginderaan jauh
		11	Pengetahuan kajian data Teknik Sipil: geologi teknik
		12	Pengetahuan kajian data primer Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami (jenis gelombang dan kegempaan), gerakan tanah
		13	Pengetahuan kajian data primer Lingkungan dan Konservasi: tata ruang, air tanah, geopark, geologi teknik
		14	Pengetahuan kajian data primer Resources: minyak dan gas bumi, mineral (logam-bukan logam dan batuan), batubara, panas bumi
		15	Pemahaman mengenai pemetaan Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah
		16	Pemahaman mengenai pemetaan Lingkungan dan Konservasi: tata ruang, , air tanah, geopark, geologi teknik
		17	Pemahaman mengenai pemetaan Resources: minyak dan gas bumi, mineral (logam-non logam), batubara, panas bumi
		18	Pemahaman mengenai pemetaan Geologi, geofisika, geokimia
		19	Pengetahuan mengenai seluruh aspek data kebumian di dalam sistem informasi geografi yang terpadu dan terstruktur
		20	Pengetahuan mengenai aspek permodelan Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah
		21	Pengetahuan mengenai aspek permodelan Resource: minyak dan gas bumi, mineral (logam-non logam), batubara, panas bumi
252	Demyslidik Tindak Didana Kampai	22	Pengetahuan mengenai aspek permodelan Geologi, geofisika, geokimia
	Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama	1	Kemampuan Umum: Penanganan, Pengelolaan Data, dan Informasi terkait Tindak Pidana Korupsi
			Manajemen Dukungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
		3	Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kompetensi Khusus:
		1	Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
		2	Pelaksanaan Pelacakan Aset
			Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Penanganan Pertama Barang Bukti Elektronik
			Penyusunan pendapat dan kajian hukum terkait pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK
		6	Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK
		7	Pengelolaan pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
	Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
	Allii Fellallia		Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika
		2	Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN
		1	Kompetensi Khusus: Menyusun dan menyelesaikan berkas perkara
			Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait pemetaan jaringan kejahatan terorganisir narkoba
			Kemampuan dalam pelaksanaan prosedur penyelidikan
			Kemampuan untuk merumuskan Perencanaan dan melaksanakan Penindakan Peredaran Gelap Narkoba
355	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Buddha	-	Kompetensi umum:
	Penyulun Agama Buddha		Memahami regulasi tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023, PP 49/2018, PP 94/2021)
			Mampu menerapkan tugas pokok penyuluh agama (PermenPANRB 9/2021 tentang Penyuluh Agama)
			Mampu menerapkan Wawasan Kebangsaan (pancasila) Menerapkan Moderasi Beragama
			Menerapkan Komunikasi Publik
		6	memahami penggunakan IT dalam kegiatan penyuluhan
		1	Kompetensi khusus: Memahani dan Meneladan Kehidupan Siddharta Gautama
		2	Menganalisis Pancasila Buddhis dan Panca Dhamma
			Menganalisis penerapan Sifat Luhur Buddha Menganalisis penerapan Sila/Moralitas
			Menganalisis Puja dan Budaya Buddhis
		6	Menganalisis Konsep Empat Kebenaran Mulia
			Menganalisis Hukum Karma dan Tumimbal Lahir Menganalisis Hukum Tilakkhana
			Memahami Hukum Paticcasamuppada
			Memahami Misi Pembabaran Dhamma
			Memahami Kitab Suci Tripitaka Menganalisis Kesetaraan Gender dan HAM
			Memahami sejarah Perkembangan Agama Buddha
		14	Memahami persiapan bimbingan dan penyuluhan
OF.C	Donulluh Agoma Ahli Dortoma		Mampu mengidentifikasi masalah agama dan pembangunan sebagai dasar pendampingan dan mediasi
	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu	2	Kompetensi umum: PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Halaman 80 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN	<u> </u>	MATERI POKOK
	-	3	PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
			Memahami terkait syarat pendirian rumah ibadat
			memahami regulasi tentang pengelolaan dana punia
			Keputusan Dirjen Bimas Hindu No 85 Tahun 2023
		_	Menjelaskan dasar-dasar komunikasi efektif Deteksi dini konflik sosial
			Menerapkan teknologi dalam bimbingan penyuluhan
		Ů	Kompetensi khusus:
		1	Memahami kitab suci Weda
		2	Memahami Sejarah Agama Hindu
			Memahami Nyanyian
			Memahami Tri Kerangka Dasar Agama Hindu (sradha dan bhakti, susila dan acara)
			Konsep Tri Murti
			Menganalisis Karmapala Menganalisi pemikiran dalam Dharsana
			Menganalisis status Pandita dan Pinandita
		_	Menganalisis tugas dan kewajiban orang suci
			Menganalisis Tri Parartha
			Menganalisis Catur Guru
			Menganalisis Tri Hita Karana
			Menganalisis Tri Sandhya dan dinika upasana
05-		14	Menilai persembahyangan
	Penyuluh Agama Ahli Pertama -	L_	Kompetensi Umum:
	Penyuluh Agama Islam		Teori Pembinaan dan Pemberdayaan Umat Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat
			Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat
			Regulasi tentang penyelesaian konflik sosial dan keagamaan
			Penyelesaian Konflik keagamaan
		6	RAN PE Nomor 7 Tahun 2021 dan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
		7	Teknologi Informasi dan Komunikasi
			Analisis Data
		_	Retorika Dakwah
			Kelembagaan, Organisasi, Kepemimpinan, dan Hubungan Masyarakat
			Metodologi Bimbingan dan Penyuluhan Agama Manajemen bimbingan dan penyuluhan agama Islam
		12	Kompetensi Khusus:
		1	Agama dan Wabah
			Dakwah Digital
		3	Intoleransi Beragama
			Moderasi Beragama
		_	Kaidah Ushul
			ljtihad
			Sumber Hukum Islam Sejarah Peradaban Islam Indonesia
			Dinasti 'Abbasiyah
		_	Dinasti Umayyah
		_	Khulafaur Rasyidin
		12	Sirah Nabawiyah
		_	Shorof
			Nahwu
		_	Mu'amalah
			lbadah Akhlak Tercela
		_	Akhlak Terceja Akhlak Terpuji
		_	Ilmu tasawuf
			Ilmu Kalam
		_	Rukun Iman
			Mustholah Hadis
			Terjemahan Hadis
			Hafalan Hadis
		_	Ulumul Qur'an Tafsir
		_	Terjemahan Ayat
			Tajwid
358	Penyuluh Agama Ahli Pertama -	Ĺ	Kemampuan Umum:
	Penyuluh Agama Katolik	_	Mengidentifikasi kebijakan ASN merujuk UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
			Mengidentifikasi Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Guru
		3	Mengimplementasikan 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia
		<u> </u>	Kemampuan khusus:
			Memahami Kitab Suci Katolik perjanjian lama
			Memahami Kitab Suci Katolik perjanjian baru Mengindentifikasi kitab nabi-nabi
			nvienuinueniinkasi kitau hadi-hadi
		4	Menganalisis teks Kitab Suci tentang Mukjizat Yesus Mengidentifikasi Surat-surat Pastoral, mengInterpretasikan pesan Surat Paulus

Halaman 81 dari 103

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		6	Mengidentifikasi 12 Rasul Yesus, menghubungkan Cara hidup jemaat Pertama dengan konteks sekarang
		7	Memahami Magisterium Gereja Katolik (sejarah dan sifat gereja, 10 perintah allah, 5 tugas gereja, sakramen, liturgi, dokumen konsili vatikan II dan ajaran sosial gereja)
359	Penyuluh Agama Ahli Pertama -		Kompetensi khusus:
	Penyuluh Agama Kristen	1	UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
	•		Pancasila dalam pandangan hidup bangsa serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
			Hak dan kewajiban Penyuluh Agama Kristen dan kode etik Penyuluh Agama Kristen
			Sasaran pelayanan Penyuluhan dan Metode Penyuluhan
			Kompetensi umum:
			Arti pemeliharaan Allah
			Keselamatan Allah bersifat universal dan pribadi
	-		Allah membaharui kehidupan dalam Roh Kudus Allah membimbing, mendamaikan dan menopang umat-Nya dalam sehat dan sakit
			Menjadi Jemaat yang misioner
			Pelayan Yang berhati Hamba
			Keaslian kitab-kitab Perjanjian Lama dan baru
			Alkitab penuntun hidup orang beriman dan pelita dalam kegelapan
			Nilai Kristiani berdasarkan Galatia 5:22-23, Mazmur dan Kitab Amsal
			Gereja, Kemajemukan dan multikulturalisme
1			Moderasi beragama dalam pandangan Alkitab: Hidup Rukun dan Damai ICT dan perkembangannya (evolusi dan inovasi ICT)
1			Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, mencegah dan mengantisipasi HOAX
			Pendidikan dalam Keluarga Kristen
1		15	Peran dan Tanggung Jawab Gereja dalam Pendidikan
1			Sikap Orang Kristen terhadap Kesetaraan dan keadilan Gender
1			Penyimpangan Seksual, pencegahan dan antisipasi
1			Praktik demokrasi dalam perspektif iman Kristen Faktor penghambat damai sejahtera
			raktor pengnambat damai sejantera Krisis dalam kehidupan Lansia
			Ciri-ciri orang Kristen pembawa damai sejahtera
360	Penyuluh Bahasa		Kemampuan Umum:
			Kebijakan kebahasaan dan Kesastraan (Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang
			kebahasaan, diantaranya UU Nomor 24 Tahun 2009, PP Nomor 57 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 63
	•		Tahun 2019)
	•	1	Kemampuan Khusus: Substansi Penyuluhan Bahasa
			a) Ejaan
			b) Bentuk dan Pilihan Kata
			c) Kalimat
			d) Paragraf dan Teks
	•	2	Substansi Penyuluhan Sastra a) Kategorisasi Sastra
			b) Apresiasi Sastra
			c) Metode Penyuluhan Sastra
			d) Sastrawan dan Karyanya
		3	Teknik dan Etika Menyuluh
361	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	-	Kemampuan Umum:
1			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pancasila
1			Pancasila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
1			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
1			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
1			Kemampuan Khusus:
1			Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
1			Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dasar-dasar konsultasi hukum
1			Dasar-dasar konsultasi nukum Dasar-dasar komunikasi publik
1			Dasar-dasar komunikasi dialogis
1			Substansi hukum
1	[Struktur hukum
			Budaya hukum
1			Dasar-dasar sosiologi hukum Perkawinan
			Perkawinan Hukum Perjanjian
			Kewarganegaraan
			Metode dan pendekatan penyuluhan hukum
			Tugas dan fungsi Penyuluh Hukum
362	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Wawasan umum terkait perencanaan penyuluhan kehutanan
			Wawasan umum terkait penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan Wawasan umum terkait pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
1			Wawasan umum terkait pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
1			Wawasan Umum terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
•			

Halaman 82 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

Section Persystem February	NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
2 Terloris Perujeburtusani Informaci perujuhum kehuturan 3 Terloris Perujeburtusani Informaci perujuhum kehuturan 4 Terloris Perujeburtusani Salam Perujuhum kehuturan 5 Terloris Perujuhum Kehuturan 1 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturan 2 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturan 3 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturan 4 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturani 5 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturani 6 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturani 7 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturani 8 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturani 9 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturani 1 Wessani Umum Peruntusani Perujuhum Kehuturani 1 Terloris Peruntusani Peruntusan			1	Kemampuan Khusus:
3 Tennis Pendempingan Seberahan penyuluhan kehutanan				
Penyuluh Kehutanan Penuluh S. Tekeis Pemantauan, evaluasi dan pelaparan penyuluhan kehutanan			3	Teknis Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
Remainpair Umum.				
1 Wassaan Umum Pereconanan Penyuhuhan Kehutanan	202	Danielle Kabutanan Damula	5	
2 Wawasan Umum Pengkebatusan informasi penguluhan kehutanan	303	Penyulun Kenulanan Pemula	1	
Second S				
Komannyouan Kubusa: Taknis Perencanaan Penyuluhan Kehutanan				
Teknis Pereputanuan Penyuluhan Kehutaran Teknis Pereputanuasan intermasi penyuluhan kehutaran Teknis Pereputanuasan intermasi penyuluhan kehutaran Teknis Perendangan pemberdayana sasaran penyuluhan kehutaran Teknis Perendangan umum: Kemampuan umum: Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan Kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan Kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Wawasan Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Pertaman Umum Perendangan Penyuluhan kehutaran Perdaman Umum Perendangan Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Penyuluhan Penguluhan Penyuluhan			4	
2 Teknis Pernyaduh Kehutanan 3 Teknis Pernyaduhan kehutanan 4 Teknis Pernyaduhan kehutanan 4 Teknis Pernyaduhan kehutanan 4 Teknis Pernyaduhan kehutanan 4 Teknis Pernyaduhan kehutanan 4 Teknis Pernyaduhan kehutanan 5 Teknis Pernyaduhan kehutanan 1 Wawasan Umum Pernyaduhan kehutanan 2 Wawasan Umum Pernyaduhan kehutanan 3 Wawasan Umum Pernyaduhan kehutanan 3 Wawasan Umum Pernyaduhan kehutanan 4 Wawasan Umum Pernyaduhan kehutanan 5 Teknis Pernyaduhan kehutanan 6 Teknis Pernyaduhan kehutanan 7 T			1	
Penyuluh Kehutanan Terampil				
Semanguan rumm:				
Wawasan Umum Perendenaan Penyuluhan Kehutanan			4	Teknis Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
Penyuluh Keluarga Hidup Ahi	364	Penyuluh Kehutanan Terampil		
Separation				
4 Wawasan Umum Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan kehutanan				
1 Teknis Perencanaan Penyuluhan Kehutanan				
Pernyuluh Keluarga Berencana Ahl Pertama Pernyuluh Keluarga Berencana Ahl Pertama Pernyuluh Keluarga Berencana Ahl Pertama Pernyuluh Keluarga Berencana Ahl Pertama Pernyuluh Keluarga Berencana Ahl Pertama Pernyuluh Keluarga Berencana Ahl Pertama Pernyuluh Keluarga rancana Keluarga Berancana Keluarga Kelua				Kemampuan khusus:
3 Teknis Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan				
4 Teknis Pemaratuan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan				
Penyuluh Keluarga Berencana Ahil Pertama Fenyuluh Keluarga Berencana Ahil Pertama Fenyuluh Keluarga Penyuluh Keluarga Penyuluh Lingkungan Hidup Ahil Pertama Pengelalaian Pengelalaian Pengelalaian Pengelalaian Sampah Pertama Pengelalaian Pertama Mili Pertama Pengelalaian Pengelalaian Sampah Hidup Ahil Pertama Pengelalaian Janya Bina Keluarga Hidup Ahil Pertama Pengelalaian Janya Bina Keluarga Hidup Ahil Pertama Pengelalaian Janya Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Pertama Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Pengelalaia Simpah Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Bina Keluarga Pengelalaia Simpah Pengelalaia Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Pengelalaia Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bin				
Perfama Perfama	365	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli	Ė	
3 Pembangunan Keluarga 4 Konsep Dasar Keluarga 5 Advokasi, Kommukasi Informasi dan Edukasi, dan Komunikasi Interpersonal Kompetensi Khusus: 1 Tumbuh Kembang Anak dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) 2 Generasi Remaja dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) 3 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) 3 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Banisa (BKL) 4 Kemandrian Ekonomi Keluarga 5 Pusut Informasi dan Konseling (PIK) Remaja 6 Pendatan Keluarga 7 Pencatatan dan Pelaporan Keluarga 8 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) 9 Pergutatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah Pertama 1 Peraturan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Pertauran Lan tentang Pengelolaan Sampah Pertauran Lan tentang Pengelolaan Sampah (Permenpan/Perpres, dil) 1 Mawasan umum dan lingkungan Hidup 2 Pengelolaan Sampah Jenis Sampah Hidup 367 Penyuluh Narkoba Ahli Pertama 368 Penyuluh Narkoba Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 368 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 369 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 360 Penyuluh Pe				
A Konsep Dasar Keluarga S. Arkokasi, Komunikasi Indremsi dan Edukasi, dan Komunikasi Interpersonal Kompetensi Khusus: Tumbuh Kembang Anak dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Cenerasi Pemaja dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKR) Relempok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Relempok Kegiatan Bina Keluarga Pemaja (BKR) Relemandirian Ekonomi Keluarga Pensatan Keluarga Pensatan Keluarga Pensatan Keluarga Pensatan Relempa Pembanan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) Pensatanan Hidup Ahli Pertama Pensatanan Hidup Pertaman Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Pensatanan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Pertaman Pentaman Pengelolaan Sampah Pertaman Pentaman Pengelolaan Sampah Pertaman Pertaman Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Pertaman Pengelolaan Sampah (Pemenpan/Perpres, dil) Wawasan Teknia Bid dan Non B3 Pengelolaan Sampah (Pemenpan/Perpres, dil) Pengelolaan Sampah (Pemenpan/Perpres, dil) Remampuan Khusus: Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah Pengelolaan Samp				
S. Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi, dan Komunikasi Interpersonal Kompetensi Khususi: 1				
Kompetensi Khusus:				
2 Generasi Remaja dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga (BKR) 3 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga (Amania (BKL) 4 Kemandirian Ekonomi Keluarga 5 Pusat Informasi dan Konseling (PKR) Remaja 6 Pendatana Keluarga 7 Pencatatan dan Pelaporan Keluarga 8 Pembinaan Insitiusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) 9 Penyuluh Lingkungan Hidup Ahii Pertama			Ů	
Selegopok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)				
4 Kemandirian Ekonomi Keluarga				
5 Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja				
6 Pendataan Keluarga 7 Pencatatan dan Pelaporan Keluarga 8 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) 9 Penyuluh KB Kemampuan umum: 1 Pertama 1 Peraturan-Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah 2 Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah 3 Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah (Permenpan/Perpres, dil) 5 Wawasan umum dan lingkungan hidup Kemampuan Khusus: 1 Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 2 Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah 9 Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah 1 Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah 1 Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah 2 Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah 3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 4 Dasar Pengelahuan Teknis Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup 6 Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika 2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN 6 Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampian dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan untuk membuat laporan an mengevalusai penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk membuat laporan an mengevalusai penyuluhan Narkoba 5 Kemampuan untuk membuat laporan an mengevalusai penyuluhan Narkoba 6 Kemampuan untuk membuat laporan an mengevalusai penyuluhan Narkoba 7 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 8 Pengetahuan Umum Tentang ASN 8 Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 1 Industri Kecil dan Menengah				
8 Pemyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama Femyuluh Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah Pertaman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah Pertaman Aliman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah Pertaman Aliman Pengelolaan Sampah Pertaman Aliman Pengelolaan Sampah Pertaman Aliman Pengelolaan Sampah Pertaman Aliman Pengelolaan Sampah Pertaman Aliman Pengelolaan Sampah Penge			6	Pendataan Keluarga
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Kemampuan umum:				
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama				
Pertama 1 Peraturan-Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah 2 Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah 3 Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah (Permenpan/Perpres, dll) 4 Peraturan Lain tentang Pengelolaan Sampah (Permenpan/Perpres, dll) 5 Wawasan umum dan lingkungan hidup Kemampuan Khusus: 1 Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 2 Pengelolaan Limaha B3 dan Non B3 4 Dasar Pengelolaan Limaha B3 dan Non B3 4 Dasar Pengetahuan Teknis Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika (Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN) Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Remampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Musus:	366	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli	9	
Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah	000	, , ,	1	
4 Peraturan Lain tentang Pengelolaan Sampah (Permenpan/Perpres, dll) 5 Wawasan umum dan lingkungan hidup Kemampuan Khusus: 1 Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 2 Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah 3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 4 Dasar Pengetahuan Teknis Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup 6 Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika 2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 5 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 5 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 5 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 6 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 6 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 6 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan delatukan mendelatukan mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 7 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 8 Kemampuan untuk mendelatukan penerapan delatukan mendelatukan mendelatukan penerapan delatukan mendelatukan mende			2	Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah
5 Wawasan umum dan lingkungan hidup				
Kemampuan Khusus: 1				
1 Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup 2 Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah 3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 4 Dasar Pengetahuan Teknis Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup 6 Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika 2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN 6 Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan 5 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan 6 Kemampuan Umum 7 Kemampuan Umum 8 Kemampuan Umum 9 Perdagangan Ahli Pertama 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN 6 Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah			3	
2 Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah 3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 4 Dasar Pengetahuan Teknis Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika 2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba 5 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba Kemampuan Umum 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 5 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah			1	
4 Dasar Pengetahuan Teknis Lingkungan Hidup 5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika 2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan Narkoba 5 Kemampuan untuk menbuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba Kemampuan Umum 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perrijiana Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah			2	Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah
Semantan Semantan				
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama				
1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika 2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan 5 Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba Kemampuan Umum Perdagangan Ahli Pertama 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah	367	Penvuluh Narkoba Ahli Pertama	3	
Kompetensi Khusus: 1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan 5 Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba Kemampuan Umum Perdagangan Ahli Pertama 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah	50,	- ya.a	1	
1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif 2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan 5 Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba Kemampuan Umum Perdagangan Ahli Pertama 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah			2	
2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkoba 3 Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan 5 Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba Kemampuan Umum 1 Pendagangan Ahli Pertama 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah			1	· ·
3 Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba 4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan 5 Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba Kemampuan Umum Perdagangan Ahli Pertama 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah				
5 Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkoba Kemampuan Umum Perdagangan Ahli Pertama Perdagangan Ahli Pertama Perdagangan Ahli Pertama 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah			3	Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkoba
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama				
Perdagangan Ahli Pertama 1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri 2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah	368	Penyuluh Perindustrian dan	5	
2 Pohon Industri 3 Klasifikasi Industri 4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah	500	-	1	
4 Perijinan Usaha 5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah				
5 Pengetahuan Umum Tentang ASN Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah				
Kemampuan Khusus: 1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah				
1 Standar Industri 2 Kewirausahaan 3 Industri Kecil dan Menengah			5	
Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah			1	
3 Industri Kecil dan Menengah				
4 Manajemen Operasional (Produksi)			3	Industri Kecil dan Menengah
			4	Manajemen Operasional (Produksi)

Halaman 83 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Manajemen Pemasaran
			Pengelolaan program penyuluhan usaha indag Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Usaha Indag
			Pendampingan dan/atau konsultasi usaha indag
		_	Monitoring dan evaluasi
369	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama		Kompetensi Umum:
			Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Regulasi di bidang Penyuluhan Pertanian
		2	Ilmu-ilmu Pertanian, Metodologi Evaluasi, Budidaya Pertanian, Panen dan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran
		3	Akses Informasi dan Teknologi, Akses Kelembagaan Keuangan, Alat mesin pertanian, sarana produksi
		1	Kompetensi Khusus:
			Potensi wilayah, Penyusunan Programa, Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh Materi, Metode, Media Penyuluhan Pertanian dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian
			Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Penyuluhan
370	Penyuluh Pertanian Terampil		Kompetensi Umum:
			Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Regulasi di bidang Penyuluhan Pertanian
		2	Ilmu-ilmu Pertanian, Metodologi Evaluasi, Budidaya Pertanian, Panen dan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran
		3	Akses Informasi dan Teknologi, Akses Kelembagaan Keuangan, Alat mesin pertanian, sarana produksi
			Kompetensi Khusus:
			Potensi wilayah, Penyusunan Programa, Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh
			Materi, Metode, Media Penyuluhan Pertanian dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian
271	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	3	Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Penyuluhan Kompetensi Umum:
3/1	r enyulun 30siai Ailli Perlama		Rompetensi Umum: Pemahaman konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi
		1	pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial
		2	Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi
			Kompetensi Khusus:
		1	Penerapan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam
		Ė	penyusunan perencanaan penyuluhan sosial
		2	Pemahaman konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam
		3	melakukan pemetaan potensi kerawanan sosial Pemahaman dan pengumpulan bahan bahan terkait penyelenggaraan penyuluhan sosial
			Penerapan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme dalam melakukan pengembangan
		4	kualitas penyuluhan sosial
		5	Pemahaman konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme dalam melakukan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan
372	Penyusun Buku Braille dan Buku		Kompetensi Umum:
	Bicara		Kebijakan dan penyedia layanan aksesibilitas kesejahteraan sosial
		2	Implementasi kebijakan dan penyedia layanan aksesibilitas kesejahteraan sosial Kompetensi Khusus:
		1	Penyusunan dan perencanaan kerja penyusunan buku braille dan buku bicara
			Analisis Kelayakan pengembangan kebijakan dan standarisasi penyusunan buku braille dan buku bicara
			Penyiapan bahan dan pengolahan naskah buku braille dan buku bicara Penyusunan laporan hasil kerja pelaksanaan penyusunan buku braille dan buku bicara
373	Penyusun Materi Hukum dan	Ť	Kemampuan Umum:
_	Perundang-undangan	1	Pengantar Ilmu Hukum
		2	Konsensus Kebangsaan
			Pengantar Filsafat Hukum
		4	Teori Hukum Komampuan Khucus:
		1	Kemampuan Khusus: Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
			Tahapan pembahasan dan pengundangan pembentukan peraturan perundang-undangan
			Data, informasi, dan materi terkait Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan
374	Perancang Peraturan Perundang-		Kemampuan Umum:
	undangan Ahli Pertama	_	Pengantar Ilmu Hukum
			Konsensus Kebangsaan
			Pengantar Filsafat Hukum Teori Hukum
		╧	Kemampuan Khusus
		1	Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional, di luar Program Legislasi Nasional, Program Legislasi Daerah, di luar Program Legislasi Daerah, di luar Program Legislasi Daerah, daftar kumulatif terbuka, usul penyusunan Peraturan
			Perundang-undangan, atau di luar usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan
			Data dan bahan terkaiot analisis urgensi Instrumen Hukum lainnya Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan
		4	Data dan bahas terkait proses merumuskan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
			Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
		5	Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
	•		•

Halaman 84 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		6	Data dan bahan terkait penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung
		7	Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
375	Perawat Ahli Pertama	4	Kemampuan Umum:
			Praktik Keperawatan Berdasarkan Etik (Standar Profesi perawat) Praktik Keperawatan Berdasarkan Legal (Standar Profesi Perawat)
			Praktik Keperawatan Berdasarkan Peka Budaya (Standar Profesi Perawat)
			Area Praktik Keperawatan Profesional (Standar Profesi Perawat)
			Area Kepemimpinan dan Manajemen (Standar Profesi Perawat) Area Pendidikan dan Penelitian (Standar Profesi Perawat)
			Area Pengembangan Kualitas Personal dan Profesional (Standar Profesi Perawat)
			Kemampuan Khusus:
			Asuhan Keperawatan Medikal Bedah (Kamus Kompetensi)
			Asuhan Keperawatan Maternitas (Kamus Kompetensi) Asuhan Keperawatan Anak (Kamus Kompetensi)
			Asuhan Keperawatan Jiwa (Kamus Kompetensi)
			Asuhan Keperawatan Komunitas (Kamus Kompetensi)
376	Perawat Terampil	4	Kemampuan Umum:
			Praktik keperawatan berdasarkan Etik, Legal dan Peka Budaya Area Praktik Keperawatan Profesional
		_	Kemampuan Khusus:
			Pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat
		2	Asuhan keperawatan medikal bedah
			Asuhan keperawatan maternitas Asuhan Keperawatan Anak
			Asuhan Keperawatan Jiwa
		6	Asuhan Keperawatan Komunitas
3//	Perekam Medis Ahli Pertama	1	Kemampuan Umum: Manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan
		•	Kemampuan Khusus:
			Pelayanan Pendaftaran Pasien
			Pengelolaan Rekam Medis Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan
			Statistik dan Pelaporan Data Pasien
		5	Penjaminan Mutu Pelayanan Rekam Medis
070	Danalasas Madia Tananasi	6	Pelepasan Informasi Kesehatan
378	Perekam Medis Terampil	1	Kemampuan Umum: Tenaga kesehatan
			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
			Jabatan Fungsional Perekam medis
			Dasar Hukum Kebijakan Pelayanan RME di Fasyankes Klasifikasi dan perijinan rumah sakit
			Puskesmas
		7	KMK no.312 Tahun 2020,Hasil Kongres IX PORMIKI Tahun 2018
			Aspek Hukum Rekam Medis Permenkes 1171 tahun 2011 dan Permenkes 31 tahun 2019
			Budaya kerja dan nilai-nilai anti korupsi
		11	Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain
		12	Tanggap terhadap kejadian bencana
		1	Kemampuan Khusus: Identifikasi data sosial pasien
			Registrasi Pendaftaran
			Indeks utama pasien
			Penomoran rekam medis
			Penyiapan rekam medis Pemesanan rekam medis pasien lama
			Pengumpulan data pelayanan pendaftaran pasien
			Pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien
			Penyajian data pelayanan pendaftaran pasien Instrumen pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien
			Instrumen pengolahan data pelayanan pendartaran pasien Instrumen penyajian data pelayanan pendartaran pasien
		12	Analisis hasil pengolahan data pelayanan pendaftan pasien
		13	Penyajian hasil pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien
		14	Analisis data pelayanan pendaftaran pasien dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan terhadap pelayanan pendaftaran
1 1			ронивар рокумная ронивания

Halaman 85 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		15	Evaluasi hasil laporan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan cara kerja pelayanan pendaftaran pasien yang lebih efektif
		16 17	Pedoman, standar, dan prosedur pelaksanaan pelayanan pendaftaran pasien Sosialisasi implementasi pedoman standar prosedur pelayanan pendaftaran pasien yang dilakukan perbaikan
		18	Konsep dan metode tata kelola pelayanan pendaftaran pasien
			Persiapan perlengkapan penyediaan rekam medis untuk berobat
			Bukti petunjuk keluar (outguide) sesuai dengan ketentuan Pengambilan kembali (retrieval) rekam medis
			Lokasi penjajaran
			Pengambilan rekam medis
			Penyisipan outguide Perapihan rekam medis
			Penyortiran rekam medis
			Analisis kegiatan pengelolaan rekam medis
			Penyajian kegiatan pengelolaan rekam medis Perumusan kegiatan pengelolaan rekam medis
			Pendistribusian rekam medis berdasarkan permintaan rekam medis
		31	Pencatatan pada buku ekspedisi
			Pendistribusian rekam medis sesuai permintaan
			Pelaksanaan bimbingan penyimpanan Rekam medis untuk berbagai kepentingan Pelestarian rekam medis di ruang penyimpanan
			Konsep dan metode tata kelola pengelolaan rekam medis di ruang penyimpanan
		36	Pengolahan data hasil kodifikasi klinis
			Audit hasil laporan kodifikasi klinis Pengolahan data hasil kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan
			Konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi pengolahan kodifikasi klinis
		39	sistem pembiayaan kesehatan
			Pengolahan data pelayanan dan program kesehatan
			Evaluasi data pelayanan kesehatan dan pelaporan pelayanan kesehatan Penyediaan data pelayanan dan program kesehatan untuk keperluan pihak lain
		43	Konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah
		43	pengelolaan statistik dan pelaporan data pasien
		44	Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur penjaminan mutu pelayanan rekam medis berdasarkan pedoman
		45	Penyelenggaraan penjaminan mutu pelayanan rekam medis
		46	Pelayanan peminjaman rekam medis untuk pihak internal dan eksternal
379	Perekayasa Ahli Pertama	1	Kemampuan Umum: Pengelolaan Kerekayasaan
		2	Pendayagunaan Teknologi
			Kemampuan Khusus:
380	Perencana Ahli Pertama		Kerekayasaan Teknologi
360	refericana Anii Fertama		Kemampuan Umum: Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar
			Kemampuan Khusus:
			Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tingkat Dasar
			Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Tingkat Dasar Perencanaan Pembangunan Bidang Spasial Tingkat Dasar
381	Perevitalisasi Bahasa dan Sastra		Kemampuan Umum:
		1	Pemahaman terhadap pelindungan bahasa dan sastra sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2014
		1	Kemampuan Khusus: Pemahaman tentang pemetaan bahasa
			Pemahaman tentang pemetaan sastra (lisan, tulis tangan, dan cetak)
			Pemahaman tentang kajian vitalitas bahasa
			Pemahaman tentang kajian vitalitas sastra Pemahaman tentang Revitalisasi Bahasa Daerah
			Pemahaman tentang Revitalisasi Sastra Lisan
		7	Pemahaman tentang Konservasi Bahasa Daerah
			Pemahaman tentang Konservasi Sastra Lisan
382	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Э	Pemahaman tentang Konservasi Manuskrip Kompetensi Umum:
			Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
		2	Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
		1	Kompetensi Khusus: Kelembagaan DPR
			Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
			Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
383	Petugas Barang Bukti	1	Kemampuan Umum: Peraturan Perundang-Undangan Nasional
			Fungsi Pengelolaan Barang Bukti
		3	Uraian Tugas
			Sistem Informasi
			Manajemen Administrasi Data
			Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data

Halaman 86 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		4	Kompetensi Khusus:
			Aturan Penggunaan Aturan Pengelolaan
			Identifikasi Data
		4	Integrasi Data
		5	Analisa Data
		6	Hukum Acara Pidana
		7	Hukum Acara Perdata
			Hukum, Pendidikan dan Kewarganegaraan
384	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan	9	Penyusunan Laporan dan Layanan Kemampuan Umum:
304	Transportasi	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas da Angkutan Jalan
		2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun
		_	2024 tentang Jalan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
			Kemampuan Khusus:
			Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
1			Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan Operasional terminal angkutan jalan
1			Operasional terminal angkutan jalan Operasional angkutan jalan
			Perencanaan dan organisir kegiatan operasional transportasi
			Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
			Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
			Transportasi darat ramah lingkungan
			Infrastruktur transportasi darat
			Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat Taknalagi manajaman agana dan prasarana transportasi darat
			Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
385	Petugas Lapangan Keluarga		Kompetensi Umum:
	Berencana Terampil	1	Pengendalian Penduduk
		2	Alat dan Metode Kontrasepsi
			Pembangunan Keluarga
			Konsep Dasar Keluarga
		5	Advokasi dan Komunikasi Interpersonal Kompetensi Khusus:
		1	Tumbuh Kembang Anak
			Pendampingan Masa Perkembangan Remaja dan Penguatan Karakter
			Lansia, Keluarga yang Memiliki Lansia dan Keluarga Rentan
		4	Kemandirian Ekonomi Keluarga
			Pusat Informasi dan Konseling Remaja
			Pendataan Keluarga
		7	Pencatatan dan Pelaporan Keluarga
			Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) Tugas fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana
			Percepatan Penurunan Stunting
386	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	.0	Kompetensi Umum:
1	5 ,	1	Pengetahuan Umum
			Kompetensi Khusus:
1			Tata cara operasi
1			Tata cara pemeliharaan
387	Petugas Pengaman Hutan dan Hasil	3	Alat ukur dan instrumentasi Kemampuan Umum:
507	Hutan	1	UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
1			UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan
1		3	UU No 18 tahun 2013 Pencegahan dan pemberatasan Perusakan Hutan
1		4	PP No 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
1			PP No 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
1			PP No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
			PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan PP No.28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
		Ť	Kemampuan Khusus:
1			Penjagaan
1			Patroli
			Pengawalan
			Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
			Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran hutan
1			Kesamaptaan Materi Keterampilan Teknia
I	l	7	Materi Keterampilan Teknis

Halaman 87 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		8	Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Tenaga Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan (TP3H)
388	Petugas Sarana dan Prasarana		Kemampuan Umum:
	Transportasi	1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas da Angkutan Jalan
		2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
		_	Kemampuan Khusus:
	+		Dasar-dasar pengaturan lalu lintas Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
			Operasional terminal angkutan jalan
			Operasional angkutan jalan
			Perencanaan dan organisir kegiatan operasional transportasi
			Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
	+		Transportasi darat ramah lingkungan
			Infrastruktur transportasi darat
			Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
			Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
200	Datumas Cumusi Caslasi	12	Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat Kompetensi Umum:
309	Petugas Survei Geologi	1	Geologi Dasar
			Alat dan teknik survei lapangan
			Kompetensi Khusus:
			Pemetaan geologi
			Batuan dan mineral
			Geologi struktur Potensi sumberdaya alam
			Pengelolaan data geologi
			Teori dasar geofisika dan geokimia
			Pengoperasian peralatan geofisika
			Manajemen proyek
	+		UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja; Keselamatan dan kesehatan kerja Interpretasi dan quality control data geofisika
			Pembuatan peta geologi berbasis SIG
390	Petugas Transportasi Darat		Kemampuan Umum:
		1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas da Angkutan Jalan
		2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
1			Kemampuan Khusus:
1		1	Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
1			Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
1			Operasional terminal angkutan jalan
1			Operasional angkutan jalan Perencanaan dan organisir kegiatan operasional transportasi
			Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
			Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
			Transportasi darat ramah lingkungan
			Infrastruktur transportasi darat Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
			Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
L	<u> </u>		Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
391	Petugas Transportasi Perkeretaapian		Kemampuan Umum
			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
		2	Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
			Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan
I	ı l		Perkeretaapian

Halaman 88 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
		1	Kemampuan Khusus
			Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
			Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian Pengaturan perjalanan kereta api
			Awak sarana perkeretaapian
			Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		6	Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
		7	Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
392	Petugas Ukur Kawasan Hutan	1	Kemampuan Umum: Pemahaman tentang kawasan hutan
			Pemanaman tentang kawasan nutan Regulasi tentang pengukuhan
			Teknologi Informasi
		4	Pemahaman tentang SIG
	<u> </u>		Kemampuan Khusus:
	-		Matematika Dasar dan Trigonometri Pengertian Ilmu ukur tanah
			Pemahaman tentang kawasan hutan
			Pengenalan alat ukur secara umum
		5	Alat ukur untuk kawasan hutan secara spesifik
			Cara kerja alat ukur
			Proses pengukuran kawasan hutan Proses pengolahan data hasil lapangan
			Pengenalan kompetensi umum surveyor
393	Polisi Kehutanan Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Pengendalian Kebakaran Hutan
	-		Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
		_	Tindak Pidana Kehutanan Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
			Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan
			Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
	<u> </u>		Kemampuan Khusus
			Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
			Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan
394	Polisi Kehutanan Pemula		Kemampuan Umum:
			Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
	-		Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Pengetahuan Umum dan Teknis
		4	Kemampuan Khusus:
		1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
		2	Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
00-	Deliai Kahatan T "	4	Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
395	Polisi Kehutanan Terampil	1	Kemampuan Umum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
			Wawasan Kehutanan
		3	Pengetahuan Umum
			Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
		5	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		6	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
			Kemampuan Khusus:
			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
			Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
			Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus Tugas Pakak, Fungsi dan paran Palisi Kebutanan
	 		Tugas Pokok, Fungsi dan peran Polisi Kehutanan Pelaksanaan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
			Kesamaptaan
			Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan
			Pelaksanaan Penjagaan
	 		Pelaksanaan Patroli Materi Keterampilan Teknis
396	Polisi Khusus Cagar Budaya		Prosedur pengamanan
		2	Pelaporan tugas
			Identifikasi potensi pengamanan cagar budaya
			Penanganan pengamanan Pemahaman dasar hukum
1	L	S	ı Gınanaman Vasal HUNUIII

Halaman 89 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Pemahaman dasar hukum pelanggaran cagar budaya
			Pengadaan peralatan
			Penegakan peraturan atau larangan yang berlaku pada CB Pengamanan darurat
			Laporan pelanggaran cagar budaya
397	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama		Kemampuan Umum
		1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
			Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal Kemampuan Khusus
			Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman
		1	dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana
		_	dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
		3	Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
			Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
		4	Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
		5	Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
200	Polisi Pamong Praja Pemula		dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
390	Polisi Pamong Praja Pemula	1	Kemampuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
			Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
			Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
			Kemampuan Khusus
		1	Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		_	Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana
		2	dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
		3	Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
			Daerah
		4	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
		5	Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
		5	dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
399	Polisi Pamong Praja Terampil	-	Kemampuan Umum
			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
			Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
			Kemampuan Khusus
		1	Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman
			dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana
		2	dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
		3	Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
			Daerah
		4	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
		_	Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
		5	dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
400	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	_	Kemampuan Umum:
	Pertama		Ruang lingkup humas Etika kehumasan
			Kemampuan Khusus:
		1	Manajemen isu
			Manajemen komunikasi
			Karakteristik media Media baru
			Komunikasi massa
			Publisitas
			Penulisan kehumasan
			Kegiatan-kegiatan humas
			Komunikasi organisasi Komunikasi interpersonal
			Teori komunikasi
		12	Model komunikasi
			Metode penelitian komunikasi
401	Pranata Hubungan Masyarakat	14	Audit komunikasi Komampuan I Imum:
401	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	1	Kemampuan Umum: Ruang lingkup humas
	·		Etika kehumasan
			Kemampuan Khusus:
			Manajemen isu
			Manajemen komunikasi Karakteristik media
1		J	narantonoun IIIEUla

Halaman 90 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

402 Pranata Kewangan APBN Terampia 403 Pranata Kewangan APBN Terampia 404 Pranata Kewangan APBN Terampia 405 Pranata Kewangan APBN Terampia 406 Pranata Kewangan APBN Terampia 407 Pranata Kewangan APBN Terampia 408 Pranata Kewangan APBN Terampia 409 Pranata Kewangan APBN Terampia 409 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 401 Kewangan Industria 402 Pranata Kewangan APBN Terampia 403 Pranata Kewangan APBN Terampia 404 Pranata Kewangan APBN Terampia 405 Pranata Kewangan APBN Terampia 406 Pranata Kewangan APBN Terampia 407 Pranata Kewangan APBN Terampia 408 Pranata Kewangan APBN Terampia 409 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan APBN Terampia 400 Pranata Kewangan Te	NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
6 Publishas 7 Penulisan Kehumasan 8 Kegatan Kapatan humas 9 Komunikasi organishasi 10 Komunikasi organishasi 11 Tuser Komunikasi 11 Tuser Komunikasi 12 Merde poselilan Komunikasi 13 Merde poselilan Komunikasi 14 Fotograf 15 Komunikasi organishasi 16 Komunikasi organishasi 17 Komunikasi organishasi 18 Komunikasi organishasi organ				
7 Penulian Kehumasan 8 Kogunikas (10 Komunikas) 9 Komunikas (10 Komunikas) 11 Teeri komunikasi 12 Medel Komunikasi 12 Medel Komunikasi 13 Medel Komunikasi 13 Medel Komunikasi 13 Medel Komunikasi 14 Komunikasi 15 Komunikasi 16 Komunikasi 17 Komunikasi 18 Komunikasi 18 Komunikasi 19 Komunikasi 19 Komunikasi 19 Komunikasi 19 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 11 Komunikasi 12 Komunikasi Visusi 12 Komunikasi Visusi 13 Komunikasi Visusi 14 Komunikasi Visusi 15 Komunikasi Visusi 16 Komunikasi Visusi 17 Komunikasi Visusi 18 Komunikasi Visusi 18 Komunikasi Visusi 18 Komunikasi Visusi 18 Komunikasi Visusi 18 Komunikasi Visusi 18 Komunikasi Visusi 18 Komunikasi Visusi 18 Penterbangan Negara 19 Penterbangan Negara 19 Penterbangan Negara 10 Penterbangan Penterbangan dalam Penterbangan Kebangan Negara 19 Penterbangan Penterbangan Represidentian Negara 19 Penterbangan Kernika Pengalasi Barranjulasi Penterbangan 19 Penterbangan Penterbangan Barranjulasi Penterbangan Penterbangan Negara 19 Penterbangan Penterbangan Barranjulasi Penterbangan Penter				
8 Koglatini kegiatan kepiatan tumas 9 Kormunikasi Interpresporah 11 Terori komunikasi Interpresporah 12 Medeli komunikasi 12 Medeli komunikasi 13 Medeli komunikasi 13 Medeli komunikasi 14 Medeli komunikasi 15 Medeli komunikasi 16 Kormunikasi 18 Komunikasi Interpresporah 19 Komunikasi 19 Komunikasi 19 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 10 Komunikasi 11 Keuangan Nagara 12 Perebrokaharan Negara 13 Pemerikasan Pengelokan dan Perlangan Keuangan Negara 14 Pemerikasan Pengelokan dan Rengha Pelakaanana APBN 19 Komunikasi 15 Komunikasi Keuangan Nagara 16 Pengelokan Kontrak Pengelokan dan Rengha Pelakaanan APBN 19 Komunikasi Pengelokan Keuangan Negara 17 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 18 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 19 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 19 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 19 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 19 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 19 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 19 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 19 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 19 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 10 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 10 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara 10 Pengelokan Keuangan Pelakentahan Negara Pendelahan Negara Pengelokan Negara Pengelokan Pengelokan Negara Pengelokan Negara Pengelokan Pengelokan Negara Pengelokan Pengelok				
9 Komunikasi Integrasporala 11 Toori komunikasi 12 Medale komunikasi 13 Medale pendidian komunikasi 13 Medale pendidian komunikasi 13 Medale pendidian komunikasi 14 Fotgara 16 Formunikasi 16 Medale pendidian komunikasi 17 Fotgara 18 Formunikasi 18 Keuangan APBN Torampii 18 Keuangan APBN Torampii 19 Keungan Negara 2 Perbendaharasan Negara 3 Perbendaharasan Negara 3 Perendaharasan Negara 3 Perendaharasan Negara 4 Resistangan Pendakaranan Anggaran 4 Perandaharasan Pendakaranan Anggaran 4 Perandaharanan Pendakaranan Anggaran 4 Perandaharanan Pendakaranan Anggaran 5 Perendaharanan Pendakaranan Anggaran 6 Pergendaharanan Pendakaranan Anggaran 7 Perandaharanan Pendakaranan Anggaran 8 Perandaharanan Pendakaranan Anggaran 9 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Anggaran 1 Perandaharan Pendakaranan Pend				
10 Komunikasi Interpersonal 11 Toori komunikasi 12 Model komunikasi 13 Model komunikasi 13 Model komunikasi 13 Model komunikasi 14 Folografi 16 Komunikasi Musia 16 Folografi 17 Komunikasi Musia 18 Komangan APBN Terampi 18 Kemangan Tumuni 19 Personal Kemangan APBN Terampi 19 Personal Kemangan Tumuni 20 Personal Kemangan Tumuni 21 Personal Kemangan Tumuni 22 Personal Kemangan Tumuni 23 Personal Kemangan Tumuni 24 Personal Kemangan Tumuni 24 Personal Kemangan Tumuni 25 Personal Kemangan Tumuni 26 Personal Kemangan Tumuni 26 Personal Kemangan Tumuni 27 Personal Kemangan Tumuni 28 Personal Tumuni 29 Personal Tumuni 20				
12 Model kormunkasi 13 Model penditah hornunkasi 14 Fotografi 15 Morrunkasi visual 16 Fotografi 16 Kormunkasi visual 17 Kormunkasi visual 18 Kemampuan Umrum: 18 Kormanguan Umrum: 19 Perbendaharaan Nagara 2 Perbendaharaan Nagara 3 Permendaharaan Nagara 3 Permendaharaan Nagara 3 Permendaharaan Nagara 4 Perbendaharaan Nagaran 4 Perbendaharaan Permeniana dalam Bangka Pelakkanaan APBN 4 Perbendaharaan Permeniana dalam Bangka Pelakkanaan APBN 4 Perbendaharaan Permeniana dalam Bangka Pelakkanaan APBN 4 Perbendaharaan Permeniana dalam Bangka Pelakkanaan APBN 5 Perpelangaraan Aksuriansi dan Pelagoraan Kesuangan Kementerian-Lembaga Perpelangaraan Aksuriansi dan Pelagoraan Kesuangan Kementerian-Lembaga Perpelangaraan Aksuriansi dan Pelagoraan Kesuangan Kementerian-Lembaga Perpelangaraan Aksuriansi dan Pelagoraan Kesuangan Kementerian-Lembaga Perpelangaraan Aksuriansi dan Pelagoraan Kesuangan Kementerian-Lembaga Perpelangaraan Perbendaharan Perbend				
13 Metode penellitan korunikasi 14 Fotografi 15 Korrunikasi visual 14 Fotografi 15 Korrunikasi visuala				
14 Fotografi 15 Komunickal visual 15 Komunickal visual 15 Komunickal visual 16 Komunickal visual 16 Komunickal visual 16 Komunickal visual 17 Komunickal visual 18 Komunickal visual visual 18 Komunickal visual vis				
402 Pranata Keuangan APBN Terampil Accentropanan Umum: 1 Keuangan Nagara 2 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 3 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 4 Pemeriksaan Pembayaran dalam Bangka Pelaksanaan APBN 2 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3 Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 4 Pentanasahaan Pemerinanan dan Pengelolaan Keuangan Keuangan Negara 5 Penyelenggaraan Akurtarsi dan Pelaksanaan Anggaran 4 Pentanasahaan Pemerinanan dan Pengelolaan Kemarkangan Pemerinahan 5 Penyelenggaraan Akurtarsi dan Pelaksanaan Anggaran 4 Pentangkan Kemarkangan Pemerinahan Pengelonan Keuangan Kementerian-Lembaga 6 Pengelonaan Koritar Pengelonaan Keriangahaan Pemerinahan Deerah 7 Pendaran Pemerinahan Pin Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengelongaraan Tempat Penimbunan Pendelonan Pemerinah (PP) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pengelongaraan Tempat Penimbunan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pendelonan Pemerinahan Pendelonan Pend				
Romanpuan Humin: Romanpuan Humin: Romanpuan Humin: Romanpuan Humin: Romanpuan Rogara Perbendaharaan Negara Perbendaharaan Negara Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Khusas: Romanpuan Rogaran Romanpuan Khusas: R				
Seuangan Negara	402	Pranata Keuangan APBN Terampil	10	
Pernata Kewilayahan			1	
Kemanpuan Khusus: 1 Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3 Perancanaan Pelaksanaan Anggaran 4 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 5 Penyelenggarana Akuranis dan Pelagonan Keuangan Kementerian/Lembaga 6 Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahua 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 Perantaran Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahua 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Penimbunan 2 Perantaran Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahua 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Penimbunan 3 Perantaran Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahua 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Penimbunan 4 Perantaran Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahua 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Penimbunan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahua 2014, Teori Pemerintahan 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahua 2011 Tentang Informasi Geospasial 7 Peranturan Pemerintah Nomor 21 Tahua 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Puang 8 Pemendagri Nomor 11 Tahua 2011 Tentang Pengasan Batas Dearah 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahua 2030 tentang Wilayah Negara 10 PP No 2 Tahua 2031 Tentang Pengasan Batas Dearah 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahua 2030 tentang Wilayah Negara 10 P P No 2 Tahua 2032 Tentang Pengasan Batas Dearah 10 P No 2 Tahua 2032 Tentang Pengasan Batas Dearah 10 P No 2 Tahua 2031 Tentang Pengasan Batas Dearah 10 P No 2 Tahua 2031 Tentang Pengasan Batas Dearah 10 P No 2 Tahua 2031 Tentang Pengasan Batas Dearah 10 P No 2 Tahua 2031 Tentang Pengasan Batas Dearah 11 P No 2 Tahua 2031 Tentang Pengasan Batas Dearah 12 P No 2 Tahua 2031 Tentang Pengasan Batas Dearah 13 P No 2 Tahua 2031 Tentang Pengasan Penatangan Penat			2	Perbendaharaan Negara
Perquiesasian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan ARPBN			3	
Paralta Kewilayahan				
3 Perencanaan Pelaksanaan Anggara				
4 Penatausahaan Penerimaan dan Pengelusaran Negara				
S				00
6 Pengelolan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Umura				
1	L			
Peratura Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Sudaya Parcasila Sudaya Parcasila Sudaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengegaran Batas Davarah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pengegaran Batas Davarah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2005 tentang Wilayah Negara Penaturan Persisten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengegaran Batas Davarah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2005 tentang Wilayah Negara Penaturan Persisten Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemerangan Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pemerangan Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pemerangan Pemerangan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 Tentang	403	Pranata Kewilayahan		
Berikat 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 4 Pancasila 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Teori Pemerintahan 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 8 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Betas Daerah 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengeasan Batas Daerah 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Rengasan Batas Daerah 10 PP No. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kompetensi Khisusis 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi 1 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2023 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2023 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2023 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2023 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2023 Tentang Mengangan Pulau-Pulai Kecil Terluar 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 4 Peraturan Pemerintah Namor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 4 Peraturan Menderin Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi 4 Pengelolaan Data 4 Manajemen Ialayanan TI 5 Infrastruktur TI 5 Infrastruktur TI 6 Sistem Informasi dan Multimedia 4 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan Data 4 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan Data 4 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan Data 4 Manajemen Layanan TI 4 Penamatan Ani Pertama 4 Peraturan Merologi Legal 4 Menajemen Layanan TI 4 Pengembian, penaganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratori			1	
Peraturan Pera			2	, ,
Budaya 4 Panacasila 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Teori Pemerintahan 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasiail 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Peryelenggaranan Penatanan Ruang 8 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pengegasan Batas Daerah 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengegasan Batas Daerah 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengegasan Batas Daerah 10 PP No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengegasan Batas Daerah 10 PP No. 2 Tahun 2022 Tentang Pengegasan Nama Rupabumi Kompetensi Khusus: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2020-2024 dan RPUPN 2025-2045 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang DKTP 3 Konsep, Metodologi dan Survei Pemetaan 4 Peraturan Persiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulai Kecil Tertuar 5 Dasar Pemetaan 4 Peraturan Persiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulai Kecil Tertuar 5 Dasar Pemetaan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 7 PP No. 28 Tahun 20018 Tentang Kerja Sama Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau 1 TEnterprise 2 Manajemen Layanan TI 3 Pengelolaan Data 4 Manajemen Risiko TI 5 Infrastruktur Ti 6 Sistem Informasi dan Multimedia 4 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan Data 4 Manajemen Layanan TI 4 Sistem Informasi dan Multimedia 2 Penanata Laboratorium Kesehatan Ahii Pertama 4 Peraturan Pemerikaan Heriologi Legal 4 Peneriksaan minamologi dasar 4 Pemeriksaan minunologi dasar 4 Pemeriksaan minunologi dasar 4 Pemeriksaan mi				
4 Pancasila 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Teori Pemerintahan 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 8 Permendigari Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 10 PP No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengegasan Batas Daerah 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 10 PP No. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kompetensi Khusus: 1 Peraturan Persiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang DKTP 3 Konsep, Metodologi dan Survel Pemetaan 4 Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulai Kecil Terluar 5 Dasar Pemetan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 7 PP No. 28 Tahun 20018 Tentang Kerja Sama Daerah 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah Andar Pulau 404 Pranata Komputer Ahli Pertama 1 If Enterprise 2 Manajemen Layanan TI 3 Pengelolaan Data 4 Manajemen Layanan TI 5 Infrastruktur TI 6 Sistem Informasi dan Multimedia 1 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan Data 4 Manajemen Mandar Uklau 407 Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pengaman 409 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pengaman 409 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pengaman Angaman Pengelolaan Iaboratorium Mesehatan Ahli Pengaman Angaman Pengaman Angaman Pengelolaan Iaboratorium Mesehatan Ahli Pengaman Angaman Angaman Angaman Pengelolaan Iaboratorium Mesehatan Ahli Pengaman Angaman Angaman Angaman Angaman Angaman A			3	()
5			4	
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang			5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Teori Pemerintahan
B Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah				
9				
10 P No. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kompetensi Khusus: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045 Peraturan Persiden Nomor 18 Tahun 2022 Tentang DKTP				
Kompetensi Khusus: 1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang DKTP 3 Konsep, Metodologi dan Suvrei Pemetaan 4 Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulai Kecil Terluar 5 Dasar Pemetaan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 7 PP No. 28 Tahun 20018 Tentang Kerja Sama Daerah 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau 1 TE Tenterprise 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau 1 TE Tenterprise 1 Manajemen Layanan TI 3 Pengelolaan Data 4 Manajemen Risiko TI 5 Infrastruktur TI 6 Sistem Informasi dan Multimedia 406 Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama 407 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Kompetensi Generik: 1 Pengambilan, penanganan an pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium 4 Sistem Indormasi Generik: 1 Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium 4 Sistem Perkayanan Haboratorium 4 Sistem Indormasi Generik: 1 Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 5 Sistem penanganan dan pengelolaan laboratorium 6 Sistem pekayanan laboratorium 8 Sistem penanganan darah lengkap dan hemostasis 9 Urinalisis, pemeriksaan itensokpik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 6 Dagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat)				
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045			10	
Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang DKTP				
3 Konsep, Metodologi dan Survei Pemetaan 4 Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulai Kecil Terluar 5 5 5 5 5 5 5 5 5			1	
4 Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulai Kecil Terluar 5 Dasar Pemetaan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 7 PP No. 28 Tahun 20018 Tentang Kerja Sama Daerah 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau 1 IT Enterprise 2 Manajemen Layanan TI 3 Pengelolaan Data 4 Manajemen Risiko TI 5 Infrastruktur TI 5 Sistem Informasi dan Multimedia 1 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan Data 2 Penanganan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penanganan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangaman dan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi legal 2 Penangamalan pengelolaan laboratorium metrologi le				
404 Pranata Komputer Ahli Pertama				
6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 7 PP No. 28 Tahun 20018 Tentang Kerja Sama Daerah 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau 1 IT Enterprise 2 Manajemen Layanan Tl 3 Pengelolaan Data 4 Manajemen Risiko Tl 5 Infrastruktur Tl 6 Sistem Informasi dan Multimedia 1 Manajemen Layanan Tl 2 Pengelolaan Data 3 Infrastruktur Tl 4 Sistem Informasi dan Multimedia 3 Infrastruktur Tl 4 Sistem Informasi dan Multimedia 1 Verlikasi Standar Ukuran Metrologi Legal 4 Ahli Pertama 2 Penanganan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal Nompetensi Generik: 1 Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium kesehatan 2 Audit mutu internal (IQC) dan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium 3 Quality management laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, dan identifikasi asam nukleat 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, dan identifikasi asam nukleat 5				
Pranata Komputer Ahli Pertama				
Peranata Komputer Ahli Pertama				
Pranata Komputer Ahli Pertama				
2 Manajemen Layanan TI 3 Pengelolaan Data 4 Manajemen Risiko TI 5 Infrastruktur TI 6 Sistem Informasi dan Multimedia 1 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan Data 3 Infrastruktur TI 4 Sistem Informasi dan Multimedia 406 Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama 1 Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal 407 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium kesehatan 2 Multi mutu internal (ICC) dan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 5 Sistem pekayanan laboratorium 6 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 7 Pemeriksaan an imunologi dasar 8 Pemeriksaan sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) Kemampuan Umum:			8	
3 Pengelolaan Data 4 Manajemen Risiko TI 5 Infrastruktur TI 6 Sistem Informasi dan Multimedia	404	Pranata Komputer Ahli Pertama		
4 Manajemen Risiko TI 5 Infrastruktur TI 6 Sistem Informasi dan Multimedia 405 Pranata Komputer Terampil 1 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan Data 3 Infrastruktur TI 4 Sistem Informasi dan Multimedia 406 Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama 407 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan inunologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 4 Kemampuan Umum:				
Sistem Informasi dan Multimedia				
6 Sistem Informasi dan Multimedia 405 Pranata Komputer Terampil 1 Manajemen Layanan TI 2 Pengelolaan Data 3 Infrastruktur TI 4 Sistem Informasi dan Multimedia 406 Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama 407 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 408 Pranata Laboratorium Kesehatan 5 Sistem Informasi dan Multimedia 4 Sistem Informasi dan Multimedia 4 Penanganan dan pengelolaan Iaboratorium metrologi legal 4 Kompetensi Generik: 4 Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium esehatan 4 Audit mutu internal (IOC) dan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 5 Sistem pekayanan laboratorium 6 Vompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanan darah lengkap dan hemostasis 2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 7 Pemeriksaan miunologi dasar 8 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 6 Pranata Laboratorium Kesehatan 6 Kemampuan Umum:				
Pranata Komputer Terampil				
2 Pengelolaan Data 3 Infrastruktur TI 4 Sistem Informasi dan Multimedia 406 Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama 1 Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal 2 Penanganan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal Kompetensi Generik: Pertama 1 Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium kesehatan 2 Audit mutu internal (IQC) dan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium 3 Quality management laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium Kompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanan darah lengkap dan hemostasis 2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) Kemampuan Umum:	405	Pranata Komputer Terampil		
3 Infrastruktur TI 4 Sistem Informasi dan Multimedia 406 Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama 2 Penanganan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal 407 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 4 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 4 Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 4 Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium kesehatan 2 Audit mutu internal (IQC) dan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium 3 Quality management laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium 4 Kompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanaan darah lengkap dan hemostasis 2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Kemampuan Umum:		- Page - Angelia		
Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama			3	Infrastruktur TI
Ahli Pertama 2 Penanganan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal Kompetensi Generik: 1 Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium kesehatan 2 Audit mutu internal (IQC) dan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium 3 Quality management laboratorium Kompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanan laboratorium Kompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanan darah lengkap dan hemostasis 2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) Kemampuan Umum:				
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	406	ū		
Pertama 1 Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium kesehatan 2 Audit mutu internal (IQC) dan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium 3 Quality management laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium Kompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanaan darah lengkap dan hemostasis 2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Kemampuan Umum:	407		2	
2 Audit mutu internal (IQC) dan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium 3 Quality management laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium Kompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanaan darah lengkap dan hemostasis 2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Kemampuan Umum:	407		1	
3 Quality management laboratorium 4 Sistem pekayanan laboratorium Kompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanaan darah lengkap dan hemostasis 2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Kemampuan Umum:		. Grama		
4 Sistem pekayanan laboratorium Kompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanaan darah lengkap dan hemostasis 2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Kemampuan Umum:				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kompetensi Spesifik: 1 Pemeriksanaan darah lengkap dan hemostasis 2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Kemampuan Umum:				
2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh 3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan 4 Kemampuan Umum:				Kompetensi Spesifik:
3 Pemeriksaan imunologi dasar 4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan 4 Pemeriksaan imunologi dasar 5 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 4 Kemampuan Umum:				
4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi 5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan 408 Kemampuan Umum:				
5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan) 6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Kemampuan Umum:				
6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat) 408 Pranata Laboratorium Kesehatan Kemampuan Umum:				
408 Pranata Laboratorium Kesehatan Kemampuan Umum:				
	408	Pranata Laboratorium Kesehatan		
				Kamus Kompetensi General / 1
Kemampuan Khusus:				
Kamus Kompetensi / 6				Kamus Kompetensi / 6

Halaman 91 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
409	Pranata Laboratorium Pendidikan	1	Perencanaan kegiatan laboratorium
	Ahli Pertama		Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan
			Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan
			Pengevaluasian sistem kerja laboratorium Pengembangan kegiatan laboratorium
410	Pranata Laboratorium Pendidikan		Perencanaan kegiatan laboratorium
	Terampil		Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan
		3	Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan
			Pengevaluasian sistem kerja laboratorium
411	Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terampil		Kemampuan Khusus:
	Fluaria Kurupsi Terampii		Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dukungan Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
			Pengamanan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
412	Pranata Pencarian dan Pertolongan		Kompetensi Umum:
	Pemula		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
		5	Permenpan No. 33 Tahun 2021
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang
		ь	Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
		7	Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional
			Pencarian dan Pertolongan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
		8	Siaga Pencarian dan Pertolongan
		_	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
		9	Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolonga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
			Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		11	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan
			Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk
		13	Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat
			Udara
		14	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengakreditasian Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan dan Bangunan
			Kompetensi Khusus
		1	Teknik operasi SAR di gunung dan hutan
		2	Teknik operasi SAR di ketinggian
			Teknik operasi SAR di perairan
412	Pranata Pencarian dan Pertolongan		Teknik pertolongan pertama Kompetensi Umum:
413	Terampil		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
			Permenpan No. 33 Tahun 2021 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang
			Peraturan Badan Nasional Pencanan dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tanun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
		7	Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional
			Pencarian dan Pertolongan
		8	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Signa Pencarian dan Pertolongan
			Siaga Pencarian dan Pertolongan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
		9	Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
		10	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
			Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian da Pertolongan
		11	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang
			Latihan Pencarian dan Pertolongan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang
			Standar Kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan
			Pertolongan
		13	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu
		10	Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		4.4	Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk
		14	Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
			Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan
		15	Pengakreditasian Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan dan Bangunan
•	•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Halaman 92 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
	•	-	Kompetensi Khusus:
			Teknik operasi SAR di gunung dan hutan Teknik operasi SAR di ketinggian
			Teknik operasi SAR di perairan
			Teknik pertolongan pertama
414	Pranata Siaran Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
		3	P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)
		4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
			Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
			Kemampuan Khusus:
			Dasar-dasar Komunikasi
			Penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia
			Agenda Setting Produksi dan Penyiaran Kelayakan materi produksi
			Penuliisan naskah
			Tim Produksi
		7	Dasar Jurnalistik
			Proses produksi
			Media Online
	}		Media Sosial Tugas-tugas profesi
			Membaca Naskah
			Membuat program siaran
			Mengevaluasi siaran
			Format program
			Animasi
	•		Tata Artistik
			Berita Desain Grafis
			Komunikasi Massa
			Konsep Dasar Multimedia
		22	Konsep Media Sosial
			Teori Dasar Penyiaran
			Produksi Siaran
			Profesi Siaran Program Siaran
			Proses Produksi Siaran
		28	Videografi
415	Pranata Sumber Daya Manusia		Kemampuan Umum:
	Aparatur Terampil		UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
			PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
			PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
			Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
	İ		Kemampuan Khusus:
			Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur
			Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN
			Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
	ł		Pengadaan ASN Pangkat dan Jabatan ASN
			Pengembangan Karier ASN
	İ		Pola Karier ASN
			Promosi ASN
			Mutasi ASN
			Penugasan ASN
	}		Pengembangan Kompetensi ASN Penilaian Kinerja ASN
			Disiplin ASN
			Penghargaan ASN
		15	Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
			Pemberhentian ASN
			Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
	1		Perlindungan ASN Cuti ASN
	1		Sistem Informasi ASN
416	Protokol Kenegaraan		Kemampuan Umum
	-	1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
			Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
	l	4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Halaman 93 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		5	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
		6	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
		7	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		8	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
		9	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		10	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
		1	Kemampuan Khusus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		4	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
		5	Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
		6	Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
		7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
		8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
		9	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan
		10	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
		11	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
		12	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
417	Psikolog Klinis Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
			Kebijakan Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan Kebijakan Terkait Jabatan Fungsional Psikolog Klinis
			Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis
			Prinsip Kode Etik Psikologi Klinis
			Dewan Kehormatan
			Pengaduan Masalah Etik
			Sanksi Prinsip Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis
			Konsep Umum Keselamatan Pasien
		10	Aspek Keselamatan Pasien
		11	Aspek Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Psikologi Klinis
		1	Kemampuan Khusus Observasi pada Asesmen Psikologi
			Wawancara Klinis pada Asesmen Psikologi
			Alat Tes Psikologi Terstandar pada Asesmen Psikologi
			Observasi dengan Pedoman Kerja atau Petunjuk Teknis
			Wawancara Klinis dengan Pedoman Kerja atau Petunjuk Teknis
			Alat Tes Psikologi Terstandar dengan Pedoman Kerja atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Normal
			Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Normal Bermasalah
		9	Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Gangguan Perkembangan
			Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Gangguan Penyesuaian Diri
			Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Gangguan Kecemasan Interpretasi Tes Kognitif, Non-Kognitif, Interview dan Observasi
			Interpretasi i es Rognitif, Non-Rognitif, interview dan Observasi Interpretasi Asesmen Psikologi Klinis Sesuai dengan Pedoman
			Membimbing Pelaksanaan Interpretasi Asesmen Psikologi
			Penegakan Diagnosis Psikologis Sesuai dengan Pedoman Diagnostik yang berlaku
			Penegakan Diagnosis Psikologis Sebagai Dasar untuk Penentuan Prognosis dan Intervensi Rekomendasi Hasil Penegakan Diagnosis
			Psikoedukasi
			Psikoedukasi Terhadap Komunitas
			Konseling dalam Intervensi Psikologi Klinis
			Psikoterapi
			Rujukan Rehabilitasi Intervensi Psikologi Klinis
			Psikoedukasi pada Pasien Normal Bermasalah

Halaman 94 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Psikoedukasi pada Pasien Gangguan Penyesuaian dalam intervensi psikologi
			Konseling Psikoterapi Pasien Normal Bermasalah
			Rujukan pada Anak dengan Penyakit Kronis
			Rujukan pada Pasien Normal Bermasalah
			Rehabilitasi Psikologi Klinis
			Psikoedukasi pada Pasien Gangguan Penyesuaian dalam intervensi psikologi klinis
			Konseling pada Pasien Normal dan Pasien Normal Bermasalah
			Psikoterapi Pasien Gangguan Kecemasan
/1Q	Pustakawan Ahli Pertama		Rujukan Pasien Gangguan Kecemasan Kompetensi Umum:
410	rustanawan Ami renama		Pembudayaan Kegemaran Membaca
			Sejarah Dunia Pustakawan
			Kemampuan Khusus:
			Pengembangan Koleksi Perpustakaan
			Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengetahuan
			Pengembangan Sistem Kepustakawanan Pelayanan Informasi dan Referensi
			Promosi Perpustakaan
			Pengembangan Literasi Informasi
419	Radiografer Ahli Pertama	_	SKKNI, Standar Profesi Radiografer dan Text book
420	Radiografer Terampil		Kemampuan Umum:
			Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer
			SKKNI/Kepmenaker 237/2020
			Vinnita Meril, Bontrager Buku teks Komunikasi Efektif dan Efisien
			Buku Teks Komunikasi Etektit dan Etisien Buku Teks Manajemen Logistik
			Buku Manajemen Radiologi
			Buku Teks K3 Radiologi
		8	Buku Teks Proteksi Radiasi
			Buku Teks Manajemen Mutu Radiologi
		10	Buku Teks QA dan QC Radiologi
		4	Kemampuan Khusus:
			Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer SKKNI/Kepmenaker 237/2020
			Vinnita Meril, Bontrager
			Buku Teks Pemeriksaan Radiografi
		5	Buku Teks Pemeriksaan CT Scan
			Snopeck, CT Scan
			Buku Teks K3 Radiologi
421	Refraksionis Optisien Terampil		Buku Teks Proteksi Radiasi Kompetensi Umum:
421	nellaksionis Optisien Terampii		Standar Profesi Refraksionis Optisien,
			Standar Pelayanan Refraksionis Optisien
			Regulasi dan perundang-undangan, Kode Etik Profesi.
			Kompetensi Khusus:
			Pelayanan Fungsi Penglihatan
			Pelayanan Teknologi Optik
			Pelayanan Diagnostik Pelayanan Terapeutik
422	Registrar		Implementasi rancangan tata pamer
			Prosedur pameran
		3	Antisipasi keamanan dan pengamanan
			Penjelasan penyajian koleksi
			Perkiraan kebutuhan bahan dan meteri pameran
			Perkiraan kebutuhan peralatan
			Perkiraan kebutuhan media komunikasi pameran Perkiraan kebutuhan benda koleksi
			Perkiraan benda koleksi
		_	Perkiraan sarana dan prasarana pameran
			Design penyajian koleksi
			Penataan koleksi diruang tata pamer
			Standar penyajian rancangan benda koleksi
			Sistem pencatatan Tampilan pencahayaan dalam tata pemer
			Tampilan pencahayaan dalam tata pamer Tampilan tata warna
			Pembongkaran pameran
			Evaluasi kegiatan pameran
			Perawatan benda koleksi pasca pameran
		20	Promosi pameran
			Laporan pertanggungjawaban kegiatan
			Prosedur penerimaan
			Sistem penomoran koleksi Sistem pencatatan ke dalam buku induk registrasi
			Standar pembuatan label koleksi hasil registrasi

Halaman 95 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		26	Standar pembuatan kartu registrasi koleksi hasil registrasi
			Standar pembuatan informasi indentitas koleksi
			Prosedur administrasi pemindahan koleksi
400	Sandiman Ahli Pertama	29	Standar penataan koleksi di ruang storage
423	Sandinan Anii Fertama	1	Kemampuan umum: Konsep dasar TIK
			Sistem komputer
			Jaringan komputer
			Sistem informasi
		5	Kriptografi
			Kemampuan khusus:
			Budaya Kaminfo
			Penanggulangan dan pemulihan insiden
	-		Penerapan Kaminfo Standar dan regulasi Kaminfo
424	Sandiman Terampil	4	Kemampuan umum:
'-'	Canaman Torampii	1	Konsep dasar TIK
			Sistem komputer
			Jaringan komputer
		4	Sistem informasi
		5	Kriptografi
			Kemampuan khusus
			Budaya Kaminfo
	 		Penerapan Kaminfo Standar dan regulasi Kaminfo
425	Serang Kapal Kelas I	J	Standar dan regulasi Kaminio Kemampuan Umum
720	Solaring rapar rolds i	1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
	 		Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
			Kemampuan Khusus
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
	•		Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan. Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
			Kecakapan Bahari.
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
	-		Dasar-dasar Akuntansi. Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut.
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
426	Serang Kapal Kelas II		Kemampuan Umum
		1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
		1	Kemampuan Khusus Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
	 		Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar. Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
			Dasar Pengetahuan tentang Neteorologi. Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
			Kecakapan Bahari.
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan. Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
			Dasar-dasar Akuntansi.
		14	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut.
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
427	Serang Kapal Kelas III	ıβ	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut. Kemampuan Umum
761	Colaing Napai Nelas III	1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
			Kemampuan Khusus
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.

Halaman 96 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal. Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
			Kecakapan Bahari.
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja. Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
			Dasar Pengetahuan tentang Penderikan Kapal Desain Permesinan.
			Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
			Dasar-dasar Akuntansi. Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut.
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
428	Statistisi Ahli Pertama	10	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut. Kemampuan Umum:
0	otationer / mm r ortaina		Statistik Dasar
			Kemampuan Khusus:
			Persiapan kegiatan statistik Pengumpulan Data
			Pengolahan Data Pengolahan Data
			Analisis Data Statistik
		5	Diseminasi Hasil Kegiatan Statistik
429	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama		Kemampuan umum: Pemahaman dasar informasi geospasial
			Pemanaman dasar informasi geospasiai Kemampuan khusus:
		1	Pengukuran/pengumpulan dan pengolahan data hasil survei terestris dan survei hidrografi
		2	Pengumpulan dan pengolahan data fotogrametri/foto udara
			Penyajian data hasil survei
			Pengolahan data penginderaan jauh Pemanfaatan data dan informasi geospasial
430	Surveyor Pemetaan Terampil	Ŭ	Kemampuan umum:
			Pemahaman dasar informasi geospasial
		4	Kemampuan khusus:
			Pengukuran/pengumpulan dan pengolahan data hasil survei terestris dan survei hidrografi Pengumpulan dan pengolahan data fotogrametri/foto udara
			Penyajian data hasil survei
			Pengolahan data penginderaan jauh
121	Surveyor Pengangkutan Barang	5	Pemanfaatan data dan informasi geospasial
401	Berbahaya	1	Kemampuan Umum Bahasa Inggris Maritim.
	•		Teknologi informatika.
		3	Ilmu Ekonomi
		1	Kemampuan Khusus Dasar-dasar Kepelabuhanan.
			Dokumen Kepelabuhanan dan Dokumen Pengangkutan.
			Peraturan nasional dan konvensi internasional.
			Kepedulian Lingkungan.
			K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Sistem Manajemen Keselamatan Kapal.
			Jasa dan Fasilitas Pelabuhan.
		8	IMDG Code.
			ISPS Code.
			Manajeman Angkutan Laut. Keagenan.
			Logistik dan Supply Chain Management.
		13	Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal.
			Manajemen Mutu.
432	Teknisi Akuakultur Pemula	15	Manajemen Perusahaan Pelayaran Kemampuan Umum
	2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	1	Pedoman tentang pembudidayaan ikan
			Kemampuan Khusus
			Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan perikanan budidaya Pengelolaan perbenihan ikan
			Pengelolaan perbeninan ikan Pembinaan unit pembenihan ikan
			Pengelolaan sertifikasi bidang perikanan budidaya
			Kemampuan Umum:
433	Teknisi Akuakultur Terampil	_	
433	Teknisi Akuakultur Terampil	1	Pedoman tentang pembudidayaan ikan
433	Teknisi Akuakultur Terampil		Kemampuan Khusus
433	Teknisi Akuakultur Terampil	1	
433	Teknisi Akuakultur Terampil	1 2 3	Kemampuan Khusus Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan budidaya perikanan Pengelolaan perbenihan ikan Pembinaan unit pembenihan ikan
433	Teknisi Akuakultur Terampil	1 2 3 4	Kemampuan Khusus Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan budidaya perikanan Pengelolaan perbenihan ikan

Halaman 97 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		6	Pengelolaan dan rehabilitasi lingkungan budidaya
434	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	1	Kemampuan Umum Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik
			Identifikasi pengembangan karir elektromedis
			Identifikasi jabatan fungsional elektromedis
			Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik
		5	Identifikasi tata cara menjadi pejabat fungsional elektromedis
			Identifikasi pelayanan kegiatan kalibrasi alat kesehatan
			Identifikasi dasar alur dan proses pelayanan elektromedis
			Identifikasi dasar area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-5 Identifikasi pelayanan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan
		3	Kemampuan Khusus
		1	Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar
		2	Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar
			Pengujian/kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar
			Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar
125	Teknisi Elektromedis Terampil	5	Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar Kemampuan Umum:
433	Teknisi Liektionieuis Terampii	1	Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik
			Identifikasi pengembangan karir elektromedis
		3	Identifikasi jabatan fungsional elektromedis
			ldentifikasi kebijakan pelayanan elektromedik
			Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan
			Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis
			Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4 Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan
			Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis
			Kemampuan Khusus:
		1	Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar
			Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar
			Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar
			Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar
436	Teknisi Gigi Terampil	J	Kemampuan Umum:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	KepmenakerNo.115 Tahun 2019 Tentang SKKNI
			Permenkes No.460 Tahun 2020 tentang standar profesi
		3	Permenkes 54 tahun 2012 ttg penyelenggaraan pekerjaan
			Kemampuan Khusus:
		1	Analisis Rekomendasi Instruksi Kerja Disertai Persiapan Alat, Bahan, dan Model Kerja untuk Pelayanan Laboratorium Teknik Gigi
		2	Pelayanan Laboratorium Gigi Tiruan
			Pelayanan Laboratorium Alat Orthodonti
		4	Pelayanan Laboratorium Protese Maxillo Facial
437	Teknisi Kesehatan Ikan Pemula		Kompetensi Umum:
			Kebijakan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya
		1	Kompetensi Khusus: Jenis-jenis penyakit ikan
		-	Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan
			Penanganan penyakit
		4	Metode pengujian laboratorium
			Jenis-jenis obat ikan
400	Teknisi Kasahatan II T	6	Monitoring lingkungan
438	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil		Kompetensi Umum: Kebijakan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya
			Kompetensi Khusus:
		1	Jenis-jenis penyakit ikan
			Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan
			Biosecurity
			Penanganan penyakit
			Metode pengujian laboratorium Substansi Uji Residu
			Monitoring lingkungan
439	Teknisi Listrik Kapal Kelas I		Kemampuan Umum:
	·	1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		4	Kemampuan Khusus:
		2	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Prosecuti Daturat dari SAN Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Gian Goran dan Gingkungan
		6	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
1 1	l l	9	Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan

Halaman 98 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		_	Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
440	Teknisi Listrik Kapal Kelas II		Kemampuan Umum:
		_	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		<u> </u>	Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		_	Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		_	Pengenalan Permesinan Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		_	Dasar-dasar Akuntansi
		_	Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
			Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
441	Teknisi Menara Suar	10	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut Kemampuan Umum:
441	Teknisi Menara Suar	1	Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
			Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
			Kemampuan Khusus:
		1	Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Ineterologi Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Processi Baranat dan Pengendalian Kapal
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
			Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
			Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11	Pengenalan Permesinan Kapal
		12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13	Dasar-dasar Akuntansi
			Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
			Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait
		16	Dasar Bisnis Keagenan Kapal
			Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18	Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
442	Teknisi Mesin Alat Berat	<u> </u>	Kompetensi Umum:
			Prinsip-prinsip Dasar Hidrolik
		_	Pengukuran
			Keamanan Pengoperasian Alat Berat
		4	Penggunaan Peralatan Perawatan Alat Berat
		L.	Kompetensi Khusus:
			Komponen Alat Berat
			Sistem dan Konstruksi Alat Berat
			Sistem Kelistrikan pada Alat Berat
440	Taknini Banalitian dan Daratiana	4	Pelepasan dan Pemasangan Komponen Alat berat
443	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	<u> </u>	Kemampuan Umum:
	Terampil	1	Penyusunan daftar kebutuhan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi
			Penyiapan kebutuhan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi Kemampuan Khusus:
		1	Pelaksanaan Penelitian
		_	Pelaksanaan Pengembangan
		_	Pelaksanaan Pengkajian
			Pasca Pelaksanaan Penjaminan Mutu Layanan IPTEK
444	Teknisi Pengendali Hama dan	Ť	Kemampuan Umum:
	Penyakit Ikan Terampil	1	Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
1 1	, r	<u> </u>	and the same of the same and th

Halaman 99 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		2	Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan - mampu menyebutkan dan menjelaskan tugas dan fungsi karantina
			Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
			Permen PAN RB nomor 47 tahun 2022 Permen KP nomor 17 tahun 2021 tentang PIK
		6	Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi,dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
		-	Kemampuan Khusus:
		2	Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
			Permen KP nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan media pembawa
		4	Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
		5	Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan pembudidayaan peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang berbahaya
		6	Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi karantina Ikan Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa katrantina ikan mutu dan
		7	keamanan hasil perikanan
		8	Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi,dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
		9	Kepmen KP nomor 55 tahun 2022 tentang pemasukan dan pengeluaran media jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
		10	Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis Penyakit Ikan Karantina organisme penyebab golongan dan media pembawa
			Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
			Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif Pengelolaan laboratorium
			Teknik pengambilan sampel
445	Teknisi Perkebunrayaan Pemula	1	Bank biji
		2	Identifikasi tumbuhan
			Registrasi Kebun raya
			Herbarium
		6	Konservasi umum
		7	Pembibitan
116	Teknisi Perkebunrayaan Terampil		Pemeliharaan koleksi Bank biji
440	Teknisi Ferkebunayaan Terampii		Identifikasi tumbuhan
			Registrasi
			Kebun raya
			Herbarium Konservasi umum
			Pembibitan
		8	
447	Teknisi Perkeretaapian	4	Kemampuan Umum:
		2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
			Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		5	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
		7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
		4	Kemampuan Khusus:
			Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
			Pengaturan perjalanan kereta api
		4	Awak sarana perkeretaapian
		5	Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
			Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
440	Takniai Caran	7	Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
448	Teknisi Sarana dan Prasarana		Kompetensi Umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
			Kompetensi Khusus
			Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung
			Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung
449	Teknisi Siaran Ahli Pertama	1	Kemampuan Umum: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
			Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang LPP
			Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2017

Halaman 100 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
		4	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
		5	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui
		5	Media Terestrial
		6	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE
			Kemampuan Khusus:
		1	Peralatan-peralatan Penyiaran
			Peralatan Pemancar
		3	Jenis Antenna
			Teknik Pengukuran RF Fungsi Aplikasi Penyiaran
			Fungsi Peralatan Distribus Audio
			Jaringan Internet
			Perangkat Server
		9	Peralatan Teknik Produksi
			Dasar Aplikasi Berbasis Web
			Perangkat Pendukung Media Baru
			Sistem 3 Phase Sistem 1 Phase
			Audio-Video
			Teknik Tata Cahaya
			Teknik Kamera-Video
		17	Sistem Komputer
			Teknik Komputer
			Multimedia
			Elektronika Listrik
			Multiplexing
			Dasar Penyiaran
			Server
		25	Frekuensi
450	Teknisi Transfusi Darah Terampil		Kemampuan Umum:
			Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
			Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
			Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 PP No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah
			Permenkes NO. 83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
			Permenkes No. 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Darah
		7	Permenkes No. 92 Tahun 2015 Tentang Kerjasama antara puskesmas, UTD dan Rumah Sakit dalam
			Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian Ibu
			Perka BPOM No. 10 Tahun 2017
			Etika Profesi TPD Kode Etik Profesi TPD
			Komunikasi Efektif
			Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.07.01/MENKES/410/2020
			Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.07.01/MENKES/410/2020
		14	SKKNI No. 220 tahun 2020
			Kemampuan Khusus:
			Penjaminan Mutu di Bidang Pelayanan Darah
			Penyediaan Darah Untuk Transfusi Pengolahan, dan pengujian Darah
			Penyimpanan dan Distribusi Darah
			Pemeriksaan Pencocokkan Darah
	Tenaga Penanggulangan		Kemampuan Umum:
			Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2	Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		-	Kemampuan Khusus:
			Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
			Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
			Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Daharat dan SAN
			Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6	Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
			Kecakapan Bahari
			Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
			Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10	Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
			I Dongonalan Barmasinan Kanal
		11	Pengenalan Permesinan Kapal Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		11 12	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		11 12 13	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika Dasar-dasar Akuntansi
		11 12 13 14	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		11 12 13 14 15 16	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika Dasar-dasar Akuntansi Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		11 12 13 14 15 16 17	Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika Dasar-dasar Akuntansi Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait

Halaman 101 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
452	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu		Kemampuan Umum:
	Perilaku Ahli Pertama		Permenpan No. 70 Tahun 2021 Tentang JF TPKIP
			Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas Permenkes No. 44 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan PKRS
			Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang GERMAS
			Kemampuan Khusus:
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Penggalangan Kemitraan
452	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu	4	Advokasi Kesehatan Kemampuan Umum:
	Perilaku Terampil	1	Permenpan No. 70 Tahun 2021 Tentang JF TPKIP
			Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
			Permenkes No. 44 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan PKRS
			Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang GERMAS
			Kemampuan Khusus:
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Penggalangan Kemitraan
			Advokasi Kesehatan
454	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli		Kemampuan Umum:
	Pertama	1	Undang Undang No.12 th 2023 tentang Kesehatan
		2	PP No. 11 Th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3	Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Th 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP RI No. 66 Th 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
		4	Peraturan Menpan RB no.71 Tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
		5	Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4788/2021 tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan
			Kemampuan Khusus:
			Surveilans Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
			Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan
			Edukasi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Rekayasa Lingkungan
			Intervensi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Penyakit dan Gangguan
			Kesehatan
		6	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi Sanitasi Lingkungan pada
		U	Kondisi Matra, Perubahan Iklim, dan Ancaman Global
455	Tenaga Sanitasi Lingkungan		Kemampuan Umum:
	Terampil		Peraturan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan Peraturan tentang standar profesi TSL (Tenaga Sanitasi Lingkungan)
			Kode Etik Profesi TSL
			Pelayanan kesehatan lingkungan
			Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL)
			Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
			Kemampuan Khusus:
			Surveilans Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan
			Edukasi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Rekayasa Lingkungan
			Intervensi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Penyakit dan Gangguan
		J	Kesehatan
		6	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi Sanitasi Lingkungan pada
456	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama		Kondisi Matra, Perubahan Iklim, dan Ancaman Global Kemampuan Umum:
+30	Totapio digi dari Mulut Allii Fertafild	1	Permenkes No 20 Tahun 2016
			Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
			Kode etik Terapis Gigi dan Mulut
			Kemampuan Khusus:
			Pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
			Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Penyusunan Tujuan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
			Intervensi Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
			Penilaian Tata Laksana Asuhan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
			Pengelolaan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
457	Terapis Gigi dan Mulut Terampil		Kemampuan Umum:
			Permenkes No 20 Tahun 2016
			Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Kode etik Terapis Gigi dan Mulut
			Kode etik Terapis Gigi dan Mulut Kemampuan Khusus:
			Pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
			Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		3	Penyusunan Tujuan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
			Intervensi Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
			Penilaian Tata Laksana Asuhan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		ь	Pengelolaan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat

Halaman 102 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI

NO	NAMA JABATAN		MATERI POKOK
458	Terapis Wicara Terampil		Kemampuan Umum:
		1	Regulasi dan perundang-undangan; Standar Profesi Terapis Wicara;
			Regulasi dan perundang-undangan; PMK NO.81/2013; uu no.17/2023; KEPUTUSAN KETUA UMUM DPP IKATAN TERAPIS WICARA INDONESIA NOMOR: 02/DPP-IKATWI/SK/V/2015 TENTANG STANDAR KODE ETIK TERAPIS WICARA INDONESIA
		3	Regulasi dan perundang-undangan; PMK NO.24/2013; pmk no.81 tahun 2023; SKKNI; Standar Kompetensi Profesi Terapi Wicara
			Regulasi dan perundang-undangan; KEPUTUSAN KETUA UMUM DPP IKATAN TERAPIS WICARA INDONESIA NOMOR: 02/DPP-IKATWI/SK/V/2015 TENTANG STANDAR KODE ETIK TERAPIS WICARA INDONESIA; PMK NO.24/2013; pmk no.81 tahun 2023; SKKNI; Standar Kompetensi Profesi Terapi Wicara
		5	Regulasi dan perundang-undangan; PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN
		6	Regulasi dan perundang-undangan; PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
		7	Regulasi dan perundang-undangan; Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan.
		8	Regulasi dan perundang-undangan; PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KLINIK
		9	Regulasi dan perundang-undangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan; 21)Peraturan Menteri Kesehatan RI No 56 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
		10	Regulasi dan perundang-undangan; Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
		11	Regulasi dan perundang-undangan; KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/3648/2021 TENTANG STANDAR PROFESI TERAPIS WICARA
			Kemampuan Khusus:
			Regulasi dan perundang-undangan; KEMENNAKER NO. 227/2020 tentang SKKNI, Standar Kompetensi Profesi Terapis Wicara, PERMENPAN NO.48 TAHUN 2005; PMK NO.24/2013; PMK no.81 tahun 2023; KEPUTUSAN KETUA UMUM DPP IKATAN TERAPIS WICARA INDONESIA NOMOR: 02/DPP-IKATWI/SK/V/2015 TENTANG STANDAR KODE ETIK TERAPIS WICARA INDONESIA dan BUKU PENUNJANG
459	Widyabasa Ahli Pertama		Kemampuan Umum:
		1	UU Nomor 24 Tahun 2009
			PP Nomor 57 Tahun 2014
		3	Perpres Nomor 63 Tahun 2019
	 -	1	Kemampuan Khusus
	 		Pemahaman tentang tes kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) Penyuntingan dan penyuluhan bahasa
			Pemahaman terhadap Ahli Bahasa
			Penguasaan literasi
			Produk leksikografi
		6	Pemahaman terhadap kaidah Bahasa Indonesia (EYD, TBBI, PUPI)
	[7	Perlindungan bahasa dan sastra
		8	Perencanaan peningkatan kompetensi pengajar BIPA
			Perencanaan fasilitasi pembelajaran BIPA
460	Widyaiswara Ahli Pertama		Perancangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
400	widyaiswaia Aiiii Fellailia		Pembelajaran Orang Dewasa
			Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan
			Media Pembelajaran
			Metode Pembelajaran
		6	E-learning/Pembelajaran Daring
	[Teknik Komunikasi dalam Pembelajaran
			Praktik Mengajar/Micro Teaching
			Penyusunan Kurikulum
			Penyusunan Modul Pelatihan Dasar-dasar Karya Tulis Ilmiah (KTI)
<u> </u>			במסמי סמסמי המיץס דעווס ווודוומוד (הדדו)

Halaman 103 dari 103

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241104UUNI